

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015**  
**DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Gambaran umum kondisi daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, adalah sebagai berikut :

**2.1 Aspek Geografi Dan Demografi**  
**2.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah**  
**2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Sumatera Utara memiliki luas total sebesar 181.860,65 km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan seluas 72.981,23 km<sup>2</sup> atau 3.73 % dari luas wilayah Republik Indonesia dan luas perairan sebesar 110.000,65 km<sup>2</sup>, sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil, baik di perairan bagian barat maupun di bagian timur Pulau Sumatera.

Perkembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara mengikuti dinamika kehidupan sosial ekonomi dan perpolitikan di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2015, secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 436 Kecamatan dan 5.418 Desa/Kelurahan. Kabupaten Mandailing Natal merupakan kabupaten dengan wilayah terluas yaitu 6.134,00 Km<sup>2</sup> (8,40%). Sedangkan luas terkecil adalah Kota Tebing Tinggi yaitu 31,00 km<sup>2</sup> (0,04%). Data selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 2.1.** dibawah ini :

**Tabel 2.1.**  
**Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara**

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Jumlah Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )*
1	Kota Medan	Medan	21	265
2	Kota Binjai	Binjai	5	59.19
3	Kota Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	5	31
4	Kota Pematangsiantar	Pematangsiantar	8	55.66
5	Kota Tanjung Balai	Tanjung Balai	6	107.83
6	Kota Padangsidempuan	Padangsidempuan	6	114.66
7	Kota Sibolga	Sibolga	4	41.31
8	Kota Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	6	280.78
9	Kab. Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	2241.68
10	Kab. Serdang Bedagai	Sei Rampah	17	1900.22
11	Kab. Langkat	Stabat	23	6262
12	Kab. Asahan	Kisaran	25	3702.21
13	Kab. Dairi	Sidikalang	15	1927.8
14	Kab. Karo	Kabanjahe	17	2127
15	Kab. Labuhan Batu	Rantau Prapat	9	2156.02

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Jumlah Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )*
16	Kab. Labuhan Batu Utara	Aek Kanopan	8	3570.98
17	Kab. Labuhan Batu Selatan	Kota Pinang	5	3596
18	Kab. Simalungun	Pamatang Raya	31	4369
19	Kab. Tapanuli Utara	Tarutung	15	3791.64
20	Kab. Tapanuli Tengah	Pandan	20	2188
21	Kab. Tapanuli Selatan	Sipirok	14	6030.47
22	Kab. Toba Samosir	Balige	16	2328.89
23	Kab. Mandailing Natal	Panyabungan	23	6134
24	Kab. Pakpak Bharat	Salak	8	1218.3
25	Kab. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	10	2335.33
26	Kab. Samosir	Pangururan	9	2069.05
27	Kab. Nias	Gido	10	1842.51
28	Kab. Nias Utara	Lotu	11	1202.78
29	Kab. Nias Selatan	Teluk Dalam	31	1825.2
30	Kab. Nias Barat	Lahomi	8	473.73
31	Kab. Batu Bara	Limapuluh	7	922.2
32	Kab. Padang Lawas	Sibuhuan	12	3892.74
33	Kab. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	9	3918.05
	<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	<b>Medan</b>	<b>436</b>	<b>72.981,23*</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : \*) Berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

### 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 0° - 4°33' Lintang Utara dan 96°50' - 100°52' Bujur Timur, merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara berbatasan sebelah utara dengan Provinsi Aceh, sebelah barat dengan Samudera Hindia, sebelah selatan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat serta sebelah timur dengan Selat Malaka. Secara regional Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Provinsi Sumatera Utara memiliki garis pantai sepanjang 1.300 Km. Panjang Garis Pantai Timur 545 Km, Panjang Garis Pantai Barat 375 Km dan Panjang Garis Pantai Pulau Nias 380 Km. Terdapat 419 pulau, dengan 237 pulau yang telah memiliki nama, dengan 6 pulau di wilayah Pantai Timur termasuk Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan selat Malaka dan sisanya 182 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat.

Pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat hutan mangrove seluas 63.467,4 Ha dalam kondisi baik seluas : 27.019,57 Ha dan 36.447,83 Ha dalam kondisi rusak yang tersebar di 6 Kabupaten (belum termasuk Nias). Selain hasil laut dan perikanan lainnya, kawasan ini memiliki potensi pariwisata bahari yang belum teridentifikasi seluruhnya.

Daerah pantai di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara sangat bervariasi yaitu daerah yang curam, berbatu dan di beberapa daerah terdapat pantai yang didominasi rawa. Kondisi pantai semacam ini banyak ditemukan di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga dan Mandailing Natal. Sedangkan Pantai Kabupaten Nias dan

Kabupaten Nias Selatan didominasi oleh pantai berbatu dan berpasir, khususnya yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia.

Banyak terdapat pulau-pulau kecil merupakan ciri yang dimiliki oleh kawasan pesisir barat Sumatera Utara. Pantai barat ini juga memiliki hamparan mangrove sekitar 14.270 Ha yang membujur dari pantai selatan Kabupaten Mandailing Natal sampai ke pantai selatan Kabupaten Tapanuli Tengah serta di daerah pulau-pulau di Kabupaten Nias dengan ketebalan antara 50-150 meter. Terumbu karang di Pantai Barat Sumatera Utara terdapat di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang tumbuh pada kedalaman 3-10 meter.

### 2.1.1.3 Topografi

#### *21 Kemiringan Lahan*

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari Utara ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0% - 2% seluas 17,8% dari luas wilayah, 2%-15 % seluas 49,2% dari luas wilayah, 15% - 25% seluas 8,8%, 25% - 40% seluas 10,8% dan diatas 40% seluas 11,3% dari luas wilayah, sedangkan luas wilayah perairan Danau Toba sekitar 112.986 Ha atau 1,6% dari luas wilayah.

#### *22 Ketinggian Lahan*

Ketinggian lahan di Provinsi Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0 - 2200 m dpl. terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian Timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 Km<sup>2</sup> atau 34,77 persen dari luas wilayah Sumatera Utara adalah Daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Banjir juga sering melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis.

Wilayah dataran tinggi dan wilayah Pantai Barat seluas 46.758,69 Km<sup>2</sup> atau 65,23 persen dari luas wilayah Sumatera Utara, sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa danau, sungai, air terjun dan gunung berapi dijumpai di wilayah ini serta sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik.

### 2.1.1.4 Geologi

#### *1. Struktur dan Karakteristik*

Secara geologis, wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di sebelah timur dan lempeng Australia di sebelah barat. Hal ini menyebabkan terbentuknya rangkaian jalur patahan, rekahan dan pelipatan disertai kegiatan vulkanik. Jalur patahan tersebut melewati jalur Sumatera Utara mulai dari segmen Alas-Karo dan sepanjang kurang lebih 390 km merupakan sumber bencana alam geologi berupa pusat-pusat gempa di darat, tsunami dan pemicu terjadinya letusan gunung berapi

dan tanah longsor. Jalur patahan (*subduction*) di Pantai Barat sepanjang kurang lebih 250 km merupakan pusat pusat gempa di dasar laut.

Kondisi struktur geologi yang kompleks yang dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan, terlipat dengan patahan selain merupakan jalur gempa juga potensial menimbulkan tanah longsor terhadap sekitar 40-50 % dari luas daerah Provinsi Sumatera Utara yang mencakup 18 wilayah kabupaten dan 1 kota (menurut keadaan tahun 2005) merupakan kawasan yang rentan gerakan tanah longsor.

## 2. Potensi Sumber Energi

Sumber daya energi sebagai kekayaan alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Selain itu, sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat banyak terutama dalam peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan ketahanan nasional maka sumber daya energi harus dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan energi yang dilakukan secara terus menerus guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaannya harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Mengingat arti penting sumber daya energi, Pemerintah perlu menyusun rencana pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang berdasarkan kebijakan pengelolaan energi jangka panjang. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu dibentuk Undang-Undang tentang Energi sebagai landasan hukum dan pedoman dalam rangka pengaturan dan pengelolaan di bidang energi.

Dalam Undang-undang no 30 Tahun 2007 dijelaskan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Sedangkan Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Dibedakan dengan sumber daya energi, dalam Undang-undang ini sumber daya energi diartikan sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.

Kondisi saat ini energi telah berubah menjadi suatu hal yang sangat urgen dan mendesak, dan kondisi ini telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Energi (khususnya fosil) masih diperlakukan sebagai komoditi dagang yang memberikan nilai tambah yang rendah.
- b. Tidak mencukupinya pasokan energy untuk kebutuhan energy domestik, namun produksi energi diekspor dalam jumlah yang besar.
- c. Pemanfaatan energi tidak efisien.
- d. Harga energy belum memenuhi harga keekonomian.
- e. Iklim investasi energy masih rendah.
- f. Kapasitas industri energi nasional masih rendah.
- g. Terbatasnya akses masyarakat terhadap energi.

Cadangan energi yang bersumber dari energi tak terbarukan sangatlah terbatas. Produksi energi fosil cenderung mengalami penurunan sedangkan kebutuhan energi semakin meningkat. Seiring dengan UU no. 30 thn 2007 tentang energi telah mengamanatkan untuk meningkatkan pengelolaan energi. Pasal 20 dalam UU tersebut menekankan untuk meningkatkan energi terbarukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah khususnya di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan sumber energi setempat khususnya energi terbarukan. Pasal 21 UU itu juga menyebutkan bahwa pengelolaan energi terbarukan lebih ditingkatkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Pemerintah dapat memulai dengan melakukan inventarisasi sumber energi, diversifikasi, dan pemberian insentif bagi pengembangan energi baru terbarukan. Dari sisi pengembangan tenaga listrik telah ditetapkan Peraturan Pemerintah no. 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. Pada pasal 25 PP itu Pemerintah memberikan peluang pemberian tenaga listrik terbarukan melalui penunjukan langsung. Pemerintah telah melakukan langkah konkrit dengan menerbitkan kebijakan tarif dan pembangkit yang bersumber dari energi terbarukan seperti tenaga air, biomassa, sampah kota, tenaga surya, dan lainnya.

Sektor energi memiliki peranan sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan nasional. Ketersediaan energi primer menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap penyediaan energi. Salah satu energi yang langsung dapat digunakan adalah energi listrik. Ketersediaan energi listrik yang berkualitas adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung kegiatan pembangunan suatu daerah. Penyediaan energi listrik telah mampu berperan dalam infrastruktur ekonomi suatu daerah.

Potensi energi berupa panas bumi sebagai energi alternatif yang tersebar pada beberapa tempat di Sumatera Utara, diantaranya di Kabupaten Karo, Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal. Sumber panas bumi ini berpotensi sebagai pembangkit energi listrik Sumatera Utara.

Terdapat 4 (empat) Kabupaten / kota penghasil minyak dan gas yang ada di Sumatera Utara, yaitu : Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, Kab. Padang Lawas, dan Kota Binjai dengan realisasi Lifting Minyak Bumi pada tahun 2013 sebesar 339.120 barel dan pada tahun 2014 sebesar 509.077 barel. Dengan potensi/cadangan minyak bumi Sumatera Utara sampai dengan akhir 2015 sebesar 46.431,88 MSTB. Untuk jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.2.** dibawah ini:

**Tabel 2.2.**  
**Potensi Minyak Bumi Tahun 2015**

KABUPATEN	CADANGAN (MSTB)* MINYAK BUMI		
	TERBUKTI	MUNGKIN	HARAPAN
LANGKAT	19.466	6.884	3.310
DELI SERDANG	7.551	31	27
BINJAI	5.207	0	0
MEDAN	674	686	594
PADANG LAWAS	2.000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>34.898</b>	<b>7.602</b>	<b>3.931</b>

\*MSTB = Thousand stock tank barrel / ribu barrel tanki pengumpul

Sumber : Dinas Pertambangan Energi Provinsi Sumatera Utara, 2015

Potensi / cadangan Gas Bumi Sumatera Utara yang terdata sampai dengan akhir 2014 adalah sebesar 556.219 MMSCF (536.2 BCF) yang terdiri dari Potensi / cadangan terbukti sebesar 472.399 MMSCF , potensi / cadangan mungkin sebesar 56.478 MMSCF dan Potensi / cadangan harapan sebesar 27.342 MMSCF. Sedangkan untuk realisasi Lifting Gas Bumi pada tahun 2013 sebesar 3.888,1 ribu MMBTU dan pada tahun 2014 sebesar 4.822,4 MMBTU. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.3.** berikut ini:

**Tabel 2.3.**  
**POTENSI GAS BUMI TAHUN 2015**

KABUPATEN	CADANGAN (MMSCF)* GAS		
	TERBUKTI	MUNGKIN	HARAPAN
LANGKAT	233.591	54.797	25.893
DELI SERDANG	143.065	0	0
BINJAI	37.810	0	0
MEDAN	3.933	1.681	1.449
OFFSHORE MEDAN - LANGKAT	54.000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>472.399</b>	<b>56.478</b>	<b>27.342</b>

\*MMSCF = Million Standart Cubic Feet / Juta kaki kubik

Sumber : Dinas Pertambangan Energi Provinsi Sumatera Utara, 2015

Cadangan batubara terdapat di 15 (lima belas) titik dan gambut yang merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, juga dapat digunakan sebagai media semai. Timah putih merupakan bahan galian yang berfungsi sebagai bahan industri dan konstruksi. Di Provinsi Sumatera Utara sebaran lokasi potensinya berada pada Aekhabil Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah pada 1°45'03,3" LU 99°08'11,2" BT dengan jumlah cadangan sebesar 470 BSCF dan Desa Hatapang Kecamatan Na-IX-X Kabupaten Labuhanbatu. Serta beberapa wilayah lain yaitu di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan) dimana hingga saat ini dalam tahap Penyelidikan Umum. Terdapat juga indikasi potensi energi nuklir (radioaktif) yang terdapat di Kelurahan Aekhabil Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, yakni berupa Radium (Ra).

### 3. Bahan Tambang Mineral Logam dan Bukan Logam

Bahan tambang mineral di Sumatera Utara terdiri dari 21 (dua puluh satu) jenis berupa Antimoni, Arsen, Barit, Bauksit, Belerang, Besi, Bismut, Kromium, Emas, Perak, Tembaga, Florit, Mangan, Merkuri, Molibdenum, Niobium, Platina, Tellurium, Seng, Timbal dan Wolfram. Selain itu pula terdapat juga bahan tambang mineral bukan logam dan batuan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) jenis yang tersebar pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Utara antara lain : Bentonit, Zeolit, Dolomit, Travertin, Diatomea, Trass, Andesit, Granit, Feldspar, Marmer, Kaolin, Batumulia, Batu Gamping, Batu Apung, Perlit, Kalsit, Kukarsit, Phospat, Lempung, Pasir Kuarsa, Mika, Grafit, Oker, Talk, Sirtu, dan Serpentin.

Provinsi Sumatera Utara mempunyai berbagai jenis bahan galian mineral yang potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan, yaitu : mineral logam, emas, timah hitam (galena), seng, tembaga, besi dan mineral non logam : batu gamping, dolomit, bentonit, zeolit, kaolin, feldspar, marmer, granit, belerang, andesit, serpentinit, pasir kwarsa, perlit serta bahan galian energi : gambut, batubara, panas bumi (geothermal) serta minyak dan gas bumi. Secara umum telah diketahui besarnya cadangan geologi (perkiraan) dan mutu sumber daya mineral, namun untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan masih memerlukan penyelidikan eksplorasi secara detail, guna mengetahui cadangan terukur (pasti). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.4.** berikut ini:

**Tabel: 2.4.**  
**Potensi Pertambangan di Provinsi Sumatera Utara**

NO	SUMBER DAYA	DEPOSIT	LOKASI
V	PERTAMBANGAN		
1	Batubara	23,45 juta ton	Langkat, Lab.Batu, Nias
2	Geothermal	1.380 MW	Tapsel, Madina, Tapteng , Karo, Taput
3	Bauksit	27,6 juta ton	Lab.Batu
4	Andesit	58,2 juta ton	Deli serdang
5	Batu Gamping	1.678 juta ton	Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Taput, Nias, Humbahas
6	Bentonit	80,8 juta ton	Langkat, Tapsel
7	Dolomite	11,5 juta ton	Karo
8	Feldspar	117 juta ton	Taput, Simalungun, Langkat
9	Granit	951,3 juta ton	Taput, Tapteng, Lab.Batu
10	Marmer	32,5 juta ton	Madina, Karo, Dairi
11	Trust	32,9 juta ton	Simalungun, Karo, Langkat
12	Emas	Eksplorasi pendahuluan	Tapsel, Madina, Deli Serdang, Dairi, Humbahas
13	Seng	Eksplorasi Umum	Madina, Tapteng, Tapsel, Dairi

Sumber : Dinas Pertambangan Energi Provinsi Sumatera Utara, 2015

#### 2.1.1.5 Hidrologi

##### 1. Daerah aliran sungai

Kondisi hidrologi di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan air bawah tanah dimana secara keseluruhan wilayah terbagi atas 71 DAS dan 3 (tiga) DAS lintas provinsi. Jumlah induk sungai di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 99 buah, Anak Sungai sebanyak 783 buah, Ranting Sungai 659 buah, anak Ranting Sungai 342 buah.

##### 2. Sungai, Danau dan Rawa

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, maka sungai-sungai di Provinsi Sumatera Utara dapat dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) Satuan Wilayah Sungai berdasarkan lintas wilayahnya yaitu WS Strategis Nasional adalah WS Belawan – Ular – Padang dan WS Toba – Asahan. WS Lintas Provinsi yaitu WS Alas Singkil lintas provinsi dengan Provinsi Aceh, WS Batang Natal – Batang Batahan lintas

provinsi dengan Sumatera Barat dan WS Rokan lintas Provinsi dengan Riau. Sementara WS Batang Angkola – Batang Gadis, WS Wampu – Besitang, WS Bah Bolon, WS Barumon – Kualuh adalah, WS Pulau Nias, dan WS Sibundong – Batang Toru merupakan WS lintas Kab/Kota.

Kawasan rawa merupakan sumber daya alam yang petensinya belum dimanfaatkan dengan optimal bagi lahan pertanian dan pertambakan. Di Provinsi Sumatera Utara luas baku daerah rawa adalah sebesar 1.012.005 Ha yang letaknya tersebar di kawasan Pantai Timur dan Pantai Barat.

### 3. *Debit*

Beberapa sungai utama di Propinsi Sumatera Utara memiliki debit air rata-rata yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumon, Sungai Silau, Sungai Asahan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air irigasi dan bahan baku air bersih dan air minum untuk keperluan rumah tangga dan industri. Namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bahaya banjir dimusim penghujan, akibat mulai terdegradasinya lahan pada daerah hulu.

Selain itu terdapat badan air yaitu danau dengan debit air cukup besar yang potensial bagi sistem pengairan dan memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi. Badan air berupa danau kecil yaitu Danau Siais dan Danau Marsabut di Kabupaten Tapanuli Selatan, Danau Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo dan yang terbesar yaitu Danau Toba yang terletak di dataran tinggi di wilayah tengah meliputi 7 (tujuh) kabupaten dengan luas sekitar 110.260 ha.

## 2.1.1.6 **Klimatologi**

### 1. *Tipe*

Iklim di Sumatera Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Sebagaimana Provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

### 2. *Curah hujan*

Curah hujan relatif cukup tinggi yaitu berkisar 1.431 - 2.265 mm per tahun atau rata-rata 2.100 mm per-tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata sebesar 173 - 230 hari per tahun. Pada wilayah kering, curah hujan tahunan rata-rata kurang dari 1.500 mm yang tercatat di beberapa bagian wilayah Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara, sedang curah hujan tinggi berkisar antara 2.000 sampai 4.500 mm berlangsung sepanjang tahun di daerah Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu, Langkat, Nias, Tapanuli Tengah, dan sebagian besar Tapanuli Selatan. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada Juni sampai September dan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai Maret.

### 3. *Suhu*

Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai 35,80°C, sebagian daerah berbukit dengan

kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai 13,40° C.

#### 4. Kelembaban

Kelembaban udara rata-rata 78%-91%.

### 2.1.1.7 Penggunaan Lahan

#### 1. Kawasan Lindung

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 3.055.795,00 ha atau 42,63 % dari luas Provinsi Sumatera Utara (7.168.068,00 ha). Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan dimaksud terdiri dari :

- ✓ Fungsi hutan dalam kawasan lindung (1.633.889,00 ha), terbagi atas :
  - a. Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA)/Taman Buru(TB) : 427.008,00 Ha
  - b. Hutan Lindung (HL) : 1.206.881,00 Ha
- ✓ Fungsi hutan dalam kawasan budidaya (1.421.905,00 ha) :
  - a. Hutan Produksi Terbatas (HPT) : 641.769,00 Ha
  - b. Hutan Produksi Tetap (HP) : 704.452,00 Ha
  - c. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) : 75.684,00 Ha

Di Provinsi Sumatera utara yang termasuk dalam kawasan hutan lindung adalah kawasan berada pada ketinggian 2.000 meter d.p.l. dengan kelerengan lebih besar dari sekitar 45 %, mempunyai skor lebih dari 175 menurut SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980, mempunyai jenis tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan nilai 5 (regosol, litosol, organosol dan rezina) dan kelas lereng lebih besar dari 15 %, memiliki curah hujan tinggi dan mampu meresapkan air ke dalam tanah, termasuk di dalamnya kawasan tanah gambut dengan ketebalan 3 m yang terdapat dibagian hulu sungai/rawa dan yang ditetapkan sebagai hutan lindung. Kawasan ini mencakup juga lahan gambut di Kabupaten Langkat, Humbang Hasundutan, Asahan, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan Nias).

#### 2. Kawasan Budidaya

Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian yang teridentifikasi hingga Tahun 2012 seluas 380.201 Ha. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, yaitu meliputi areal seluas lebih kurang 57% dari luas areal pertanian Sumatera Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu seluas ± 69% dari luas hutan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, sedangkan wilayah Pantai Barat didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan secara relatif seimbang.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 26.360 km<sup>2</sup> atau 36,8% dari luas wilayah Sumatera Utara merupakan wilayah yang subur, suhu udara tinggi, kelembaban udara tinggi, dan curah hujan juga relatif tinggi, meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Kota Binjai, Medan, dan Tebing Tinggi. Wilayah Pantai Barat meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Nias, Nias Selatan dan Kota Sibolga. Kegiatan di wilayah Pantai Timur umumnya heterogen, dengan kawasan perkotaan yang relatif besar dan prasarana wilayah yang memadai. Wilayah ini sesuai untuk pengembangan berbagai jenis kegiatan budidaya, terutama perkebunan dan tanaman pangan.

Potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Potensi Pertanian Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan yang sebagian besar telah dipasarkan dengan baik dan sudah di ekspor keluar negeri maupun provinsi lain. Komoditi bidang pertanian pada dataran tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara, seperti jagung, kentang, kopi, ikan mas, sapi, bawang merah sangat berpotensi untuk dikembangkan. Untuk perkebunan, luas areal perkebunan rakyat sampai tahun 2015 sekitar 1,13 juta hektar, dengan total produksi sebesar ± 6,53 juta ton dengan komoditi kelapa sawit, karet, kopi, kakao, kelapa dan komoditi lainnya.

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi kelautan dan perikanan, dengan luas laut 110.000 Km<sup>2</sup> dan panjang pantai 1.300 Km meliputi Pantai Timur (WPP 571) sepanjang 545 Km dan Pantai Barat, Nias, Pulau-Pulau Batu (WPP572) sepanjang 755 Km. Potensi perikanan tangkap sebesar 841.200 ton/tahun terdiri dari potensi perikanan tangkap di WPP 571 Selat Malaka (Pantai Timur) sebanyak 276.00 ton/tahun dan WPP 572 Samudera Hindia (Pantai Barat) sebanyak 565.200 ton/tahun serta penangkapan di perairan umum sebesar 155.797 hektar. Potensi perikanan budidaya terdiri dari Budidaya laut seluas 100.000 hektar, budidaya air tawar seluas 18.647,5 hektar dan air payau seluas 20.000 ha.

Pariwisata di Sumatera Utara sangat beragam, dari wisata alam. Wisata budaya dan wisata minat khusus. Danau Toba, Kawasan Ekosistem Gunung Leuser Brastagi, pantai-pantai di Pulau Nias adalah beberapa destinasi wisata alam yang dibanggakan di Sumatera Utara. Selain itu wisata budaya di Sumatera Utara juga tidak kalah menarik antara lain, Istana Maimun, Peninggalan Megalit di Pulau Nias, Komplek Makam Raja Batak dan masih banyak lagi. Wisata minat khusus juga menjadi potensi pariwisata di Sumatera Utara yaitu, Arung Jeram Sei Asahan, Taman Iman di Dairi, Paralayang di Sitopsi, dan lain-lain.

### **2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah**

Wilayah Sumatera Utara berpotensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik geografis dan sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah. Pengembangan potensi kewilayahan tersebut dilakukan berdasarkan kawasan sesuai dengan regulasi perencanaan, yaitu melalui penetapan kawasan-kawasan strategis provinsi serta mendorong perwujudan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis kabupaten/kota.

Koridor pembangunan kewilayahan dikembangkan dengan mengacu pada sistem wilayah atau sistem kota-kota di Sumatera Utara yang diwujudkan dalam penetapan pusat-pusat kegiatan wilayah dan mendorong terwujudnya pusat-pusat kegiatan nasional dan pusat-pusat kegiatan lokal saling terkoneksi.

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis provinsi berfungsi: (a) untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; (b) sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi; dan (c) sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis provinsi di Provinsi Sumatera ditetapkan berdasarkan kepentingan: (a) pertumbuhan ekonomi; (b) sosial dan budaya; dan (c) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- A. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan, meliputi sentra produksi;**
    1. Merek, Kabupaten Karo;
    2. Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
    3. Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
    4. Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
    5. Harian, Kabupaten Samosir;
    6. Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
    7. Sitinjo, Kabupaten Dairi;
    8. Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
    9. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar
  
  - B. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan meliputi:**
    1. Kawasan Tanjungbalai – Asahan;
    2. Kawasan Simalungun – Batubara; dengan fokus Kawasan Pengembangan Industri Berbasis Aluminium dan Diversifikasi Aluminium yang terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan didukung oleh Global Hubungan Internasional Kuala Tanjung ;
    3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangkei khusus pengembangan cluster sawit dan cluster karet;
  
  - C. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya.**
  
  - D. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya meliputi :**
    1. Kawasan Labuan Angin – Sibolga;
    2. Kawasan Mandailing Natal – Tapanuli Selatan; dan
    3. Kawasan Perkotaan Padangsidimpuan dan sekitarnya.
    4. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias.
- Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
- A. Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro, meliputi:**
    1. Situs dan peninggalan bersejarah Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang;
    2. Bangunan bersejarah di Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan;
    3. Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
  
  - B. Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara;**
  
  - C. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;**

- D. Kawasan religi dan situs bersejarah Islam di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
- E. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit Kabupaten Samosir

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- A. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok;
- B. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru; dan
- C. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

Di tingkat nasional, beberapa wilayah/kawasan di Sumatera Utara juga ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, yaitu:

- A. Dari sudut kepentingan pertahanan keamanan, yaitu Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai di Kawasan Perbatasan laut RI dengan Malaysia;
- B. Dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro);
- C. Dari sudut kepentingan lingkungan, yaitu Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Pada tahun 2011, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, Dan Karo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Mebidangro. Serta Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera. Pada Tahun 2014 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya sesuai ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pada prosesnya hingga saat ini, telah mulai inisiasi untuk pengembangan koridor antar kawasan, yaitu Belawan-Kuala Namu- Kuala Tanjung serta pengembangan konsep *aerotropolis* di kawasan Bandara Kuala Kuala Namu yang terintegrasi dengan sektor ekonomi pertanian unggulan serta pengembangan kawasan *Agrotechnopark* dan kawasan sosial religi terpadu di sekitar bandara Kuala Namu.

### 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

#### 1. Kawasan Rawan Massa Gerakan Tanah/Tanah Longsor

Bencana longsor disertai dengan banjir bandang sudah sering terjadi di Sumatera Utara antara lain longsor dan banjir bandang Sibolangit (Deli Serdang, 22 November 1994), Dolok - Saipar Dolok Hole di DAS Bilah (Tapanuli Selatan -

Labuhan Batu, Mei 1995), Perbaungan - Lubuk Pakam (Deli Serdang, Januari 2002), Nias (31 Juli 2001 dan 2 Januari 2003), Bahorok (Langkat, 2 Nopember 2003). Berbagai longsor dan banjir bandang dalam ukuran kecil juga telah sering terjadi di berbagai lokasi di Sumatera Utara sebagai contoh Berastagi yang berada di pegunungan di Karo beberapa waktu yang lalu dilanda banjir bandang.

Kawasan ini terletak pada sebagian besar wilayah Sumatera Utara di sekitar Bukit Barisan membujur arah Utara - Selatan pada dasarnya potensial terhadap gerakan tanah, rayapan, longsor, gelombang pasang dan banjir bandang.

Termasuk dalam kawasan ini Kabupaten Tapanuli Utara pada Kecamatan Muara, Sipoholon, Dolok Sanggul, Lintong Nihuta, Baki, Raja, Siborong-borong, Pagaran, Onan Ganjang, Tarutung, Adian Koting, Pahae Julu, Pahae Jae; Kabupaten Samosir pada Kecamatan Simanindo, Pangururan, Sianjur Mula-Mula, Harian Boho, Palipi, Onan Runggu, Kabupaten Toba Samosir pada Kecamatan Laguboti, Porsea, Habinsaran; Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kecamatan Barus, Kolang, Tapian Nauli, Lumut, Sibabangun; Kabupaten Mandailing Natal pada Kecamatan Siabu, Panyabungan, Batang Natal, Kotanopan; Kabupaten Pakpak Bharat pada Kecamatan Sitelu Taliutang Jahe, Sitelu Taliutang Julu, Taliutang Salak, Taliutang PGGs, Kerajaan; Kabupaten Dairi pada Kecamatan Tigalingga, Siempat Nempu, Silima Pungga-Pungga, Pegagan, Sumbul, Sidikalang, Parbuluan; Kabupaten Simalungun pada Kecamatan Dolok Silau, Silimakuta, Dolok Pardamean, Sidamanik, Dolok Panribuan, Girsang Sipangan Bolon; Kabupaten Deli Serdang pada Kecamatan Namorambe, STM Hilir, Biru-biru, Sibolangit, STM Hulu, Bangun Purba, Kabupaten Karo pada Kecamatan Mardinding, Kutabuluh, Lau Baleng, Tiga Binanga, Simpang Empat, Kabanjahe, Barusjahe, Merek; Kabupaten Langkat pada Kecamatan Padang Tualang, Bahorok, Salopian, Kwala, Sei Bingai; Termasuk Pulau Nias bagian Selatan dan bagian Tengah yaitu: Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias pada Kecamatan Hiliduho; Kabupaten Nias Barat pada Kecamatan Mandrehe serta Kota Gunung Sitoli pada Kecamatan Gunung Sitoli.

## *2. Kawasan Rawan zona Patahan Aktif*

Posisi wilayah Sumatera Utara terhadap Pulau Sumatera yang terletak diantara Lempeng Asia dan Lempeng Australia mengakibatkan terdapatnya kawasan rawan pada zona tumbukan lempeng di wilayah pantai barat, wilayah daratan Sumatera Utara, dan wilayah pantai Kepulauan Nias.

## *3. Kawasan Rawan Gelombang Pasang Air Laut, Abrasi dan Tsunami; Gelombang Pasang; Rawan Abrasi*

Tsunami adalah gelombang pasang yang disebabkan oleh gempa bumi atau longsor di lereng dasar laut. Gelombang pasang semacam ini bisa melanda daerah pantai sampai puluhan meter tingginya dan ratusan meter jauhnya dari pantai, sehingga menyapu dan merusak segala apa yang ada di pantai dan di daratan, seperti yang terjadi di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004. Tsunami yang menerjang pantai barat Aceh dan Sumatera Utara terjadi 20 menit sampai 5 jam setelah gempa tektonik. Kecepatan gelombang tsunaminya rata-rata 50-100 kilometer per jam. Di pusat gempa, kecepatan tsunami Aceh secara teoretis dapat dihitung, yaitu antara 400 - 800 kilometer per jam. Daerah rawan tsunami tersebar di Pantai Barat pada elevasi kurang dari 5 meter, meliputi wilayah pantai timur, pantai barat dan wilayah pantai Kepulauan Nias.

## *4. Kawasan Rawan Banjir/Banjir Bandang*

Peristiwa banjir merupakan bencana alam yang juga sering terjadi di wilayah Sumatera Utara yang beriklim tropis, terutama pada wilayah dengan kemiringan

lereng landai atau dataran. Beberapa peristiwa banjir yang terjadi di Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Peristiwa banjir (dan juga tanah longsor) yang terbesar selama 3 tahun terakhir di Indonesia terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Leuseur (TNGL) yang terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.
- Di daerah Bohorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara pada November 2003 terjadi banjir bandang yang berasal dari bagian hulu DAS Bohorok yang menyebabkan 92 orang tewas dan 154 orang hilang.
- Bencana banjir di beberapa wilayah pada Bulan Desember 2012, meliputi Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Kepulauan Nias.

Termasuk dalam kawasan ini yaitu Kabupaten Simalungun pada Kecamatan Silau Kahean, Raya Kahean, Bandar, Pematang Bandar, Dolok Batunanggar, Tapian Dolok, Siantar, Bosar Maligas, Ujung Padang, Hutabayu Raja, Tanah Jawa; Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kecamatan Manduamas, Barus, Sorkam, Kolang, Tapian Nauli, Sibolga, Lumut, Sibabangun; Kabupaten Mandailing Natal pada Kecamatan Natal, Muara Batang Gadis, Batahan; Kabupaten Langkat pada Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat, Babalan, Besitang, Tanjungpura, Gebang, Secanggih, Hinai, Stabat, Padangtualang, Bahorok.; Kabupaten Labuhan Batu pada Kecamatan Panai Hilir, Panai Tengah, Pangkatan, Bilah Hilir; Kabupaten Labuhan Batu Utara pada Kecamatan Kualuh Hilir; Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada Kecamatan Kampung Rakyat dan Kota Pinang; Kabupaten Deli Serdang pada Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Tua, Pancur Batu, Namorambe, Kutalimbaru, Biru-biru, Pantai Labu, Batang Kuis, Beringin, Lubuk Pakam; Kabupaten Serdang Bedagai pada Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah, Sei Bamban dan Kecamatan Tebing Tinggi.

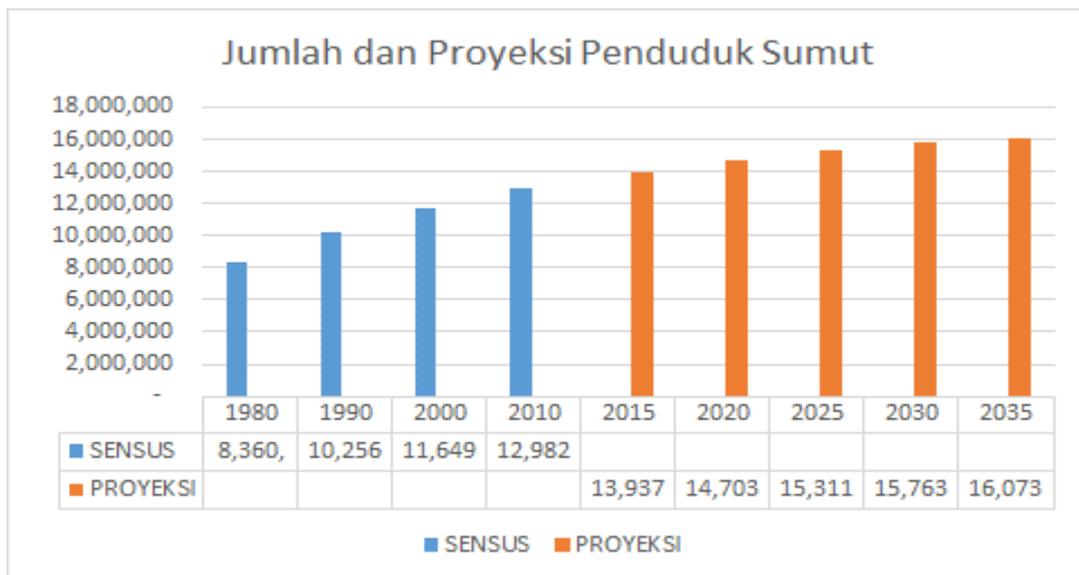
Termasuk juga pada Kabupaten Nias pada Kecamatan Idano Gawo, Gido; Kabupaten Nias Utara pada Kecamatan Tuhemberua, Lahewa, Alasa; Kabupaten Nias Barat pada Kecamatan Mandrehe, Sirombu, Kabupaten Nias Selatan pada Kecamatan Lolowau, Amandraya, Teluk Dalam, Lahusa; Kota Gunung Sitoli pada Kecamatan Gunungsitoli.

5. *Kawasan Rawan Angin Puting Beliung berada di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Mandailing Natal.*
6. *Kawasan Rawan Kebakaran hutan meliputi kawasan sepanjang kawasan Danau Toba.*
7. *Kawasan rawan letusan gunung berapi yang terdapat pada :*
  - a. **Tipe A**, yaitu Gunung Sorik Merapi di Mandailing Natal dan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo yang pernah tercatat meletus paling tidak sekali sejak tahun 1600 yaitu pada Tahun 2010 sampai 2015 masih aktif mengeluarkan abu vulkanik.
  - b. **Tipe B**, yaitu gunung api aktif yang tercatat tidak pernah meletus sejak tahun 1600. Sumatera Utara memiliki empat gunung api jenis ini, yaitu Gunung Sibayak di Kabupaten Karo; Gunung Pusuk Buhit di Kabupaten Toba Samosir; dan Gunung Sibual-buali di Kabupaten Tapanuli Selatan.
  - c. **Tipe C**, yaitu gunung yang tidak pernah tercatat meletus. Namun melihat tanda-tanda di sekitar gunung itu, diyakini gunung itu adalah gunung api, yaitu Gunung Dolok Martimbang/Namoralangit/Hela toba di Kabupaten Tapanuli Utara.

#### 2.1.4 Demografi

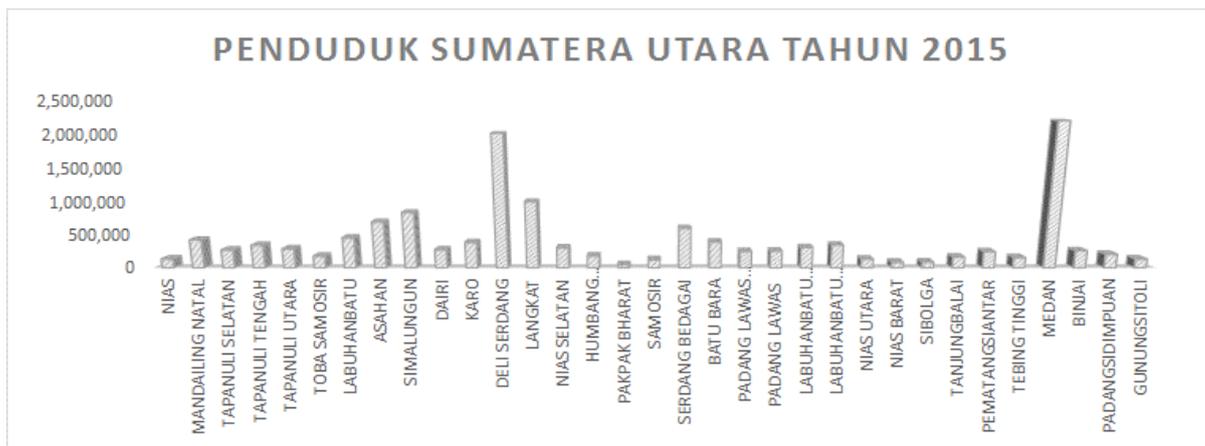
Berdasarkan hasil pendataan Penduduk Tahun 2015, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara mencapai 13.937.797 orang, yang terdiri atas 6.954.552 laki-laki dan 6.983.245 perempuan, dengan kepadatan rata-rata 186 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Sekitar 51,83 % penduduk bertempat tinggal di pedesaan dan 49,17 % bertempat tinggal di daerah perkotaan, angka ini jauh berbeda dengan kondisi tahun 2014 dimana penduduk yang tinggal di Desa mencapai 50,74% dan di perkotaan sebesar 49,26%, dan diperkirakan bahwa pada tahun 2017 jumlah penduduk perkotaan akan sedikit lebih banyak dari pedesaan.

Jumlah penduduk Sumatera Utara merupakan terbesar keempat di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah atau terbesar di luar Pulau Jawa. Terdiri dari berbagai suku, yaitu suku asli yang terdiri dari 8 suku yakni Suku Melayu Deli di Pesisir Timur, terutama di kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Langkat, Suku Batak Karo berada di Kabupaten Karo, Suku Batak Toba di wilayah Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Suku Batak Pesisir berada di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Suku Batak Mandailing/Angkola di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Mandailing Natal, Suku Batak Simalungun umumnya di Kabupaten Simalungun, Suku Batak Pakpak berada di Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat dan Suku Nias di Kepulauan Nias. Selain itu terdapat suku pendatang yakni Suku Minangkabau : Kota Medan, Pesisir barat, Suku Aceh umumnya di Kota Medan, Suku Jawa di Pesisir Timur & Barat dan etnis Tionghoa umumnya di wilayah perkotaan pesisir Timur & Barat.



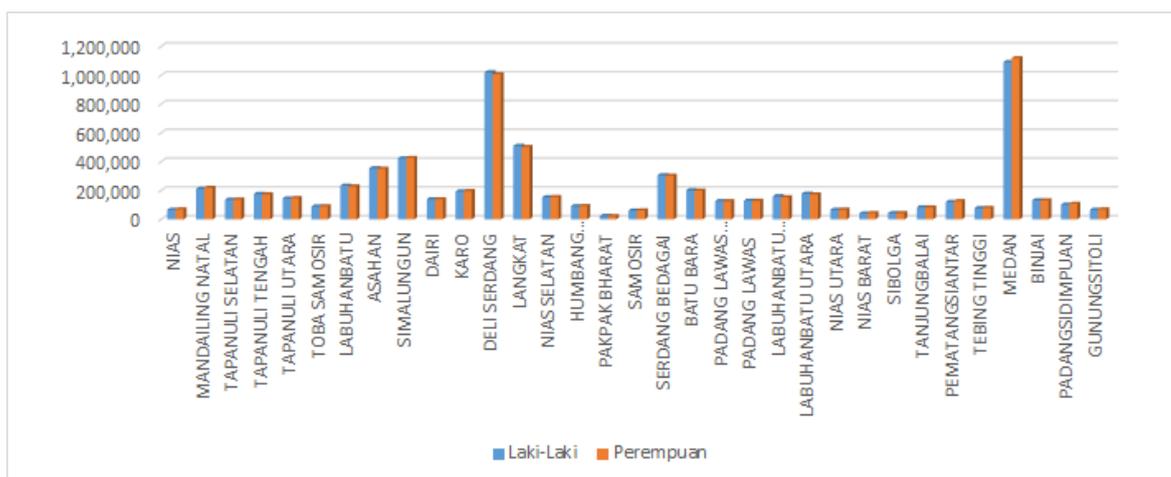
**Grafik 2.1**  
**Grafik Kondisi dan Estimasi Jumlah Penduduk Sumatera Utara**  
**Periode Tahun 1980 - 2035**

Dalam kurun waktu 30 tahun (1980-2010) jumlah penduduk Sumatera Utara meningkat 4,6 juta dan diproyeksikan meningkat sebanyak 3,09 juta dalam kurun waktu 25 tahun kedepan. Peningkatan jumlah penduduk ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan daerah termasuk dalam menjamin ketersediaan pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial dasar lainnya.



Sumber : BPS Sumut, 2016

**Grafik 2.2.**  
**Grafik Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015**



Sumber : BPS Sumut, 2016

**Grafik 2.3.**  
**Grafik Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2015**

Rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 99,59, yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex ratio terbesar terdapat di Kabupaten Pakpak Barat yakni sebesar 102,16 dan yang terkecil terdapat di Kabupaten Nias Barat yakni sebesar 91,65.

#### 2.1.4.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Dari data Proyeksi Penduduk Tahun 2025, laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara tahun 2015 sebesar 1,20 persen dan pada periode 2000-2010 mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,22%, merupakan laju pertumbuhan penduduk terendah di Sumatera, atau posisi ke-5 laju pertumbuhan penduduk terendah secara nasional (dibawah laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah (0,37%), Jawa Timur (0,76%), Kalimantan Barat (0,91%), dan D.I Jogjakarta (1,02%).

**Tabel 2.5.**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Per Provinsi di Indonesia**  
**2000, 2005, 2010, 2015, 2020 dan 2025**

Propinsi	2000	2005	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3.929,3	4.037,9	4.112,2	4.166,3	4.196,5	4.196,3
SUMATERA UTARA	11.642,6	12.452,8	13.217,6	13.923,6	14.549,6	15.059,3
SUMATERA BARAT	4.248,5	4.402,1	4.535,3	4.693,4	4.785,4	4.846,0
RIAU	4.948,0	6.108,4	7.469,4	8.997,7	10.692,8	12.571,3
JAMBI	2.407,2	2.657,3	2.911,7	3.164,8	3.409,0	3.636,8
SUMATERA SELATAN	6.210,8	6.755,9	7.306,3	7.840,1	8.369,6	8.875,8
BENGKULU	1.455,5	1.617,4	1.784,5	1.955,4	2.125,8	2.291,6
LAMPUNG	6.730,8	7.291,3	7.843,0	8.377,4	8.881,0	9.330,0
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	900,0	971,5	1.044,7	1.116,4	1.183,0	1.240,0
DKI JAKARTA	8.361,0	8.699,6	8.981,2	9.168,5	9.262,6	9.259,9
JAWA BARAT	35.724,0	39.066,7	42.555,3	46.073,8	49.512,1	52.740,8
JAWA TENGAH	31.223,0	31.887,2	32.451,6	32.882,7	33.138,9	33.152,8
DI YOGYAKARTA	3.121,1	3.280,2	3.439,0	3.580,3	3.694,7	3.776,5
JAWA TIMUR	34.766,0	35.550,4	36.269,5	36.840,4	37.183,0	37.194,5
BANTEN	8.098,1	9.309,0	10.661,1	12.140,0	13.717,6	15.343,5
BALI	3.150,0	3.378,5	3.596,7	3.792,6	3.967,7	4.122,1
NUSA TENGGARA BARAT	4.008,6	4.355,5	4.701,1	5.040,8	5.367,7	5.671,6
NUSA TENGGARA TIMUR	3.823,1	4.127,3	4.417,6	4.694,9	4.957,6	5.194,8
KALIMANTAN BARAT	4.016,2	4.394,3	4.771,5	5.142,5	5.493,6	5.809,1
KALIMANTAN TENGAH	1.855,6	2.137,9	2.439,9	2.757,2	3.085,8	3.414,4
KALIMANTAN SELATAN	2.984,0	3.240,1	3.503,3	3.767,8	4.023,9	4.288,0
KALIMANTAN TIMUR	2.451,9	2.810,9	3.191,0	3.587,9	3.995,6	4.400,4
SULAWESI UTARA	2.000,9	2.141,9	2.277,2	2.402,8	2.517,2	2.615,5
SULAWESI TENGAH	2.176,0	2.404,0	2.640,5	2.884,2	3.131,2	3.372,2
SULAWESI SELATAN	8.050,8	8.493,7	8.926,6	9.339,9	9.715,1	10.023,6
SULAWESI TENGGARA	1.820,3	2.085,9	2.363,9	2.653,0	2.949,6	3.246,5
GORONTALO	833,5	872,2	906,9	937,5	962,4	979,4
MALUKU	1.166,3	1.266,2	1.369,4	1.478,3	1.589,7	1.698,8
MALUKU UTARA	815,1	890,2	969,5	1.052,7	1.135,5	1.215,2
PAPUA	2.213,8	2.518,4	2.819,9	3.119,5	3.410,8	3.682,5

Sumber : Data Statistik, BPS

#### 2.1.4.2 Sebaran Penduduk

Secara geografis, penyebaran penduduk terbesar masih terkonsentrasi pada wilayah Pantai Timur, yaitu dimana pada wilayah tersebut terdapat sejumlah kabupaten yang berpenghuni terbesar (di atas 5 % dari seluruh penduduk provinsi) dan berkepadatan tertinggi (di atas 200 jiwa/km<sup>2</sup>), seperti : Labuhan Batu, Asahan, Deli Serdang, Langkat dan Serdang Bedagai. Pada wilayah timur ini juga terdapat sejumlah besar kota besar dengan distribusi dan kepadatan penduduk terbesar yaitu Kota Medan, Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai dan Padang Sidempuan.

Dari hasil Sensus Penduduk 2010 terlihat bahwa penyebaran penduduk Sumatera Utara menurut kabupaten/kota rata-rata dibawah 5 persen, dan hanya lima kabupaten/kota yang persebarannya diatas 5 persen.

Secara umum kepadatan bruto di Provinsi Sumatera Utara masih rendah karena sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan yang tidak terbangun, yaitu kawasan hutan dan perkebunan. Kecuali pada kota-kota yang ada di Sumatera Utara, kepadatannya relatif sedang sebagai kawasan perkotaan. Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat adalah tiga kabupaten/kota dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 2.210.624 orang (15,86%), 2.029.308 orang (14,56%), dan 1.013.385 orang (7,27%). Sedangkan Kabupaten Pakpak Bharat merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit yang berjumlah 45.516 orang (0,33 persen). Dengan luas wilayah Provinsi Sumatera Utara sekitar 72.981,23 kilometer persegi yang didiami oleh 13,937.797,401 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 184 orang per kilo meter persegi.

Menurut hasil pendataan penduduk terakhir tahun 2015, Kabupaten/kota yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Medan yakni sebanyak 8.341 orang per kilo meter persegi, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Pakpak Bharat yakni sebanyak 37,36 orang per kilo meter persegi. Kota kedua dengan kepadatan tertinggi adalah Kota Tebing Tinggi sebesar 4.445 per kilometer persegi. Dengan kemampuan daya dukung

lahan Kota Tebing Tinggi yang terbatas sementara penduduk terus bertambah, Kota Tebing Tinggi perlu mengendalikan pertumbuhan penduduknya.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Distribusi Penduduk**  
**Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015**

No.	Kabupaten/Kota	JUMLAH PENDUDUK		Distribusi Penduduk	
		Jumlah	Kepadatan	Laki-Laki	Perempuan
1	NIAS	136,115	73.87	66,295	69,820
2	MANDAILING NATAL	430,894	70.25	211,506	219,388
3	TAPANULI SELATAN	275,098	45.62	136,683	138,415
4	TAPANULI TENGAH	350,017	159.97	175,690	174,327
5	TAPANULI UTARA	293,399	77.38	145,105	148,294
6	TOBA SAMOSIR	179,704	77.16	89,211	90,493
7	LABUHAN BATU	462,191	214.37	233,485	228,706
8	ASAHAN	706,283	190.77	354,706	351,577
9	SIMALUNGUN	849,405	194.42	423,202	426,203
10	DAIRI	279,090	144.77	139,401	139,689
11	KARO	389,591	183.16	193,397	196,194
12	DELI SERDANG	2,029,308	905.26	1,021,189	1,008,119
13	LANGKAT	1,013,385	161.83	510,288	503,097
14	NIAS SELATAN	308,281	168.90	153,097	155,184
15	HUMBANG HASUNDUTAN	182,991	78.36	90,790	92,201
16	PAKPAK BHARAT	45,516	37.36	23,001	22,515
17	SAMOSIR	123,789	59.83	61,406	62,383
18	SERDANG BEDAGAI	608,691	320.33	305,513	303,178
19	BATUBARA	400,803	434.62	201,697	199,106
20	PADANG LAWAS UTARA	252,589	64.47	126,793	125,796
21	PADANG LAWAS	258,003	66.28	129,289	128,714
22	LABUHAN BATU SELATAN	313,884	87.29	160,080	153,804
23	LABUHAN BATU UTARA	351,097	98.32	177,283	173,814
24	NIAS UTARA	133,897	111.32	66,306	67,591
25	NIAS BARAT	84,917	179.25	40,609	44,308
26	SIBOLGA	86,519	2,094.38	43,394	43,125
27	TANJUNG BALAI	167,012	1,548.85	84,197	82,815
28	PEMATANG SIANTAR	247,411	4,445.04	120,597	126,814
29	TEBING TINGGI	156,815	5,058.55	77,509	79,306
30	MEDAN	2,210,624	8,341.98	1,091,937	1,118,687
31	BINJAI	264,687	4,471.82	132,197	132,490
32	PADANGSIDIMPUAN	209,796	1,829.72	102,184	107,612
33	GUNUNG SITOLI	135,995	484.35	66,515	69,480
	<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>13,937,797</b>	<b>190.98</b>	<b>6,954,552</b>	<b>6,983,245</b>

Kedekatan terhadap Kota Medan dan berkedudukan di wilayah timur menjadikan suatu kabupaten memiliki penduduk perkotaan yang semakin besar, seperti kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai berpenduduk perkotaan yang dominan, diikuti Kabupaten Asahan, Batu Bara, Simalungun, Karo dan Langkat. Sebaliknya kabupaten-kabupaten yang jauh dari Medan memiliki penduduk yang sangat didominasi penduduk perdesaan, seperti Kabupaten Nias Selatan, Nias, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Selatan.

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat berdasarkan fokus kesejahteraan antara lain dapat dilihat dari angka nilai PDRB, kontribusi PDRB, pertumbuhan PDRB, Inflasi, PDRB perkapita, disparitas pendapatan masyarakat dan persentase penduduk yang berada diatas garis kemiskinan. Secara umum dapat diungkapkan sebagai berikut:

#### 2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun terakhir, terlihat semakin mengalami fluktuatif dengan trend penurunan, pertumbuhan ekonomi tertinggi yang dicapai Sumatera Utara terjadi pada tahun 2011 dimana laju pertumbuhannya mencapai 6,66 persen, akan tetapi setelah tahun 2011 terjadi trend penurunan dan puncaknya di tahun

2015 dengan laju pertumbuhan dibawah angka psikologis 6 persen tepatnya di angka 5,10 persen, adapun penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 ini, sebagai dampak pelemahan perekonomian dunia dimana Nasional juga turun dan di bawah capaian Sumatera Utara pada angka 4,79 persen, selain pengaruh global juga sebagai dampak dari berbagai persoalan internal yang masih belum teratasi seperti kondisi infrastruktur baik darat, laut maupun udara dan juga proses perizinan dan ketersediaan ketenagalistrikan dan gas yang menjadi salah satu faktor pendorong tumbuhnya minat investor untuk menanamkan modalnya.

**Tabel 2.7**  
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional  
Tahun 2010-2015

wilayah	Pertumbuhan Ekonomi						rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)	
Sumatera Utara	6.38	6.66	6.45	6.08	5.23	5.1	5.98
Nasional	6.22	6.49	6.23	5.78	5.02	4.79	5.76

\*) Kumlatif s/d Triwulan IV 2015

Sumber : BPS (Data Diolah)



Sumber : BPS Sumatera Utara (Data Diolah)

\*) Kumulatif sd Trw IV

**Grafik. 2.4**  
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2015  
Dibandingkan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dari tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, secara rata-rata per lima tahunan juga lebih baik dimana Sumatera Utara dalam kurun waktu enam tahun rata-rata tumbuh 5,98 persen dan nasional hanya 5,76 persen. Secara umum kondisi enam tahunan Sumatera Utara tahun 2010-2015 Sumatera Utara terjadi penurunan angka pertumbuhan dimana angka psikologis 6 persenan tidak dapat diraih kembali, kondisi ini hamper sama dengan capaian nasional hanya bertengger di angka 5 persenan.

Jika melihat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara lima tahun terakhir berdasarkan ADHK Tahun 2010-2014 dari sisi produksi dengan tahun dasar dan metode perhitungan baru, terlihat kondisi pada **Tabel 2.8** sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara per sektoral ADHK 2010**  
**dari Sisi produksi Tahun 2011-2015 (persen)**

No	Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.88	5.31	4.71	4.37	5.60
2	B	Pertambangan dan Penggalian	10.72	11.95	26.03	5.33	3.58
3	C	Industri Pengolahan	3.22	5.64	4.84	2.97	5.01
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	13.87	-3.03	-3.88	3.71	2.13
5	E	Pengadaan Air	6.30	5.13	5.68	6.04	4.34
6	F	Konstruksi	8.46	6.67	7.66	6.79	5.56
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.13	7.91	5.57	6.94	4.24
8	H	Transportasi dan Pergudangan	10.24	8.25	7.41	5.71	6.26
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.52	6.75	7.81	6.48	6.18
10	J	Informasi dan Komunikasi	9.96	8.79	7.78	7.23	8.10
11	K	Jasa Keuangan	8.71	10.09	9.99	2.84	7.75
12	L	Real Estate	9.66	6.96	6.94	6.59	6.10
13	M,N	Jasa Perusahaan	10.68	6.04	6.68	6.76	5.01
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.93	2.53	3.34	6.92	7.04
15	P	Jasa Pendidikan	4.79	4.94	8.34	6.37	8.14
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16.00	10.58	10.82	7.00	8.85
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	9.00	7.83	7.45	7.04	5.61
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>			<b>6.66</b>	<b>6.45</b>	<b>6.08</b>	<b>5.23</b>	<b>5.10</b>

\*) Triwulan IV

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (Data Diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Sumut Tahun 2015 (Triwulan IV) adalah sebesar 5,10 persen, lebih rendah dari capaian tahun 2014 yang berhasil mencapai 5,23 persen. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan produktifitas gerak ekonomi Provinsi Sumatera Utara, yang dapat berimbas pada penurunan Pendapatan Daerah.

Jika dilihat pada kondisi perekonomian daerah Sumatera Utara tahun 2015 pertumbuhan kategorial tertinggi diperoleh dari lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,85 persen disusul oleh lapangan usaha administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan jaminan social wajib sebesar 8,14 persen, adapun pemberi laju pertumbuhan terendah adalah lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 2,13 persen disusul oleh Lapangan Usaha Perambangan dan Penggalian dengan laju pertumbuhan sebesar 3,58 persen. Dari kondisi di atas dapat diperoleh gambaran bahwa beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan meningkat akan tetapi terdapat beberapa yang mengalami pertumbuhan sedikit menurun, ada indikasi awal bahwa penurunan ini dapat berimbas dari pasokan energy yang belum optimal terpenuhi di Sumatera Utara seperti pasokan listrik dan gas.

#### 2.2.1.2 Struktur PDRB

Adapun terkait dengan kontribusi sektoral/lapangan usaha PDRB Sumatera Utara akan disajikan dalam bentuk PDRB atas Dasar Harga Berlaku dari periode Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 (triwulan IV) dapat dilihat pada **Tabel 2.9** sebagai berikut :

**Tabel 2.9**  
**Struktur PDRB Sumatera Utara**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2015**

No	Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,42	24,92	24,54	23,27	22,01
2	B	Pertambangan dan Penggalian	1,07	1,16	1,40	1,32	1,35
3	C	Industri Pengolahan	21,20	20,66	19,86	19,97	20,21
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10
5	E	Pengadaan Air	0,09	0,10	0,09	0,10	0,10
6	F	Konstruksi	11,81	12,33	12,83	13,31	13,61
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Perbaikan Mobil dan Sepeda Motor	17,05	17,00	16,68	17,17	17,43
8	H	Transportasi dan Pergudangan	4,40	4,57	4,90	4,97	4,99
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,09	2,18	2,26	2,35	2,41
10	J	Informasi dan Komunikasi	2,15	2,15	2,04	1,97	1,95
11	K	Jasa Keuangan	2,97	3,23	3,35	3,27	3,35
12	L	Real Estate	4,05	3,92	4,28	4,37	4,50
13	M,N	Jasa Perusahaan	0,84	0,87	0,90	0,93	0,96
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,45	3,55	3,50	3,61	3,71
15	P	Jasa Pendidikan	1,94	1,90	1,88	1,90	1,87
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	0,84	0,86	0,88	0,93
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	0,47	0,47	0,50	0,52	0,53
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)  
 \*) Kumulatif sd Trw IV

Dari data **Tabel 2.9** di atas terlihat bahwa peringkat pertama penyumbang PDRB Sumatera Utara adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 22,01 persen (Triwulan IV 2015), dan hal ini jauh menurun bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 yang menyumbang sebesar 23,18 persen. Demikian pula dengan Industri pengolahan menempati urutan kedua dalam hal kontribusi PDRB Sumatera Utara dimana tahun 2015 pada triwulan IV kembali Industri pengolahan memberikan sumbangan di angka psikologis 20,21 persen, naik bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 yang hanya memberikan sumbangan sebesar 19,90 persen, peringkat ketiga juga mengalami penambahan angka kontribusi yakni lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan perbaikan Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi sebesar 17,43 persen, meningkat bila dibandingkan tahun 2014 yang hanya memberikan sumbangan sebesar 17,17 persen.

Sementara lapangan usaha lainnya yang mengalami penurunan sumbangan antara lain di lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang turun dari 23,27 persen di tahun 2014 menjadi hanya 22,01 persen di tahun 2015. Demikian pula dengan informasi dan komunikasi dari 1,97 persen di tahun 2014 menjadi hanya 1,95 persen di tahun 2015, dapat dilihat pada **Tabel 2.10** berikut ini:

**Tabel 2.10**  
**Struktur PDRB Sumatera Utara**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011-2015**

No	Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,65	25,38	25,05	24,85	24,97
2	B	Pertambangan dan Penggalian	1,05	1,10	1,31	1,31	1,32
3	C	Industri Pengolahan	20,62	20,46	20,23	19,79	19,50
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	0,16	0,15	0,13	0,13	0,12
5	E	Pengadaan Air	0,10	0,09	0,09	0,09	0,10
6	F	Konstruksi	11,87	11,90	12,07	12,25	12,30
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Perbaikan Mobil dan Sepeda Motor	17,16	17,39	17,31	17,59	17,47
8	H	Transportasi dan Pergudangan	4,40	4,48	4,53	4,55	4,57
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,13	2,14	2,17	2,20	2,24
10	J	Informasi dan Komunikasi	2,32	2,38	2,41	2,46	2,51
11	K	Jasa Keuangan	2,98	3,08	3,18	3,10	3,17
12	L	Real Estate	3,98	4,00	4,03	4,08	4,11
13	M,N	Jasa Perusahaan	0,85	0,85	0,85	0,86	0,87
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,46	3,33	3,25	3,30	3,32
15	P	Jasa Pendidikan	1,99	1,96	2,00	2,02	2,02
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,85	0,89	0,91	0,92
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	0,47	0,47	0,48	0,49	0,49
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Sama seperti struktur PDRB ADHB, maka untuk PDRB ADHK hampir sama struktur ADHB, yakni sumbangan terbesar diperoleh dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan sumbangan sebesar 24,97 persen pada tahun 2015, meningkat dari tahun 2014 yang hanya sebesar 24,85 persen, disusul oleh lapangan usaha industry pengolahan yang mengalami penurunan dari 19,79 persen pada tahun 2014 menjadi 19,50 persen pada tahun 2015.

### 2.2.1.3 Nilai PDRB

Sebagai Provinsi terbesar di luar pulau Jawa, ditilik dari besaran jumlah penduduk dan jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota, maka secara umum besaran PDRB Sumatera Utara belumlah menunjukkan angka yang terbesar di Indonesia, masih merupakan peringkat 7, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.11**  
**Nilai PDRB Provinsi Se-Indonesia Tahun 2010-2014**  
**Atas Dasar Harga Berlaku**

Provinsi	[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah)				
	Harga Berlaku				
	2010	2011	2012	2013	2014
ACEH	101,545.24	108,217.63	114,552.08	121,970.99	130,448.24
SUMATERA UTARA	331,085.24	377,037.10	417,120.44	470,221.98	523,771.57
SUMATERA BARAT	105,017.74	118,674.29	131,435.65	146,885.11	167,039.89
RIAU	388,578.23	485,649.34	558,492.72	607,498.59	679,692.18
JAMBI	90,618.41	103,522.91	115,070.40	132,019.49	153,857.14
SUMATERA SELATAN	194,012.97	226,666.93	253,265.12	281,996.53	308,406.84
BENGKULU	28,352.57	32,199.71	36,207.68	40,460.43	45,235.08
LAMPUNG	150,560.84	170,046.79	187,348.82	204,402.79	231,008.43
KEP. BANGKA BELITUNG	35,561.90	40,849.04	45,400.23	50,393.91	56,389.85
KEP. RIAU	111,223.67	126,914.20	144,840.79	163,112.15	182,915.53
DKI JAKARTA	1,075,183.48	1,224,218.48	1,369,432.64	1,547,037.78	1,761,407.06
JAWA BARAT	906,685.76	1,021,628.60	1,128,245.68	1,258,914.48	1,385,959.44
JAWA TENGAH	623,224.62	692,561.63	754,529.44	832,953.58	925,662.69
DI YOGYAKARTA	64,678.97	71,369.96	77,247.86	84,924.66	93,449.86
JAWA TIMUR	990,648.84	1,120,577.16	1,248,767.29	1,382,434.85	1,540,696.53
BANTEN	271,465.28	306,174.29	338,224.93	380,172.81	432,763.96
BALI	93,749.35	104,612.19	117,987.40	134,399.05	156,448.28
NUSA TENGGARA BARAT	70,122.73	68,176.69	69,022.23	73,605.03	82,246.57
NUSA TENGGARA TIMUR	43,846.61	48,815.24	54,893.15	61,325.47	68,602.63
KALIMANTAN BARAT	86,065.85	96,727.13	106,958.80	118,623.26	131,933.45
KALIMANTAN TENGAH	56,531.02	65,871.41	73,425.38	81,905.90	89,871.73
KALIMANTAN SELATAN	85,305.00	98,780.55	106,725.43	115,876.46	131,592.89
KALIMANTAN TIMUR	418,211.58	515,191.48	550,735.76	518,734.86	519,929.94
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	52,574.85	59,080.46
SULAWESI UTARA	51,721.33	57,343.60	63,875.31	71,079.03	80,622.83
SULAWESI TENGAH	51,752.07	60,716.29	69,637.92	79,820.38	90,255.67
SULAWESI SELATAN	171,740.74	198,289.08	228,285.47	258,682.96	300,124.22
SULAWESI TENGGARA	48,401.15	55,758.55	64,693.98	71,041.29	78,620.39
GORONTALO	15,475.74	17,406.53	19,669.72	22,128.08	25,201.10
SULAWESI BARAT	17,183.83	20,189.34	22,626.21	25,249.50	29,391.51
MALUKU	18,428.58	21,367.86	24,661.75	27,834.46	31,733.34
MALUKU UTARA	14,983.91	17,078.14	19,340.46	21,439.62	24,053.50
PAPUA BARAT	41,361.67	44,254.64	47,421.09	53,014.21	58,285.09
PAPUA	110,808.18	108,188.76	112,812.56	119,771.98	123,179.72
INDONESIA	6,864,133.13	7,825,075.53	8,672,954.41	9,612,506.50	10,699,877.63

Sumber : BPS RI

Dari tabel di atas diperoleh hasil bahwa kedudukan Provinsi Sumatera Utara dalam konstelasi sumbangan PDB adalah pada peringkat 7, sementara untuk tingkat regional Pulau Sumatera menduduki peringkat dua, sementara untuk Provinsi di luar Pulau Jawa menduduki peringkat ketiga setelah Riau dan Kalimantan Timur.

Adapun untuk kondisi Provinsi Sumatera Utara Nilai Nominal PDRB Sumatera Utara dengan metode perhitungan SNA 2008 dan tahun dasar 2010 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.12**  
**Nilai PDRB Sumatera Utara Tahun 2011-2015**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. miliar )**

No	Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
			Agregat	Agregat	Agregat	Agregat	Agregat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	95,856.86	103,933.11	115,190.25	121,443.44	125,808.1
2	B	Pertambangan dan Penggalian	4,048.82	4,848.02	6,581.44	6,899.06	7,732.9
3	C	Industri Pengolahan	79,947.92	86,171.93	93,241.47	104,224.00	115,560.0
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	643.05	641.93	597.74	598.06	575.3
5	E	Pengadaan Air	355.93	399.03	441.82	501.06	572.3
6	F	Konstruksi	44,527.25	51,426.26	60,232.62	69,460.77	77,802.0
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	64,308.76	70,891.92	78,324.82	89,597.00	99,646.1
8	H	Transportasi dan Pergudangan	16,580.08	19,056.20	22,990.25	25,923.44	28,501.2
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,874.97	9,100.94	10,598.78	12,283.32	13,761.2
10	J	Informasi dan Komunikasi	8,103.35	8,957.70	9,594.39	10,287.35	11,124.3
11	K	Jasa Keuangan	11,195.20	13,479.43	15,738.02	17,057.99	19,145.0
12	L	Real Estate	15,290.90	16,358.72	20,078.79	22,786.42	25,712.6
13	M,N	Jasa Perusahaan	3,181.13	3,646.33	4,224.04	4,836.42	5,472.3
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	12,990.36	14,786.94	16,427.96	18,832.08	21,234.5
15	P	Jasa Pendidikan	7,318.57	7,938.01	8,848.51	9,930.06	10,713.8
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,044.54	3,519.33	4,020.16	4,604.43	5,328.8
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	1,769.39	1,964.64	2,332.95	2,690.05	3,031.8
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			377,037.08	417,120.44	469,464.01	521,964.95	571,722.01

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Dari tabel di atas diperoleh informasi bahwa pertumbuhan PDRB ADHB Sumatera Utara dari tahun 2011 ke tahun 2015 meningkat sebesar 51,64 persen, atau secara rata-rata sebesar 10,33 persen/tahun.

**Tabel 2.13.**  
**Nilai PDRB Sumatera Utara Tahun 2011-2015**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Rp. miliar )**

No	Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
			Agregat	Agregat	Agregat	Agregat	Agregat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	90,592.55	95,405.42	99,894.57	104,283.11	110,123.24
2	B	Pertambangan dan Penggalian	3,693.99	4,135.26	5,211.65	5,479.37	5,829.94
3	C	Industri Pengolahan	72,815.22	76,922.41	80,648.62	83,042.09	85,968.40
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	570.71	553.40	531.40	548.43	541.31
5	E	Pengadaan Air	336.49	353.75	373.84	396.43	421.96
6	F	Konstruksi	41,921.90	44,718.29	48,144.38	51,411.36	54,248.91
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	60,589.06	65,384.61	69,025.21	73,817.64	77,037.55
8	H	Transportasi dan Pergudangan	15,545.80	16,827.86	18,075.25	19,107.06	20,155.59
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,527.50	8,035.64	8,663.61	9,225.42	9,866.78
10	J	Informasi dan Komunikasi	8,209.20	8,930.58	9,625.11	10,321.29	11,055.36
11	K	Jasa Keuangan	10,519.43	11,581.05	12,691.89	13,024.10	13,957.95
12	L	Real Estate	14,052.16	15,030.05	16,072.86	17,132.22	18,119.23
13	M,N	Jasa Perusahaan	3,001.22	3,182.59	3,395.10	3,624.70	3,836.94
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	12,213.77	12,522.71	12,940.56	13,836.00	14,642.06
15	P	Jasa Pendidikan	7,011.17	7,357.22	7,970.45	8,478.26	8,904.74
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,900.54	3,207.55	3,554.52	3,803.27	4,066.72
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	1,646.89	1,775.77	1,908.14	2,042.55	2,179.19
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			353,147.60	375,924.16	398,727.16	419,573.30	440,955.9

Dari tabel di atas diperoleh hasil analisa bahwa pertumbuhan PDRB ADHK dengan Tahun Dasar 2010 dari periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar 24,96 atau rata-rata per tahun sebesar 4,97 persen.

#### 2.2.1.4 Laju Inflasi

Tingkat inflasi di Sumatera Utara secara umum juga kondisinya lebih baik dari nasional, akan tetapi pada tahun 2015 kondisi inflasi Sumatera Utara lebih baik dari capaian nasional, dimana inflasi di Sumatera Utara mencapai 3,24%.

Secara Makro Rata-Rata Inflasi Sumatera Utara selama periode 2011-2015 sebesar 5,82% berada diatas rata-rata Inflasi Nasional pada periode yang sama sebesar 5,65% (nasional lbih baik). Ada pun perkembangan nilai inflasi Sumatera Utara dibandingkan dengan tingkat nasional disajikan dalam **Tabel** sebagai berikut :

**Tabel 2.14**  
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2011-2015 Provinsi Sumatera Utara

INFLASI	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
INDONESIA	3,79	4,36	8,38	8,36	3,35
SUMATERA UTARA	3,67	3,86	10,18	8,17	3,24

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

#### 2.2.1.5 PDRB per Kapita

**Tabel 2.15**  
PDRB Perkapita Tahun 2011-2015 Provinsi Sumatera Utara

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai PDRB (milyar Rp)	377,037.08	417,120.44	469,464.01	521,954.95	571,722.01
Jumlah Penduduk (Jiwa)	13,103,596.00	13,408,202	13,590,250	13,766,851	13,937,797.00
PDRB perkapita (Rp.juta/jiwa)	28.77	31.11	34.54	37.91	41.02
Konversi PDRB/Kapita (US\$)	2,877.00	3,315.00	3,301.00	3,195.00	3,066.00

Sumber : BPS (Data Diolah): Bank Indonesia (Data Diolah)

Kondisi pendapatan per kapita masyarakat Sumatera Utara tahun ke tahun menunjukkan perbaikan, hal ini tentunya merupakan pertanda terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dapat dilihat dari tahun 2011 PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.28,77 Juta dan pada tahun 2015 menjadi Rp. 41,02 Juta. Tetapi jika dikonversikan ke dalam Dollar Amerika mengalami penurunan dari US \$ 3.315 di tahun 2012 menjadi US \$ 3.066 pada tahun 2015. Hal ini terjadi dikarenakan melemahnya harga tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika.

#### 2.2.1.6 Disparitas Pendapatan Masyarakat

Ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah suatu proses alamiah yang terjadi dalam tahapan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat terjadi karena perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja, terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu sehingga mengurangi pemerataan modal, serta alokasi dana pembangunan antar wilayah.

1) *Tipologi Klassen*

Berdasarkan hasil pemetaan Tipologi Klassen yang mengklasifikasikan daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita ke dalam 4 kuadran, diketahui bahwa selama periode tahun 2010-2014 pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan adanya perpindahan antar kuadran. Posisi 33 Kabupaten/Kota selama periode tahun 2009-2014 dapat dilihat dalam **Tabel** berikut ini :

**Tabel. 2.16**  
**Tipologi Klassen 33 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2010-2014**

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
1	Sibolga	4	4	4	4	2
2	Tapanuli Tengah	4	4	1	1	4
3	Tapanuli Utara	4	4	4	1	4
4	Toba Samosir	4	4	4	4	4
5	Samosir	4	4	4	1	1
6	Humbang Hasundutan	4	4	4	1	1
7	Nias	1	1	1	1	1
8	Nias Selatan	4	4	4	4	4
9	Gunung Sitoli	1	4	1	1	1
10	Nias Utara	1	1	4	1	1
11	Nias Barat	4	1	4	4	4
12	Padangsidempuan	4	4	1	1	4
13	Mandaling Natal	4	4	1	1	1
14	Tapanuli Selatan	4	4	4	4	4
15	Padang Lawas	4	4	1	1	1
16	Padang Lawas utara	1	1	1	1	1
17	Labuhan Batu	4	4	4	4	3
18	Asahan	4	4	4	4	1
19	Simalungun	4	4	4	4	1
20	Dairi	4	4	4	4	4
21	Karo	4	4	1	4	4
22	Deli Serdang	3	3	3	2	1
23	Langkat	4	4	4	4	4
24	Pakpak Barat	1	4	4	4	1
25	Serdang Bedagai	4	4	4	4	4
26	Batu Bara	3	3	3	3	3
27	Labuhan Batu Utara	3	3	2	2	2
28	Labuhan Batu Selatan	3	3	2	2	2
29	Tanjung Balai	4	4	4	4	1
30	Pematang Siantar	4	4	4	4	2
31	Tebing Tinggi	4	1	1	1	1
32	Medan	2	2	2	3	2
33	Binjai	4	4	1	1	1

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Posisi suatu Kabupaten/Kota dalam Tipologi Klassen ini, selain bergantung dari kinerja pembangunan Kabupaten/Kota itu sendiri juga bergantung dari kinerja pembangunan Kabupaten/Kota lainnya. Suatu kabupaten/kota bisa saja memiliki pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, namun belum tentu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tersebut melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita keseluruhan Kabupaten/Kota di wilayah yang menjadi acuan.

## 2) Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Tingkat ketimpangan pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Utara berdasarkan Indeks Gini (Gini Ratio) selama kurun waktu lima tahun terakhir disajikan pada **Tabel** dibawah ini :

**Tabel 2.17**  
**Tabel Indeks Gini Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014**

TAHUN	INDEKS
2010	0,257
2011	0,253
2012	0,315
2013	0,224
2014	0,348

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel di atas diketahui bahwa kesenjangan pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Utara menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2014 angka Indeks Gini Provinsi Sumatera Utara 0,348, ini berarti bahwa kesenjangan pendapatan perkapita Provinsi Sumatera Utara semakin melebar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

## 3) Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2010-2014 yang dihitung menggunakan Williamson Index menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2014, Williamson Index untuk Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 0,148 dan jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 0,058. Kondisi disparitas pendapatan ini cukup meningkat mengingat angka indeks yang semakin mendekati 1 menunjukkan disparitas yang semakin lebar.

**Tabel 2.18**  
**Ketimpangan Pendapatan Penduduk Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sumatera Utara 2010-2014 menurut Indeks Ketimpangan Williamson**

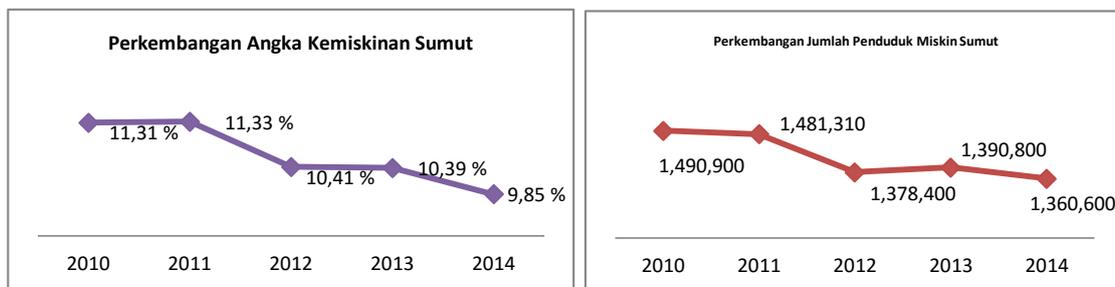
No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
1	Sibolga	0.011	0.014	0.007	0.013	0.098	0.029
2	Tapanuli Tengah	0.101	0.102	0.097	0.104	0.221	0.125
3	Tapanuli Utara	0.052	0.056	0.049	0.059	0.200	0.083
4	Toba Samosir	0.008	0.009	0.006	0.006	0.075	0.021
5	Samosir	0.033	0.035	0.03	0.037	0.104	0.048
6	Humbang Hasundutan	0.037	0.038	0.028	0.037	0.130	0.054
7	Nias	0.059	0.06	0.055	0.059	0.145	0.076
8	Nias Selatan	0.095	0.097	0.093	0.1	0.260	0.129
9	Gunung Sitoli	0.027	0.023	0.018	0.025	0.100	0.039
10	Nias Utara	0.057	0.057	0.053	0.058	0.148	0.075
11	Nias Barat	0.052	0.052	0.05	0.052	0.137	0.069
12	Padangsidempuan	0.059	0.061	0.057	0.065	0.168	0.082
13	Mandaling Natal	0.1	0.102	0.091	0.098	0.225	0.123
14	Tapanuli Selatan	0.062	0.063	0.054	0.063	0.039	0.056
15	Padang Lawas	0.088	0.087	0.084	0.091	0.092	0.088
16	Padang Lawas utara	0.083	0.084	0.08	0.086	0.077	0.082
17	Labuhan Batu	0.024	0.027	0.012	0.032	0.142	0.047
18	Asahan	0.036	0.036	0.012	0.034	0.055	0.035
19	Simalungun	0.101	0.104	0.087	0.103	0.145	0.108
20	Dairi	0.049	0.051	0.04	0.05	0.161	0.070
21	Karo	0.017	0.017	0.002	0.024	0.025	0.017
22	Deli Serdang	0.018	0.015	0.054	0.014	0.086	0.037
23	Langkat	0.044	0.043	0.015	0.041	0.205	0.070
24	Pakpak Barat	0.034	0.035	0.032	0.035	0.088	0.045
25	Serdang Bedagai	0.049	0.052	0.032	0.046	0.117	0.059
26	Batu Bara	0.184	0.185	0.221	0.157	0.265	0.202
27	Labuhan Batu Utara	0.004	0.002	0.02	0.004	0.097	0.025
28	Labuhan Batu Selatan	0.01	0.008	0.025	0.004	0.207	0.051
29	Tanjung Balai	0.004	0.009	0.002	0.018	0.041	0.015
30	Pematang Siantar	0.022	0.027	0.019	0.036	0.011	0.023
31	Tebing Tinggi	0.027	0.027	0.017	0.025	0.099	0.039
32	Medan	0.352	0.339	0.434	0.341	0.846	0.462
33	Binjai	0.007	0.006	0.014	0.004	0.090	0.024
	Sumatera Utara	0.051	0.051	0.066	0.058	0.148	0.075

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Bila dilihat dari disparitas pendapatan dengan metode indeks williamson pada tahun 2014 terlihat bahwa Kota Medan merupakan Kab/kota yang memiliki disparitas pendapatan paling tinggi yakni 0,846 disusul oleh Kabupaten Batu Bara sebesar 0,265. Adapun Kab/Kota yang memiliki disparitas pendapatan rendah yakni Kota Pematang Siantar sebesar 0,011 dan disusul oleh Kabupaten Karo sebesar 0,025.

### 2.2.1.7 Perkembangan kemiskinan

Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara mengalami trend positif. Pada tahun 2010 angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara mencapai 11,31 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1.490.900 jiwa, 10,41 persen pada tahun 2012 dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2014 mencapai 9,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1.360.600 jiwa.



Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, BPS Provinsi Sumatera Utara

**Grafik 2.5**  
**Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara 2010 - 2015**

### 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

#### 2.2.2.1 Bidang pendidikan

##### 1. Angka Melek Huruf

Perkembangan antar waktu Angka Melek Huruf (AMH) Sumatera Utara dibandingkan capaian Nasional selama periode 4 (empat) tahun terakhir sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 secara umum mengalami tren positif (efektif). Capaian Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010 yang mencapai 97,32 persen, berada di atas capaian Nasional pada tahun yang sama mencapai 92,91 persen. Kondisi ini terus berlangsung hingga tahun 2013, dimana capaian Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Utara mencapai 98,24 persen tetap berada di atas capaian Nasional yang mencapai 96,14 persen.

Perkembangan Angka Melek Huruf di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 - 2013 bila dilihat dari komposisi laki-laki dan perempuan, berada di atas capaian nasional dan didominasi oleh laki-laki dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 98,80 persen sedangkan perempuan mencapai 97,70 persen, sebagaimana **Grafik 2.6** berikut ini :





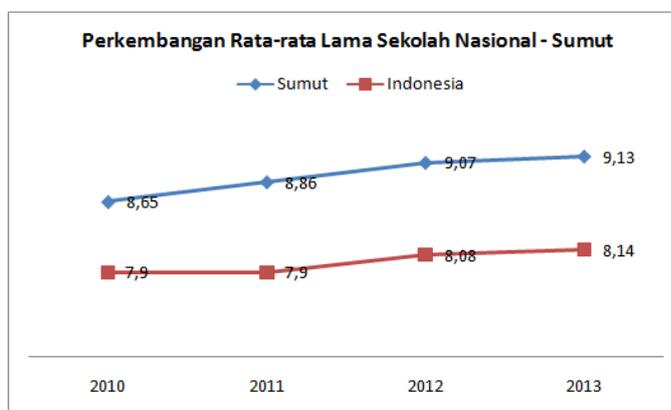
Sumber :

<http://www.bkkbn.go.id/kependudukan/Pages/DataSurvey/Susenas/Pendidikan/AMH/Nasional.aspx>

**Grafik 2.6**  
Grafik Perkembangan Angka Melek Huruf Sumatera Utara

### 2. Angka rata-rata lama sekolah

Capaian Angka Lama Sekolah rata-rata Provinsi Sumatera Utara, mengalami trend positif dengan peningkatan sejak tahun 2008 (8,5 tahun), 2009 (8,6 tahun), 2010 (8,8 tahun), 2011 (8,8 tahun) hingga tahun 2012 telah mencapai 9,1 tahun.



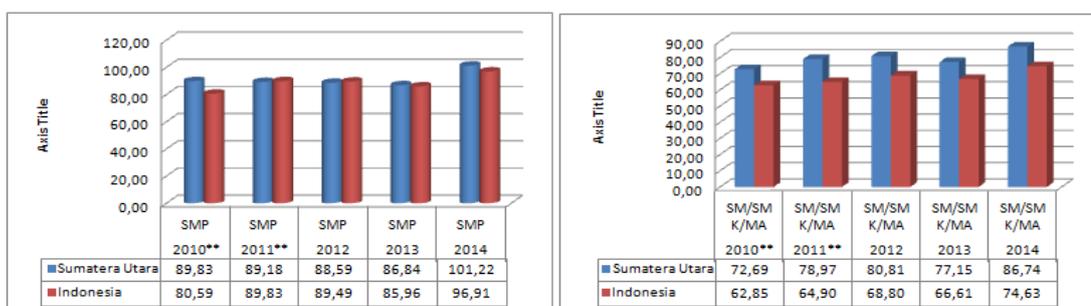
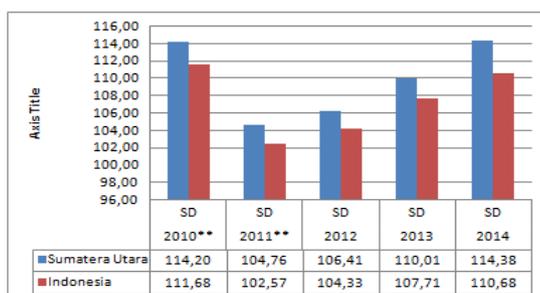
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

**Grafik 2.7.**  
Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah

### 3. Angka Partisipasi Kasar

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sumatera Utara mulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) secara umum mengalami trend positif hal ini dikarenakan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2010 – 2014 terus berada di atas capaian Nasional.

Pada tahun 2010, capaian APK Sekolah Dasar (SD) Provinsi Sumatera Utara sebesar 114,20 persen, berada di atas capaian Nasional pada tahun yang sama sebesar 111,68 persen. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sumut 89,63 persen sedangkan Nasional 80,59 persen, APK SMA Sumut 72,68 persen sedangkan Nasional 62,85 persen. Trend positif ini terus membaik hingga tahun 2014 APK SD Sumut (114,38 persen), SMP (101,22 persen), SMA (86,74 persen), sedangkan capaian Nasional untuk APK SD (110,68 persen), SMP (96,91 persen) dan SMA (74,63 persen), sebagaimana **Grafik 2.8.** berikut ini :



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

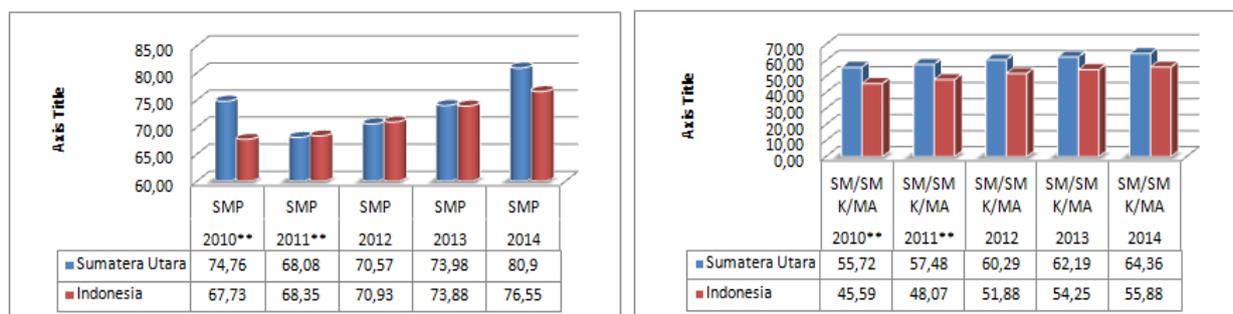
**Grafik. 2.8**  
**Grafik Angka Partisipasi Kasar Provinsi Sumatera Utara**

#### 4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Utara mengalami trend positif dengan peningkatan di seluruh jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMTA). Pada tahun 2010, capaian Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 95,33 persen, SMP (74,76 persen), SMTA (55,72 persen). Pada tahun 2011, APM SD (91,61 persen), SMP (67,05 persen), SMTA (55,34 persen). Hingga pada tahun 2012 APM untuk tingkat SD (93,26 persen), SMP (70,51 persen) dan SMTA (60,02 persen). Secara umum persentase Angka Partisipasi Murni (APM) di seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan, namun masih terlihat adanya penurunan APM untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), hal ini menunjukkan masih kurangnya minat masyarakat Sumatera Utara untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Disamping masih terbatasnya kemampuan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dalam rangka pencapaian sasaran pendidikan di Sumatera Utara yakni Wajib Belajar 12 tahun dan untuk mewujudkan industrialisasi di Provinsi Sumatera Utara

diperlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki pendidikan dan keahlian yang memadai atau minimal tamat Sekolah Lanjutan Menengah Atas (SLTA) khususnya dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

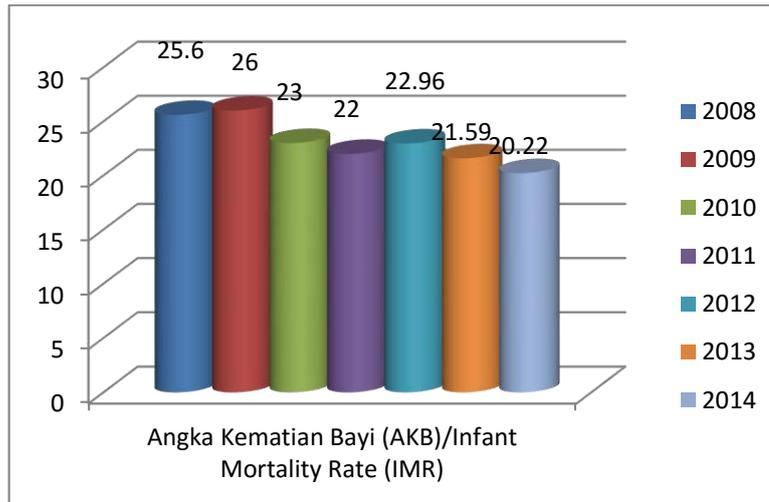
**Grafik 2.9**  
**Grafik Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Utara**

### 2.2.2.2 Bidang Kesehatan

Capain Indikator utama bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

#### 1. Angka Kematian Bayi

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Utara, Indikator Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara per 1.000 kelahiran hidup cenderung mengalami perbaikan dari tahun ketahun. Sejak tahun 2008 dari 25,6 kematian bayi per 1.000 KH telah dapat diturunkan menjadi 20,22 kematian bayi per 1.000 KH, seperti terlihat pada **Grafik 2.10** berikut :



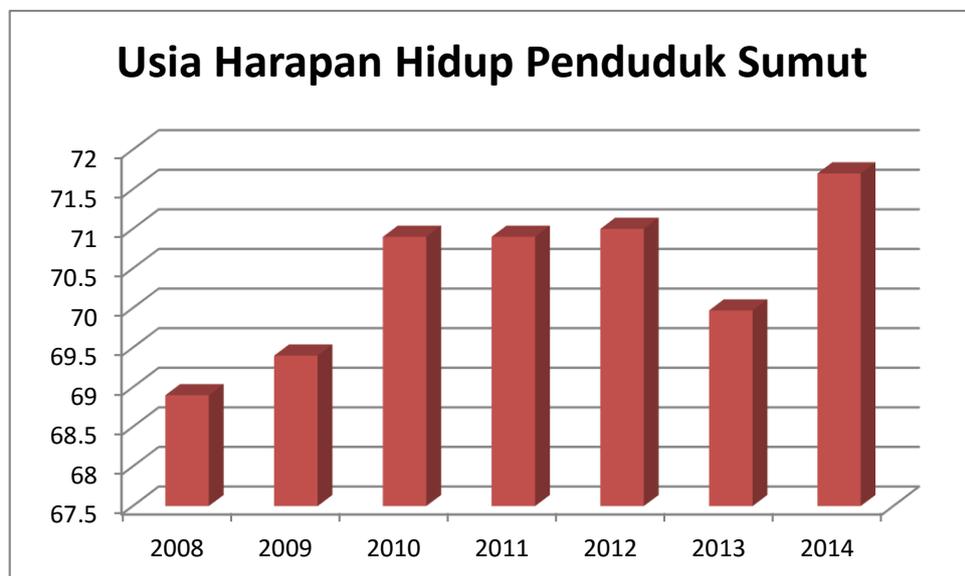
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, data diolah

Grafik 2.10

Grafik Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013  
Jumlah Angka Kematian Bayi

## 2. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup penduduk Sumatera Utara mengalami peningkatan dari 68,9 tahun pada tahun 2008 menjadi 69,65 tahun pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 telah mencapai 69,81 tahun dan pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 71,7 Tahun sebagaimana tertera pada **Grafik 2.10** berikut:



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

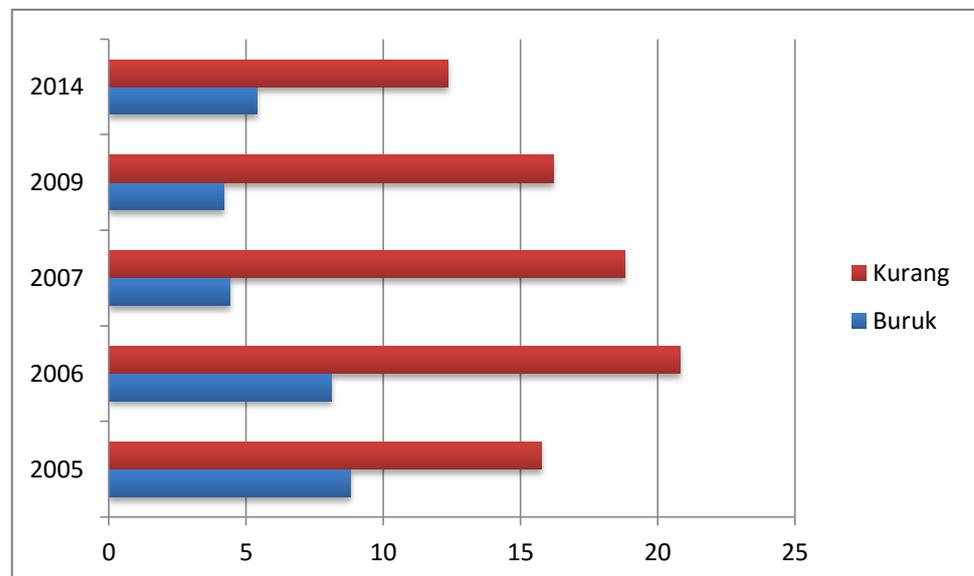
Grafik. 2.11

Grafik Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara 2008-2012

### 3. Persentase Balita Gizi Buruk

Status Gizi Balita merupakan prasyarat dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa karena status gizi anak akan mempengaruhi tingkat kesehatan fisik dan kecerdasan anak yang akhirnya akan mempengaruhi tingkat produktivitas secara ekonomis.

Data Kementerian Kesehatan RI (Riskesmas, 2010), Provinsi Sumatera Utara masih tergolong provinsi dengan angka kekurangan gizi balitanya diatas angka rata-rata nasional yakni 21,4 sementara angka rata-rata nasional 17,9, meskipun secara umum persentase gizi kurang dan buruk di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami penurunan. Meskipun demikian status gizi balita berdasarkan Berat Badan per umur menunjukkan bahwa Prevalensi buruk-kurang (underweight) provinsi Sumatera Utara, jika dibandingkan dengan angka prevalensi buruk-kurang secara nasional maka pada tahun 2013 angka prevalensi buruk-kurang di provinsi Sumatera Utara (22,4 persen yang terdiri dari 8,3 persen gizi buruk dan 14,1 gizi kurang) lebih tinggi 2,8 persen dibandingkan dengan angka prevalensi buruk-kurang nasional (19,6 persen) (Riskesmas 2013)



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Grafik 2.12

Grafik Persentase Gizi Kurang dan Buruk Provinsi Sumatera Utara 2007-2013

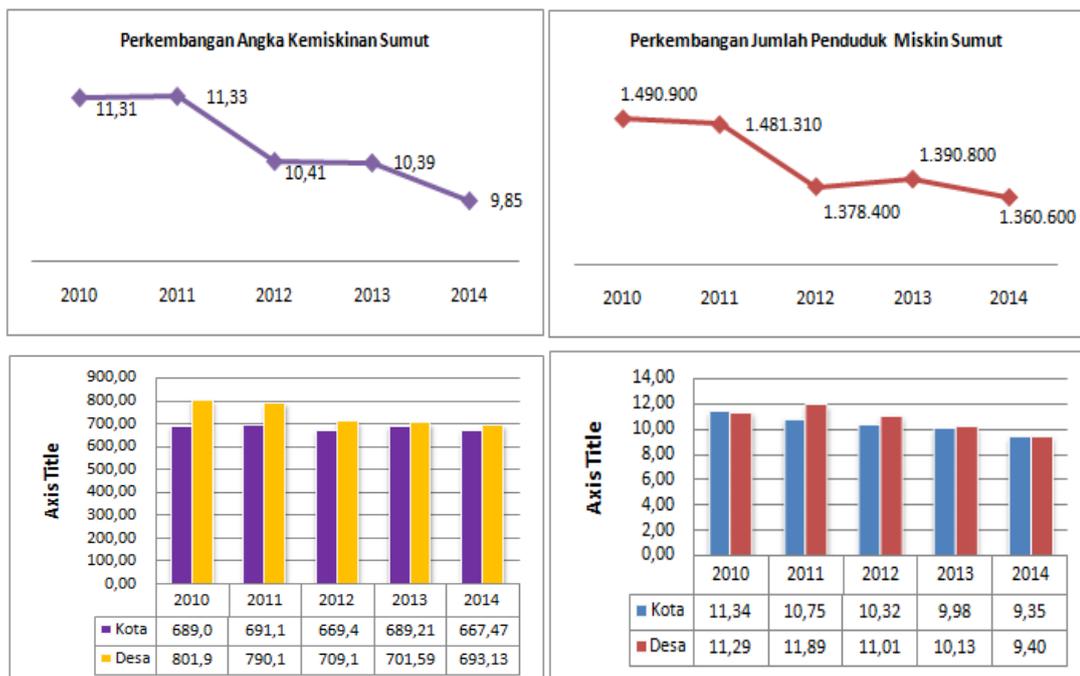
#### 2.2.2.3 Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja

##### 1. Persentase Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sejak tahun 2010 - 2014 mengalami perkembangan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan menurunnya angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Pada tahun 2010, angka kemiskinan di Sumatera Utara mencapai 11,31 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai 1.490.900 orang. Kondisi ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2014, angka kemiskinan Sumatera Utara telah mencapai 9,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1.360.600 orang.

Untuk sebaran penduduk miskin di Sumatera Utara, cenderung terfokus di

wilayah perkotaan. Pada tahun 2010 sebaran penduduk miskin di Sumatera Utara wilayah perkotaan mencapai persentase sebesar 11,34 persen lebih rendah dari wilayah perdesaan sebesar 11,29 persen. Kondisi ini terus mengalami penurunan dengan tetap terfokus pada wilayah perkotaan. Namun pada tahun 2014, terjadi perpindahan fokus kemiskinan di Sumatera Utara, dimana wilayah perdesaan menjadi fokus penduduk miskin dengan capaian sebesar 9,40 persen di atas capaian fokus penduduk miskin wilayah perkotaan sebesar 9,35 persen. Hal ini merupakan bagian percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dimulai dari daerah-daerah kantong kemiskinan di desa-desa.



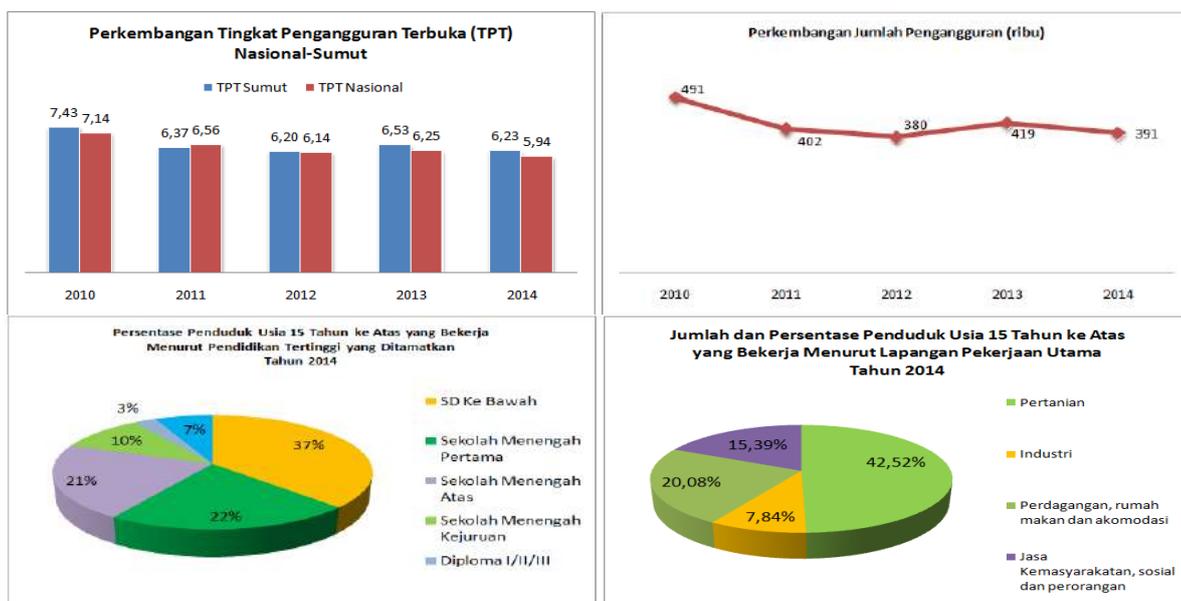
Sumber: Publikasi BPS

**Grafik. 2.13**  
**Grafik Perkembangan Angka dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014**

## 2. Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

sungguh tidak mempunyai pekerjaan) secara umum capaian Sumatera Utara berada di atas Nasional. Sejak tahun 2010 - 2014 Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara terus berada di atas capaian Nasional. Hingga tahun 2014 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara telah mencapai 6,23 persen, berada di atas nasional pada tahun yang sama sebesar 5,94 persen dengan jumlah pengangguran mencapai 391 ribu orang, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2013) yang mencapai 419 pengangguran.

Dominasi pekerjaan bila dilihat dari besaran jumlah penduduk usia 15 tahun yang bekerja pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) mencapai 37 persen, Sekolah Menengah Pertama 22 persen, Sekolah Menengah Atas 21 persen, Sekolah Menengah Kejuruan 10 persen dan Perguruan Tinggi 10 persen dengan fokus pekerjaan pada sektor pertanian yang mencapai 42,52 persen, kemudian disusul oleh sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi (20,08 persen), sektor Jasa 15 persen dan Industri 7 persen.



Sumber: Publikasi BPS

**Grafik 2.14**  
**Grafik Perkembangan Kondisi Ketenaga Kerjaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2014**

### 3. Kriminalitas (Angka kriminalitas yang tertangani)

Kondisi keamanan di Provinsi Sumatera Utara dilihat dari angka kriminalitas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 2. 19**  
**Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012**

Kasus	2012	
	Kejadian	Kejadian
Pembunuhan	152	152
Penganiayaan Berat	3.892	3.892
Penculikan	18	18
Pencurian dengan Kekerasan	1.145	1.145
Pencurian dengan Pemberatan	7.198	7.198
Pencurian Ranmor	7.232	7.232
Pencurian Kawat Telepon	5	5
Pemerksaan	217	217
Pembakaran	142	142
Senpi/Handak	29	29
Pemerasan	619	619
Penyelundupan	15	15
<b>Jumlah</b>	<b>20.659</b>	<b>20.659</b>

Sumber : Polda Sumut, 2014

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pencapaian kinerja pada aspek layanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terdiri dari :

### 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Hasil capaian kinerja layanan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari :

#### 2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Selain jumlah penduduk yang besar, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan adalah 36 relative besarnya disparitas ketersediaan sarana pendidikan. Di satu pihak, di wilayah perkotaan umumnya memiliki sekolah yang berkualitas dengan biaya pendidikan yang relative mahal dan dikelola secara mandiri. Dipihak lain, beberapa daerah masih terfokus pada peningkatan cakupan, atau masih berkutat pada peningkatan kualitas.

Persentase Angka Buta Huruf Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dari tahun 2010 - 2014. Dimana pada tahun 2010 Angka Buta Huruf Sumatera Utara mencapai 2,68 persen, 2011 sebesar 3,17 persen, tahun 2012 mencapai 2,65 persen dan tahun 2013 mencapai 2,19. Hal ini mengindikasikan adanya keberhasilan Sumatera Utara dalam mengentaskan buta aksara di Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 2.20**  
**Capaian Indikator Pendidikan Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2010-2014**

Indikator Kinerja Utama Bidang Pendidikan	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Angka Buta Huruf					
Usia >15 tahun	2,68	3,17	2,65	2,19	-
Usia 15-44 tahun	0,51	1,66	1,11	0,90	-
Usia >45 tahun	7,65	6,85	6,41	5,09	-
Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
Usia <7-12 Tahun)	98,9	98,33	98,59	99,03	-
Usia <13-15 Tahun)	92,26	89,1	90,85	92,11	-
Usia <16-18 Tahun)	66,94	67,54	69,73	71,24	-
Usia <19-24 Tahun)	15,65	16,42	17,36	21,81	-
Angka Partisipasi Kasar (APK)					
SD/MI/Paket A	114,20	104,56	106,26	110,1	114,38
SMP/Mts/Paket B	89,83	89,02	88,55	86,84	101,22
SMA/SMK/MA/Paket C	72,69	79,69	80,58	77,15	86,74
Angka Partisipasi Murni (APM)					
SD/MI/Paket A	95,33	91,46	93,26	95,64	93,59
SMP/Mts/Paket B	74,76	67,96	70,51	73,98	80,9
SMA/SMK/MA/Paket C	55,72	57,83	60,02	62,19	64,36

Sumber : BPS Indonesia

## 1. Angka partisipasi sekolah (APS)

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 - 2013 dari jenjang sekolah SD - DIII/S1 secara umum mengalami trend positif. Dimana pada tahun 2010 Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang Sekolah Dasar (SD) mencapai 98,90 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2013 (99,03 persen). APS tingkat SMP pada tahun 2010 (92,26 persen) mengalami penurunan pada tahun 2013 (92,11 persen). APS jenjang SMA pada tahun 2010 (66,94 persen) mengalami kenaikan pada tahun 2013 (71,24 persen) dan APS DIII/S1 pada tahun 2010 (15,65 persen) mengalami kenaikan pada tahun 2013 (21,81 persen). Namun bila melihat partisipasi melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga ke Perguruan Tinggi (DIII/S1) masih terjadi penurunan yang sangat signifikan. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya keinginan masyarakat di Sumatera Utara untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.



Grafik. 2.15

### Grafik Persentasi Partisipasi Sekolah Provinsi Sumatera Utara

## 2. Ratio Ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas pada berbagai jenjang pendidikan dasar

Tabel 2.21

### Ratio ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas Pada berbagai jenjang pendidikan tahun 2010-2014

NO	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
A.	Jumlah Gedung Sekolah					
1	SD	8,050	10,292	8,172	9432	9483
2	SMP	1,873	2,230	2,040	2357	2388
3	SMA	861	950	869	868	1002
4	SMK	681	834	678	678	919
B.	Jumlah Ruang Kelas					
1	SD	48.005	68,268	61,255	84481	61200
2	SMP	26.997	17,010	17,807	19202	19495
3	SMA	7.745	9,445	9,188	8325	9426
4	SMK	5.777	6,639	6,467	7223	8085
C.	Ratio Kelas/Sekolah					
1	SD	5.96	6.63	7.49	8.95	6,45
2	SMP	14.40	7.62	8.72	8.15	8,16
3	SMA	8.99	9.94	10.57	9.6	9,4
4	SMK	8.48	7.96	9.53	8.72	8,79

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014 (data diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi penambahan jumlah gedung sekolah, ditingkat SMP, SMA dan SMK selama tahun 2010-2014 Pada jenjang sekolah dasar pada tahun 2008 terjadi penggabungan beberapa sekolah dasar karena berkurangnya jumlah murid pada beberapa sekolah.

3. Jumlah Guru dan murid dan Rasio Guru/Murid pada berbagai Jenjang Pendidikan Dasar

**Tabel 2.22**  
**Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar**  
**Tahun 2010-2014 Provinsi Sumatera Utara**

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
<b>1</b>	<b>SD</b>					
1.1.	Jumlah Guru	94.441	102.510	99.927	122.128	112.267
1.2.	Jumlah Murid	1.959.265	1.287.472	1.656.909	1.518.184	1.791.663
1.3.	Rasio	22%	24%	17%	12%	15,96%
<b>2</b>	<b>SMP</b>					
2.1.	Jumlah Guru	59.002	45.951	57.563		51.799
2.2.	Jumlah Murid	428.575	569.581	552.761		650.748
2.3.	Rasio	12	12	10		12,56%
<b>3</b>	<b>SMA</b>					
3.1.	Jumlah Guru	18.335	22.610	22.183	17.504	27.034
3.2.	Jumlah Murid	398.100	222.200	272.042	233.916	323.579
3.3.	Rasio	13	12	12	13%	11%
<b>4</b>	<b>SMK</b>					
4.1.	Jumlah Guru	11.726	16.019	18.374	14.178	24.146
4.2.	Jumlah Murid	300.092	220.074	234.983	228.809	267.406
4.3.	Rasio	20	30	13	16	11%

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2014

Dari data diatas terlihat bahwa terjadi perkembangan yang fluktuatif pada Ratio Siswa/Guru. Angka ratio sudah cukup ideal antara 11-22 orang siswa untuk setiap orang guru. Untuk Ratio Guru/Murid pada jenjang SLTP dan SMA cenderung semakin membaik. Hanya pada jenjang SMK yang mengalami penurunan. Diharapkan dengan ratio jumlah guru/murid yang semakin ideal akan lebih meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.

4. Rasio Pendidikan

Dilihat dari perbandingan jumlah siswa terhadap sekolah, perbandingan siswa terhadap jumlah kelas, perbandingan siswa terhadap jumlah guru, perbandingan jumlah kelas terhadap jumlah sekolah, perbandingan jumlah kelas terhadap guru dan perbandingan jumlah guru terhadap sekolah pada berbagai jenjang pendidikan di Sumatera Utara dapat dilihat pada berikut ini :

**Tabel 2.23**  
**Ratio Jenjang Pendidikan/Rasio Pendidikan**  
**Tahun 2010-2014**

No	Jenjang Pendidikan/ Rasio Pendidikan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	SD					
	Siswa / Sekolah	2.15	1.99	202	161	188,93
	Siswa / Kelas	30	32	27	18	29,27
	Siswa / Guru	18	17	17	12	15,96
	Kelas / Sekolah	7.15	6.19	7.49	9	6,45
	Kelas / Guru	0.61	0.53	0.61	0.69	0,54
	Guru / Sekolah	12	12	12	13	11,84
2	SMP					
	Siswa / Sekolah	3.09	2.48	279	235	272,5
	Siswa / Kelas	36	29	32	29	33,38
	Siswa / Guru	15	13	12	10	12,56
	Kelas / Sekolah	8.59	8.66	8.72	8.15	8,16
	Kelas / Guru	0.41	0.44	0.39	0.33	0,37
	Guru / Sekolah	21	19	22	24	21,69
3	SMA					
	Siswa / Sekolah	0.43	3.08	313	269	322,93
	Siswa / Kelas	35	34	30	35	34,32
	Siswa / Guru	12	11	12	13	11,97
	Kelas / Sekolah	9.69	9.12	10.57	1	9,40
	Kelas / Guru	0.34	0.33	0.41	0.38	0,34
	Guru / Sekolah	28	27	26	20	26,98
4	SMK					
	Siswa / Sekolah	0.57	3.41	346	276	290,97
	Siswa / Kelas	39	35	36	28	33,07
	Siswa / Guru	12	13	13	16	11
	Kelas / Sekolah	9.18	9.78	9.53	9.6	8,79
	Kelas / Guru	0.3	0.37	0.35	0.5	0,33
	Guru / Sekolah	30	26	27	17	26,27

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014

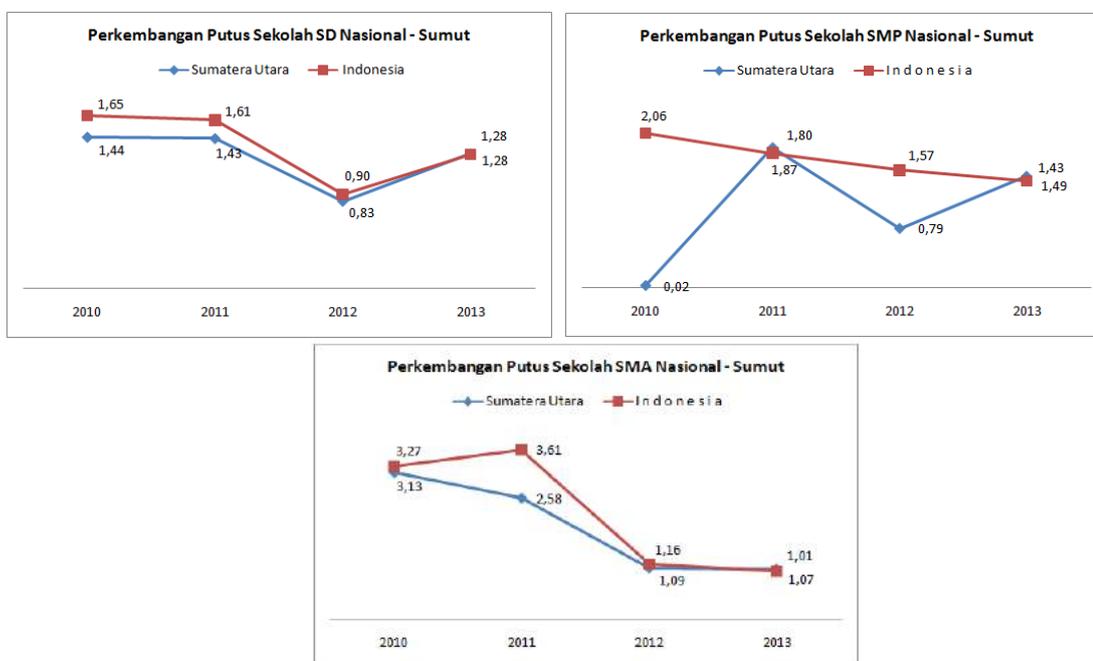
Dari data diatas terlihat bahwa Ratio Siswa/Guru sudah cukup ideal antara 11-20 orang siswa untuk setiap orang guru, namun belum terjadi pemerataan pada semua Kabupaten/Kota. Dengan tercapainya ratio ideal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara.

#### 5. Fasilitas pendidikan

Dari data jumlah sekolah yang ada di Sumatera Utara pada tahun 2011, tercatat jumlah ruang kelas dalam kondisi baik berjumlah 54.986 buah (63.50%), kondisi rusak ringan berjumlah 16.484 (19.04%) dan kondisi rusak berat berjumlah 15.121 (17.46%). Hal ini menuntut adanya penanganan segera agar target indikator pendidikan dapat tercapai.

## 6. Angka Putus Sekolah

Perkembangan Angka Putus Sekolah pada berbagai jenjang pendidikan di Sumatera Utara masih memperlihatkan trend negatif, karena capaian Angka Putus Sekolah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 – 2013 terus berada di atas capaian Nasional, sebagaimana **Grafik 2.16** berikut ini:



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014

**Grafik 2.16**  
Grafik Perkembangan Angka Putus Sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dasar 2010-2013

## 7. Angka Kelulusan

**Tabel 2.24**  
Perkembangan Angka Kelulusan pada berbagai jenjang pendidikan dasar 2010-2014

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013
1	SD	205.289	506.881	237.821	286.681
2	SMP	171.304	172.973	148.873	282.212
3	SMA	91.717	98.199	75.413	117.254
4	SMK	60.513	57.987	40.172	-

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014

Dari tabel diatas terlihat peningkatan jumlah kelulusan siswa pada berbagai tingkatan, selama tahun 2010-2014, hal ini menunjukkan adanya peningkatan prestasi peserta didik dalam menjalani pendidikannya disekolah. Hal ini perlu terus ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang.

**Tabel 2.25**  
**Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi**

No	Jenjang Pendidikan Guru Sekolah	Tahun									
		2010		2011		2012		2013		2014	
		S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2	S-1	S-2
1	SD	204.06	65	22.446	71	40.605	192	55.764	447	71.369	703
2	SMP	21.825	148	24.007	162	36.170	358	34.141	912	32.824	1.001
3	SMA	15.290	364	16.819	400	22.183	736	17.881	1.396		
4	SMK	10.013	90	11.014	99	15.531	739	11.063	399		
	Jumlah	251.134	667	74.286	732	114.489	2.025	118.849	3.154		

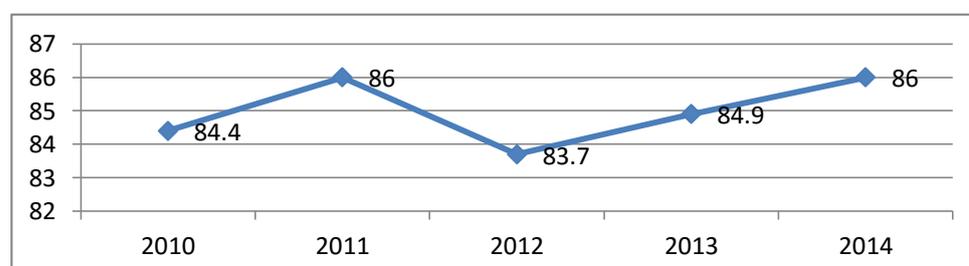
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2014

Pemerintah provinsi Sumatera Utara secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas guru melalui program sertifikasi dan pemberian beasiswa untuk peningkatan jenjang pendidikan guru dari S0 ke S1 dan dari S1 ke jenjang S2. Dari data diatas terlihat peningkatan jumlah yang cukup signifikan sehingga dalam lima tahun terakhir (2009-2013) terjadi peningkatan kualifikasi guru berpendidikan S2.

### 2.3.1.2 Kesehatan

Pencapaian kinerja Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2014 dapat digambarkan dari capaian indikator kinerja yang ditetapkan didalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 sebagai berikut:

1. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan



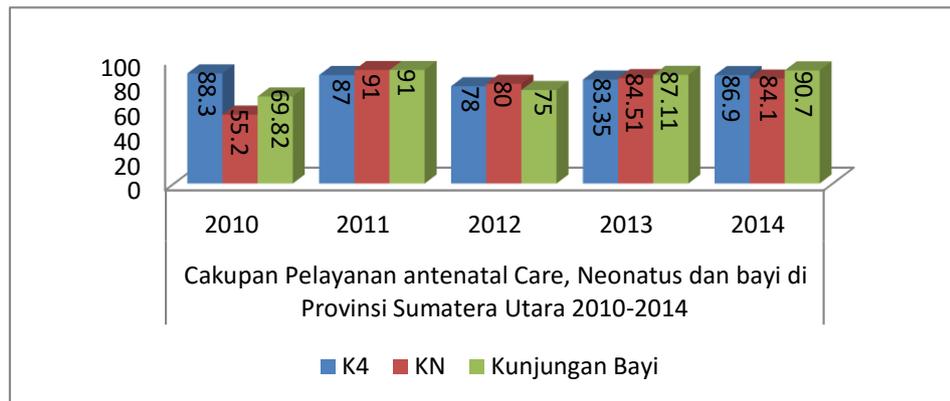
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2010-2014

**Grafik 2.17**  
**Grafik Persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan Tahun 2010-2014**

Cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan selama kurun waktu 2010-2014 menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2010, cakupan indikator ini mencapai 84,4 persen dan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat dari 84.9% pada tahun 2013 menjadi 86% pada tahun 2014. Diharapkan pada Tahun 2015 dapat dicapai menjadi 87%.

## 2. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 dan kunjungan bayi

Kunjungan antenatal care (K4) di Provinsi Sumatera Utara meningkat dari 78% pada tahun 2012 menjadi 84.10% pada tahun 2014, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan (90%). Cakupan kunjungan neonatus lengkap (KN3) dan kunjungan bayi masing-masing sebesar 86.90% dan 90%, mencapai target yang telah ditetapkan.



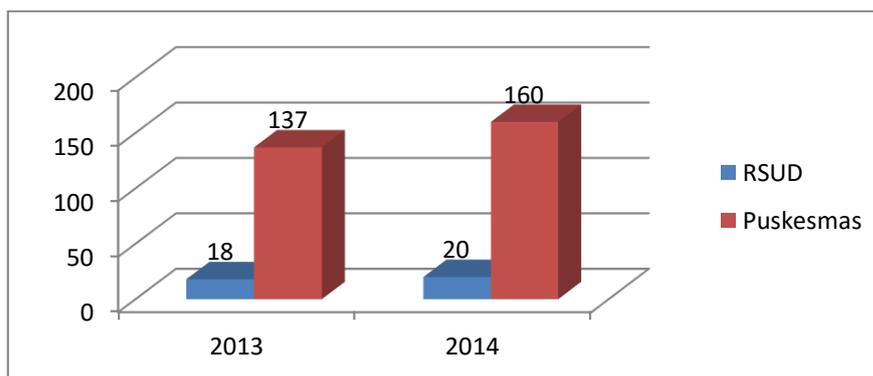
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2010-2014

**Grafik. 2.18**  
**Grafik Persentase Antenatal Care (K4), Kunjungan Neonatus(KN Lengkap)**  
**Dan Kunjungan Bayi Tahun 2010 - 2014**

## 3. Sumber daya kesehatan pada Pelayanan kesehatan dasar dan Rujukan

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan didukung dengan ketersediaan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta. Di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014, terdapat 211 Rumah Sakit (RS), terdiri dari 35 RS pemerintah, 3 RS Khusus Pemerintah, 10 RS TNI/Polri, 13 RS BUMN, 30 RS Khusus swasta dan 120 RS swasta, serta tersedia 570 unit Puskesmas dan 1.992 unit Puskesmas Pembantu.

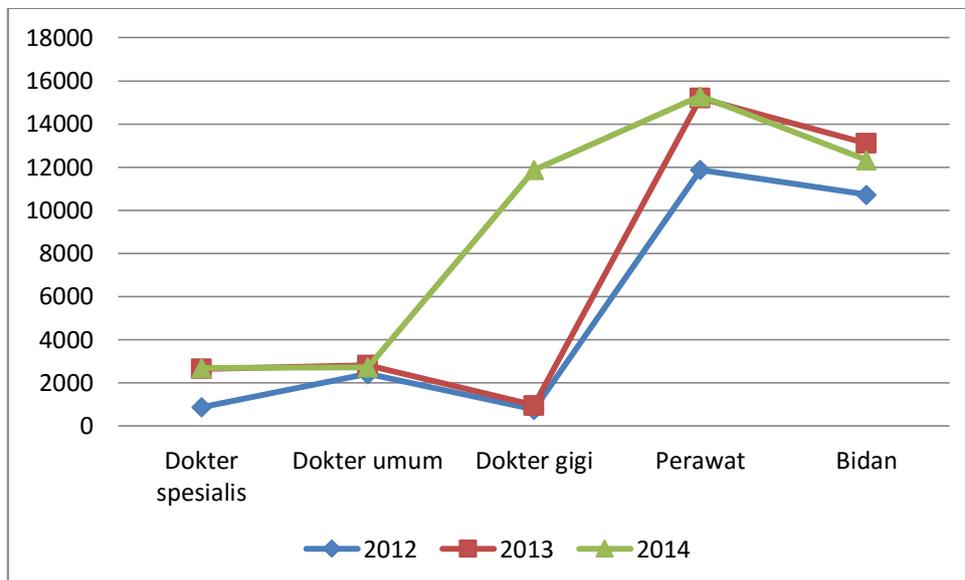
Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONEB berjumlah 160 Puskesmas, meningkat dibandingkan dengan jumlah tahun 2013 (140 Puskesmas). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang menyelenggarakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS sebanyak 20 RS, dan terdapat 9 RSUD yang telah menjadi PPK-Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).



Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2014 (data diolah)

**Grafik 2.19**  
**Grafik Jumlah RSUD mampu PONEK dan Puskesmas mampu PONED**  
**Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2014**

Tenaga medis yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut : tenaga dokter spesialis meningkat dari 855 orang menjadi 2.672 orang; dokter umum meningkat dari 2.405 orang menjadi 2.705 orang; dokter gigi meningkat dari 746 orang menjadi 964 orang; perawat meningkat dari 11.876 orang menjadi 15.292 orang; dan bidan meningkat dari 10.723 orang menjadi 12.326 orang.

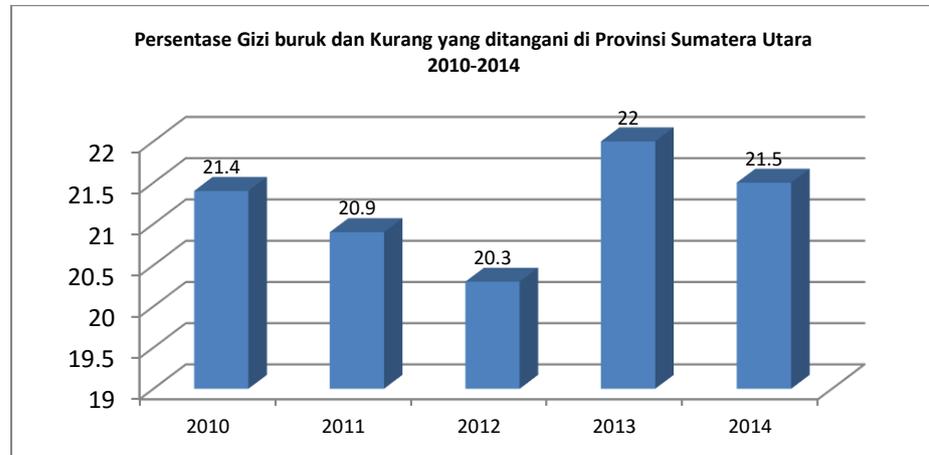


Sumber : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2014

**Grafik 2.20**  
**Grafik Tenaga Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2014**

4. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Pada tahun 2014, jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebanyak 21,5 balita dan keseluruhan balita yang mengalami gizi buruk tersebut mendapatkan penanganan (100%). Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan mendapatkan penanganan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 (22 kasus).

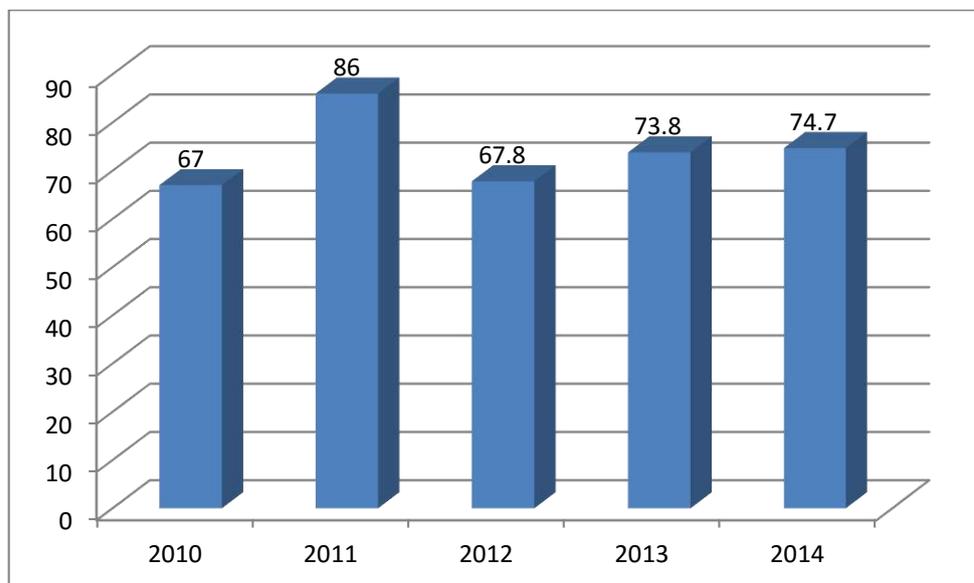


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2014

**Grafik 2.21**  
**Persentase Gizi Buruk dan Kurang yang ditangani di Provinsi Sumatera Utara 2010-2014**

5. Desa/kelurahan *Universal Child Immunization*

Persentase desa yang mencapai UCI di Sumatera Utara mengalami fluktuatif 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2010 sampai tahun 2014. Pada tahun 2010 persentase Desa UCI mencapai 67 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2011, namun pada Tahun 2014 naik menjadi 74,7 persen namun masih dibawah target Provinsi tahun 2014 (80%)



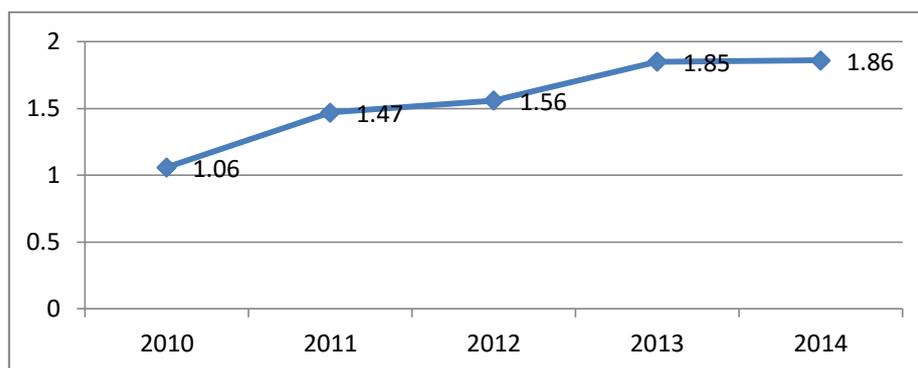
Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2014

**Grafik 2.22**  
**Grafik Persentase Desa UCI di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014**

Persentase pencapaian desa UCI di Provinsi Sumatera Utara yang masih dibawah rata-rata nasional disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor supply side immunisasi, belum maksimalnya peran tenaga kesehatan yang bekerja di desa, revutalisasi posyandu yang belum maksimal.

**6. Case Fatality Rate (CFR) Diare pada saat KLB (Kejadian Luar Biasa)**

Pada tahun 2014 telah terjadi KLB diare di 5 Kab/Kota, yaitu di Kabupaten Padang Lawas 2 kali, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan dan Kabupaten Mandailing Natal. Angka CFR Diare cenderung meningkat, dan masih diatas target nasional Tahun 2014 (kurang dari 1,2%).



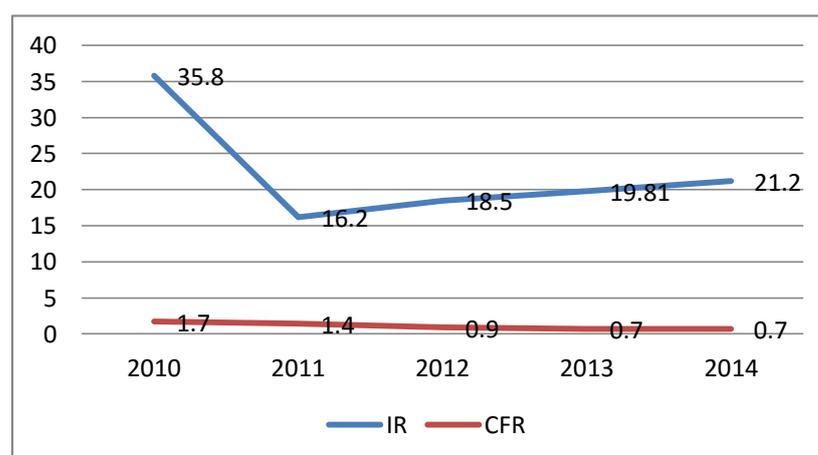
Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2014

**Grafik 2.23**

**Grafik Persentase Angka Kematian (CFR) akibat Diare pada KLB Tahun 2010-2014**

**7. Angka Kesakitan dan Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 Penduduk**

Program Pemberantasan DBD di Sumatera Utara terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu angka kesakitan (Incidence Rate/IR) dan angka kematian (Case Fatality Rate/CFR). Target Angka ksakitan (Insiden rate) Tahun 2014 DBD <50 per 100.000 penduduk, sedangkan CFR <1%.



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2010-2014

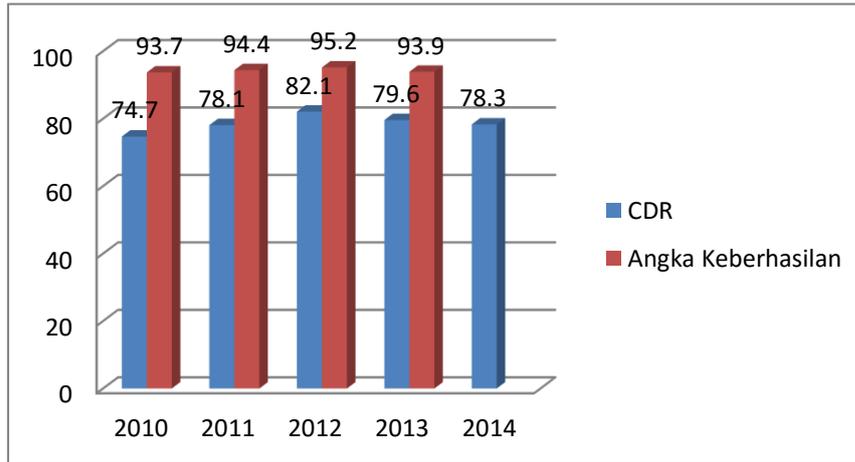
**Grafik 2.24**

**Grafik Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2014**

Angka kesakitan (IR) dan kematian (CFR) DBD per 100.000 penduduk kurun waktu 2010-2014 cenderung berada dibawah target Provinsi Sumatera Utara, meskipun dalam tiga tahun terakhir IR cenderung menurun namun CFR cenderung meningkat.

8. Angka *Case Detection Rate (CDR)* dan Keberhasilan Pengobatan TB

Angka CDR Penyakit TB atau Cakupan penemuan penderita TB Paru dilihat dari penemuan penderita TB Paru BTA+ yang berpotensi untuk terjadinya penularan di masyarakat. Cakupan penemuan penderita penyakit TB Paru BTA+ kurun waktu 2010-2013 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2010-2014

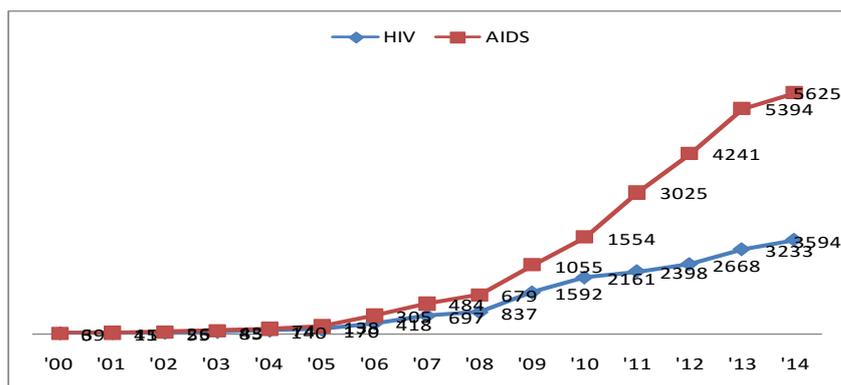
Grafik 2.25

**Grafik Angka CDR (Cakupan Penemuan Penderita TB Paru BTA+) dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010–2014**

Pada tahun 2014, jumlah kasus BTA+ yang ditemukan yaitu 16.659 kasus atau 78,3% dari estimasi kasus BTA+ yaitu 21.277 kasus; dan mampu mencapai target nasional yaitu 75% lebih rendah dari tahun 2013 (76,6%). Dari grafik terlihat bahwa cakupan penemuan penderita TB Paru BTA+ mengalami peningkatan selama kurun waktu 2010-2012, namun tahun 2013 dan 2014 CDR cenderung menurun ini terjadi karena terdapat Kab/Kota tidak mengirimkan laporan.

9. ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) mendapatkan pengobatan ART

Perkembangan kasus HIV/AIDS di Sumatera Utara sejak tahun 1992 kasus tersebut ditemukan dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2014

Grafik 2.26

**Grafik Jumlah Kumulatif Kasus HIV/AIDS DI Sumut Tahun 2000 – 2014**

Prevalensi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) mendapatkan pengobatan Anti-Retrovital Therapy (ART) meningkat dari 75% pada tahun 2013 menjadi 76% pada tahun 2014.

**9. Persentase Ibu Hamil Positif yang mendapat ARV**

Program Pencegahan penularan Penyakit HIV/AIDS dari ibu ke anak telah dibentuk 2 unit pelayanan PPIA dimana pada Tahun 2014 dari 130 orang ibu hamil HIV (+) yang masuk kelayanan PDP (Perawatan, Dukungan dan Pengobatan) sebanyak 93 orang mendapatkan obat ARV (72%).

**2.3.1.3 Pekerjaan Umum**

Beberapa capaian indikator bidang pekerjaan umum sampai dengan tahun 2014, antara lain proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik, Persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio rumah layak huni, persentase rumah tangga pengguna air bersih, persentase rumah tangga pengguna listrik.

- Persentase rumah tinggal bersanitasi : 59,12 %
- Rasio rumah layak huni : 82,98 %
- persentase rumah tangga pengguna air bersih : 89,98 %
- Persentase rumah tangga pengguna listrik : 88,36 %
- Bina Marga
- Sumber Daya Air

**Tabel 2.26**  
**Proporsi Jalan Nasional Dalam Kondisi Mantap**  
**Provinsi Sumatera Utara 2010-2014**

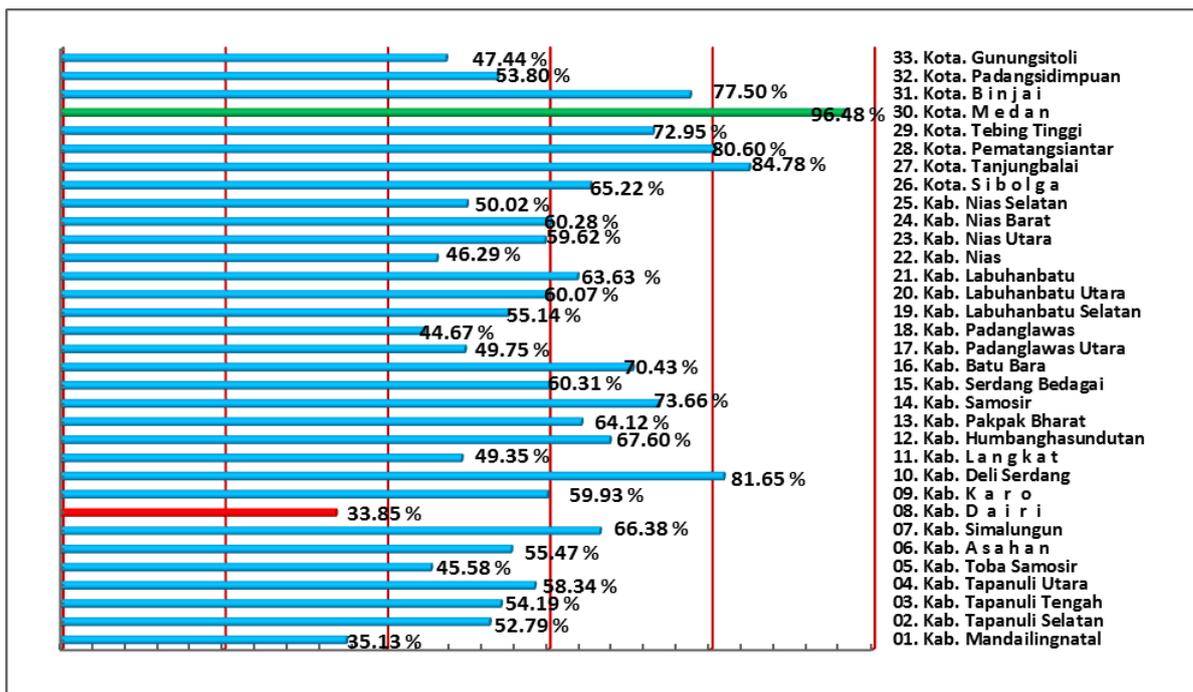
	2010	2011	2012 (Akhir Tahun 2012)	2013 (Semester III Tahun 2013)	2014 (Semester II Tahun 2014)
Panjang Jalan (Km)	2.249,64	2.249,64	2.249,64	2.249,64	2.249,64
Kondisi Mantap (%)	77,69	81,59	87,30	81,51	80,30

Sumber : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Medan

Tabel 2.27  
Proporsi Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap  
Provinsi Sumatera Utara 2010-2014

	2010	2011	2012 (Awal Tahun 2012)	2013 (akhir Tahun 2013)	2014 (Akhir Tahun 2014)
Panjang Jalan (Km)	2.752,41	2.754,41	3.048,50	3.048,50	3.048,50
Kondisi Mantap (%)	73,71	75,52	66,59	69,60	74,42

Sumber : Dinas Bina Marga Provsu



Sumber : Dinas Bina Marga Provsu

Grafik 2.27  
Grafik Diagram Kondisi Jalan Mantap di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014  
(Status Jalan Nasional, Provinsi dan Kab/Kota)

Tabel 2.28  
Luas Irigasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

	2011	2012	2013	2014
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi layanan optimal	52.200	53.069	52.200	53.330
Luas Total	86.999	86.999	86.999	86.999
(%) layanan optimal	60	61	60	61,3

Sumber : Dinas PSDA Provsu

#### 2.3.1.4 Penataan Ruang

Provinsi Sumatera Utara telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang RTRW Provsu Tahun 2003 – 2018. Saat ini Perda dimaksud sedang direvisi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta untuk

mengakomodir perkembangan terkini. Proses penyusunan dan pembahasan revisi RTRW Provsu tersebut telah dimulai pada tahun 2008 dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pada Juli 2010 Gubernur telah menyampaikan Raperda RTRW Provsu ke DPRD Provsu. Kemudian DPRD Provsu membentuk Badan Legislasi Daerah (Balegda) dan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Setelah melalui Balegda, selanjutnya DPRD Provinsi Sumatera Utara membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dimana saat ini Raperda RTRW Provsu dimaksud sedang dibahas oleh Pansus Tata Ruang.

Kegiatan Pembahasan dengan Pansus Tata Ruang DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2011 dilakukan dengan mengadakan pertemuan/konsultasi publik ke kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara guna membahas hal-hal untuk dijadikan masukan maupun muatan terhadap substansi dari materi draft Raperda RTRW Provsu. Kabupaten/kota yang berjumlah 33 tersebut kemudian dibagi ke dalam 6 (enam) zona dan masukan-masukan yang didapatkan telah didokumentasikan untuk dibahas bersama Pansus RTRW DPRD Provinsi Sumatera Utara, tenaga ahli dan BKPRD Provinsi Sumatera Utara untuk dimuat di draft Raperda RTRW Provinsi Sumatera Utara.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara 2013 bersama Panitia Khusus Tata Ruang DPRD Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan dan menghasilkan Persetujuan Bersama antara Gubernur dengan DPRD Nomor 07/K/2013 dan 188.44/669/KPTS/2013 Tanggal 9 September 2013 tentang persetujuan bersama terhadap 4 (empat) rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2033, Raperda tentang PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara, Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah dan Raperda Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

Mempedomani amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, khususnya pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh Gubernur, terlebih dahulu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan Rancangan Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2034, yang telah mendapat kesepakatan Bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, tanggal 6 November 2013 kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Selanjutnya disampaikan bahwa menindaklanjuti hal tersebut, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara, oleh Ditjen. Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI tanggal 16 November 2013 di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah diterbitkan hasil Evaluasi Raperda RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2034 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 650-1650 Tahun 2014.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 579 Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, sebagai rangkaian proses revisi Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, maka telah dilakukan proses integrasi Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 579 Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara ke dalam Rencana Pola Ruang Raperda RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2034 serta ke dalam Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk memenuhi kebutuhan akan pusat data geospasial di Provinsi Sumatera Utara, sejak Tahun 2012 telah dimulai pembangunan Jaringan Pusat Data dan Informasi

Geospatial di Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Terkait status legalisasi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota, 16 (enam belas) Kabupaten/Kota telah memperdakan RTRW nya. Status legalisasi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.29**  
**Status Legalisasi Peaturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota**

NO	KABUPATEN / KOTA	STATUS
1	Kota Medan	PERDA NO. 13 TAHUN 2011
2	Kota Binjai	PERDA NO. 12 TAHUN 2011
3	Kota Gunung Sitoli	PERDA NO. 12 TAHUN 2012
4	Kabupaten Simalungun	PERDA NO. 10 TAHUN 2012
5	Kota Pematangsiantar	PERDA NO. 1 TAHUN 2013
6	Kota Tebing Tinggi	PERDA NO. 4 TAHUN 2012
7	Kota Tanjung Balai	PERDA NO. 2 TAHUN 2013
8	Kabupaten Serdang Bedagai	PERDA NO. 12 TAHUN 2013
9	Kabupaten Batubara	PERDA NO. 10 TAHUN 2013
10	Kabupaten Tapanuli Tengah	PERDA NO. 8 TAHUN 2013
11	Kabupaten Langkat	PERDA NO. 9 TAHUN 2013
12	Kabupaten Asahan	PERDA NO. 12 TAHUN 2013
13	Kabupaten Nias	PERDA NO. 1 TAHUN 2014
14	Kabupaten Dairi	PERDA NO. 7 TAHUN 2014
15	Kota Padangsidempuan	PERDA No. 4 TAHUN 2014
16	Kabupaten Nias Utara	PERDA No. 1 TAHUN 2015
17	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
18	Kabupaten Padang Lawas Utara	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
19	Kabupaten Nias Barat	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
20	Kabupaten Nias Selatan	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
21	Kota Sibolga	Sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur
22	Kabupaten Labuhan Batu	Di Biro Hukum
23	Kabupaten Pakpak Bharat	Evaluasi Teknis
24	Kabupaten Mandailing Natal	Evaluasi Teknis
25	Kabupaten Humbang Hasundutan	Evaluasi Teknis
26	Kabupaten Tapanuli Utara	Evaluasi Teknis
27	Kabupaten Toba Samosir	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
28	Kabupaten Samosir	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
29	Kabupaten Padang Lawas	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
30	Kabupeten Labuhan Batu Selatan	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
31	Kabupaten Tapanuli Selatan	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
32	Kabupaten Karo	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur
33	Kabupaten Deliserdang	Belum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Utara

### 2.3.1.5 Perencanaan Pembangunan

Hasil capaian bidang perencanaan pembangunan, adalah sebagai berikut :

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 – 2015.
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 – 2020.
- Tersedianya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pengendalian Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 – 2020.

### 2.3.1.6 Perhubungan

Capaian Indikator bidang perhubungan antara lain adalah :

- Jumlah Pelabuhan Laut : **35 Pelabuhan**
- Bandar Udara : **8 Bandara**
- Terminal Bis : **40 buah**
- Angkutan darat : **3.927 unit (AKDP : 2.833 ; AKAP : 1.094)**

### 2.3.1.7 Lingkungan Hidup

Indikator lingkungan hidup antara lain dapat dilihat dari status mutu air dan kasus pencemaran air, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, dan penegakan hukum lingkungan :

#### A. Status Mutu Air

Jumlah alokasi pelayanan status mutu air sungai dan danau di reseptor yang sensitif ditargetkan pada 6 lokasi, dan terealisasi 6 lokasi, dengan capaian kinerja 100%.

##### 1) Sungai Deli

Status mutu air sungai deli di 7.sampling adalah status mutu air di 5 titik (Sibyakindo, Jemabatan Simalingkar B, Jembatan Jalan Ir. Juanda, Pertemuan antara Sungai Deli dan Sungai Babura, dan Jembatan Pulau Brayen) tergolong tercemar ringan. Status mutu air di 2 titik (PT. Unibis dan Jembatan Medan Labuhan) tergolong tercemar sedang.

- 2) Sungai Belawan  
Status mutu air di 7 titik sampling ( Jembatan Tuntungan, Pertemuan Sei Belawan-Sei Kriyo, PDAM Tirtanadi Medan, PT. Everbright, Pabrik gula Sei Semayang, PT. Rubber Hock Lie, Tirtanadi Hamparan Perak) pada sungai Belawan tergolong tercemar ringan.
- 3) Sungai Asahan  
Status mutu air Sungai Asahan di 6 titik sampling adalah status mutu air di 2 titik (Jembatan jalan Balige pasar Porsea, Jembatan Desa Meranti Pintu Pohan) tercemar ringan. Status mutu air di 2 titik (Titi Gantung-Deang-deang, Jembatan downstream PKS Pulau Raja) tergolong tercemar sedang. Status mutu air di 2 titik (Jembatan Kuning P. Simardan, Jembatan Tabayong, Desa Patembo) tergolong tercemar berat.
- 4) Sungai Wampu  
Status mutu air di 6 titik sampling (jembatan desa sogong, jembatan sei bahorok, jembatan desa tanjung lenggang, penyeberangan getek jumari desa perhiasan, jembatan jalan umar baki binjai, jembatan desa stabat) pada sungai wampu tergolong tercemar sedang.
- 5) Sungai Percut  
Status mutu air sungai percut di 6 titik sampling adalah status mutu air di 2 titik (jembatan bukum desa cinta rakyat dan jembatan desa sari laba jahe) tergolong tercemar ringan. Status mutu air di 3 titik (jembatan desa aji baho batumbak, jembatan medan amplas dan jembatan desa bandar setia) tergolong tercemar sedang. Status mutu air di 1 titik (jembatan desa tembung) tergolong tercemar berat.
- 6) Sungai Batahan  
Status mutu air di 6 titik sampling (jembatan gantung desa batu, jembatan bitungan bejangkar baru/aerapa, jembatan bitungan bejangkar kampung, jembatan rambin tran-1, jembatan gantung simpang gordes, lubuk pusing) tergolong tercemar berat.

**B. Cakupan pelayanan Kasus-kasus lingkungan hidup**  
**Target 100% capaian kinerja 59,38%**

Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima instansi Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam satu tahun sebanyak 32 kasus sedangkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti hanya 19 kasus. Capaian kinerja yang rendah disebabkan karena beberapa hal antara lain masih kurangnya koordinasi dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dalam melakukan tindaklanjut pengaduan kasus pencemaran dan atau kasus perusakan lingkungan sehingga beberapa kasus di Kabupaten/Kota tidak dapat ditindaklanjuti. Selain itu disebabkan karena kurangnya personil untuk menindaklanjuti kasus-kasus serta waktu yang tidak memungkinkan untuk melakukan proses penanganan kasus-kasus lingkungan.

**C. Cakupan terhadap Pelayanan AMDAL**

Target 100%, capaian kinerja 100%.

Perusahaan yang mengajukan pembuatan dokumen AMDAL/RKL-RPL sebanyak 8 perusahaan dan dokumen yang sudah selesai/dalam proses dibahas oleh Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara Tahun 2014 sebanyak 8 dokumen.

#### **D. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL**

Telah dilakukan Analisa AMDAL, khususnya pada perusahaan besar di Sumatera Utara, sebanyak 19 dokumen dalam bentuk KA-ANDAL dan ANDAL/RKL-RPL, UKL-UPL dan DPL (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, DPPL (Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup).

#### **E. Penegakan hukum lingkungan**

Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan telah dilakukan melalui penanganan pengaduan masalah lingkungan, sebanyak 26 (dua puluh enam) kasus pengaduan. 7 (tujuh) pengaduan terkait masalah pencemaran lingkungan telah diproses dengan melakukan verifikasi/klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

### **2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) sebagai salah satu capaian indikator pemberdayaan perempuan memperlihatkan trend positif. Dimana pada tahun 2011 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Utara telah mencapai 67,39 persen dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 2 persen sehingga pada tahun tersebut IPG Sumatera Utara telah mencapai 69,82 persen.

Capaian IPG Sumatera Utara Tahun 2012 sebesar 69,82 persen ini tidak terlepas dari capaian beberapa indikator lain seperti keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun yang sama sebesar 17 persen, perempuan sebagai tenaga kerja profesional sebesar 51,62 persen dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja sebesar 35,64 persen.

Peningkatan peran serta perempuan pada bidang ketenaga kerjaan juga menunjukkan trend positif. Pada tahun 2013, persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Sumatera Utara telah mencapai 56,10 persen mengalami peningkatan sebesar 3,5 persen, dimana pada tahun 2012 persentase partisipasi angkatan kerja perempuan Sumut hanya mencapai 60,85 persen.

Namun, peningkatan peran serta perempuan dalam berbagai sektor, tidak diikuti oleh upaya perlindungan terhadap perempuan, sehingga pada tahun 2013 telah ditemukan 20 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), angka ini mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya (2012) yang hanya mencapai 17 kasus kekerasan. Sehingga hal ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengoptimalkan peran perempuan dalam pembangunan.

### **2.3.1.9 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Indikator terkait dengan keluarga berencana dilihat dari rata-rata jumlah anak dalam keluarga menunjukkan penurunan dari 2,42 tahun 2007 menjadi 1,92 pada tahun 2008, namun pada tahun 2009 meningkat kembali menjadi 2,1 dan 2,07 pada tahun 2010. Hal ini perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan tekanan kepada pertumbuhan penduduk Sumatera Utara.

Disamping itu terjadi peningkatan jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I, di tahun 2011 terapat 1.059.065 dari 3.138.657 kepala keluarga dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu 1.087.362 dari 3.253.024 kepala keluarga di Sumatera Utara.

### **2.3.1.10 Sosial**

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang terdapat pada beberapa Kabupaten/Kota, yang menampung anak-anak terlantar, gelandangan, cacat fisik, pengemis dan lanjut usia.

- PMKS yg memperoleh bantuan sosial

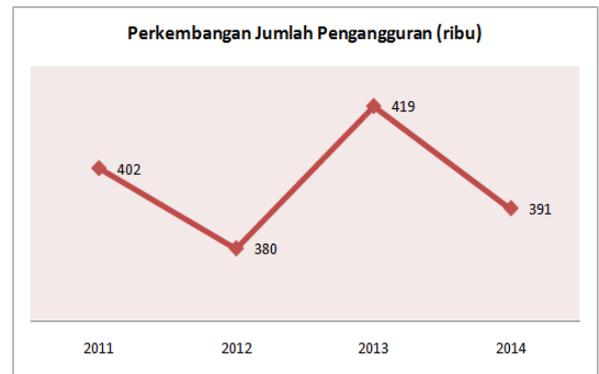
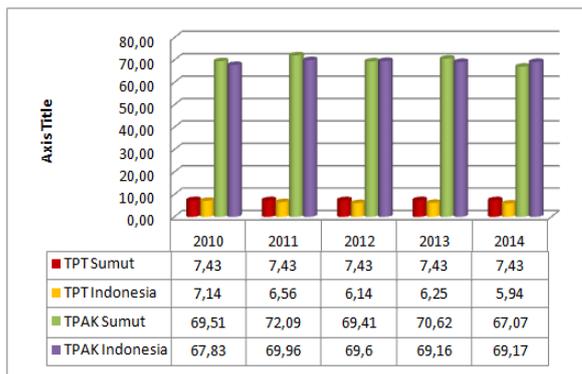
Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara terdiri dari beberapa jenis, sebagaimana terlihat pada **tabel** dibawah ini :

**Tabel 2.30**  
**PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial**

No	Jenis PMKS
1	Anak Balita Terlantar
2	Anak terlantar
3	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
4	Anak jalanan
5	Anak dengan kedisabilitas
6	Wanita rawan sosial ekonomi
7	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus
8	Lanjut Usia
9	Penyandang Disabilitas
10	Tuna susila
11	Pengemis
12	Gelandangan
13	Keluarga bermasalah sosial psikologis
14	Pemulung
15	Kelompok Minoritas
16	Bekas Narapidana
17	HIV/AIDS
18	Korban Narkotika
19	Traficking
20	Komunitas Adat Terpencil (KAT)
21	Korban Tindak Kekerasan
22	Pekerja Migran Bermasalah Sosial
23	Korban Bencana Alam
24	Korban Bencana Sosial
25	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
26	Fakir Miskin

#### 2.3.1.11 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara, telah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2014 yang mncapai 67,07 persen, sebesar 7,43 persen adalah pengangguran terbuka. Kondisi capaian ini berada di bawah capaian nasional pada tahun yang sama sebesar 6,25 persen, Sehingga hal ini juga menggambarkan bertambahnya jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Dimana pada tahun 2013 jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara sebesar 419.202 jiwa mengalami peningkatan menjadi 391.202 jiwa pada tahun 2014, sebagaimana grafik berikut :



Sumber : BPS Sumatera Utara, 2014

**Grafik 2.28**  
**Grafik Kondisi Ketenaga Kerjaan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2010-2014**

### 2.3.1.12 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perkembangan Koperasi di Sumatera Utara dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.31**  
**Perkembangan Koperasi Tahun 2014 – 2015**

No	Uraian	Keadaan		
		2014	Oktober 2015	% (+/-)
1	Jumlah Koperasi	12.273	11.755	- 4,22
	Aktif (Unit)	7.480	6.825	- 8,75
	Tidak Aktif (Unit)	4.793	4.930	2,85
2	Anggota (Orang)	2.133.927	1.818.568	- 14,77
3	RAT (Unit)	4.305	227	- 94,72
4	Manajer (Orang)	1.596	146	- 90,85
5	Karyawan (Orang)	12.096	6.559	- 45,77
6	Modal Sendiri (Rp. 000)	3.058.101.432	21.230.966.062	594,25
7	Modal Luar (Rp. 000)	1.520.777.633	1.191.175.509	- 21,67
8	Volume Usaha (Rp. 000)	5.048.516.265	4.934.083.624	- 2,26
9	SHU (Rp. 000)	500.512.930	593.676.669	18,61

Keragaan Koperasi Tahun 2015 mengalami perubahan signifikan di beberapa indikator. Hal ini disebabkan karena pendataan selama ini dilakukan tidak memakai aplikasi yang online, sehingga tidak terbaharui secara berkelanjutan. Mulai Tahun 2015 Database Koperasi Se - Sumatera Utara mempergunakan Aplikasi Online Data System (ODS), sebagai program yang diterapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam mendata koperasi di seluruh Indonesia dengan Online.

Dengan mempergunakan aplikasi Online Data System ada beberapa kelebihan yang diperoleh, yaitu :

1. Dapat dilihat data individu koperasi secara riil dan terkini
2. Tidak terjadi tumpang tindih data koperasi

3. Dapat menampilkan laporan dengan berbagai kebutuhan (bentuk koperasi, jenis koperasi, sektor uaha koperasi, kelompok koperasi, wilayah koperasi, dll)
4. Dapat menampilkan profil koperasi (kepengurusan, Kelembagaan dan indikator usaha)
5. Data koperasi dapat diakses melalui website Kementerian Koperasi dan UKM RI ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id))

Jumlah koperasi tahun 2015 yang kelihatan menurun bukan berarti kinerja Dinas Koperasi dan UKM menurun akan tetapi itu adalah upaya yang dilakukan dengan membubarkan koperasi yang tidak aktif dan memacu koperasi aktif agar lebih berkualitas. Makin merebaknya jenis koperasi yang kurang jelas peruntukannya, memaksa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan penertiban dengan pengecekan, pemberian nomor Induk Keanggotaan serta kode respon cepat.

Mulai 2015, Koperasi yang tidak mempunyai sertifikat Nomor Induk Koperasi dan Quick Response (QR) Code akan dibubarkan pemerintah secara massal. Keputusan ini mengacu pada surat dari Kementerian Koperasi dan UKM yang akan memberikan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dan QR Code kepada koperasi yang betul-betul aktif dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sementara koperasi yang aktif tapi tidak melaksanakan RAT akan diberi sertifikat NIK saja. Keputusan ini bertujuan untuk menyaring model koperasi yang sehat dan menertibkan daftar keanggotaan koperasi di setiap kota dan kabupaten. Manfaat Sertifikat NIK dan QR code diantaranya, koperasi mendapatkan rekomendasi penuh dari program-program pemerintah. Disamping itu jika ingin mengajukan hutang ke bank, otomatis langsung disetujui.

Sedangkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.32**  
**Jumlah UMKM Tahun 2014 - 2015**

Sektor	Jumlah (unit)		
	2014	2015	% (+-)
Jumlah UMKM	2.855.399	2.855.549	0,00525

Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dan pembangunan ekonomi. Gerak sektor UMKM alat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. Perkembangan jumlah UMKM di Sumatera Utara cukup baik, hal ini dapat memberikan kontribusi yang cukup baik baik penumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

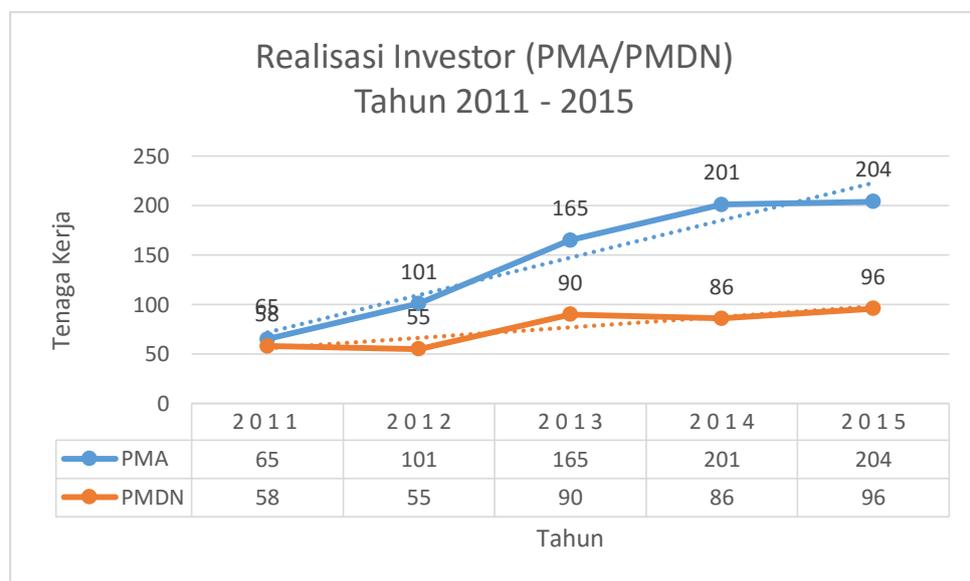
#### 2.3.1.13 Penanaman Modal Daerah

- a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)  
Secara keseluruhan pada tahun 2015 Provinsi Sumatera Utara mempunyai 300 investor baik dari local maupun investor asing, dan diketahui bahwa dari tahun 2011 - 2015 jumlah investor terus mengalami peningkatan, untuk lebih detailnya dapat dilihat pada **Tabel** berikut ini :

**Tabel 2.33**  
**Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 – 2015**  
**Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	Jumlah Investor	58	65	123
2012	Jumlah Investor	55	101	156
2013	Jumlah Investor	90	165	255
2014	Jumlah Investor	86	201	287
2015	Jumlah Investor	96	204	300

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu



**Grafik 2.29**

**Grafik Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 – 2015 Provinsi Sumatera Utara**

Dari tabel dan grafik diatas terlihat kenaikan yang signifikan untuk jumlah investor PMA maupun PMDN. Jumlah investor PMDN mengalami peningkatan yang signifikan dari 58 jumlah proyek ditahun 2011 menjadi 96 proyek ditahun 2015. Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) juga mengalami kenaikan dari semula 65 proyek pada tahun 2011 menjadi 204 jumlah proyek yang terealisasi di Sumatera Utara tahun 2015.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan jumlah proyek dan nilai investasi baik yang masih dalam tahap persetujuan maupun yang sudah direalisasi di Sumatera Utara untuk tahun 2011-2015 dapat dilihat pada **Tabel 2.34** berikut:

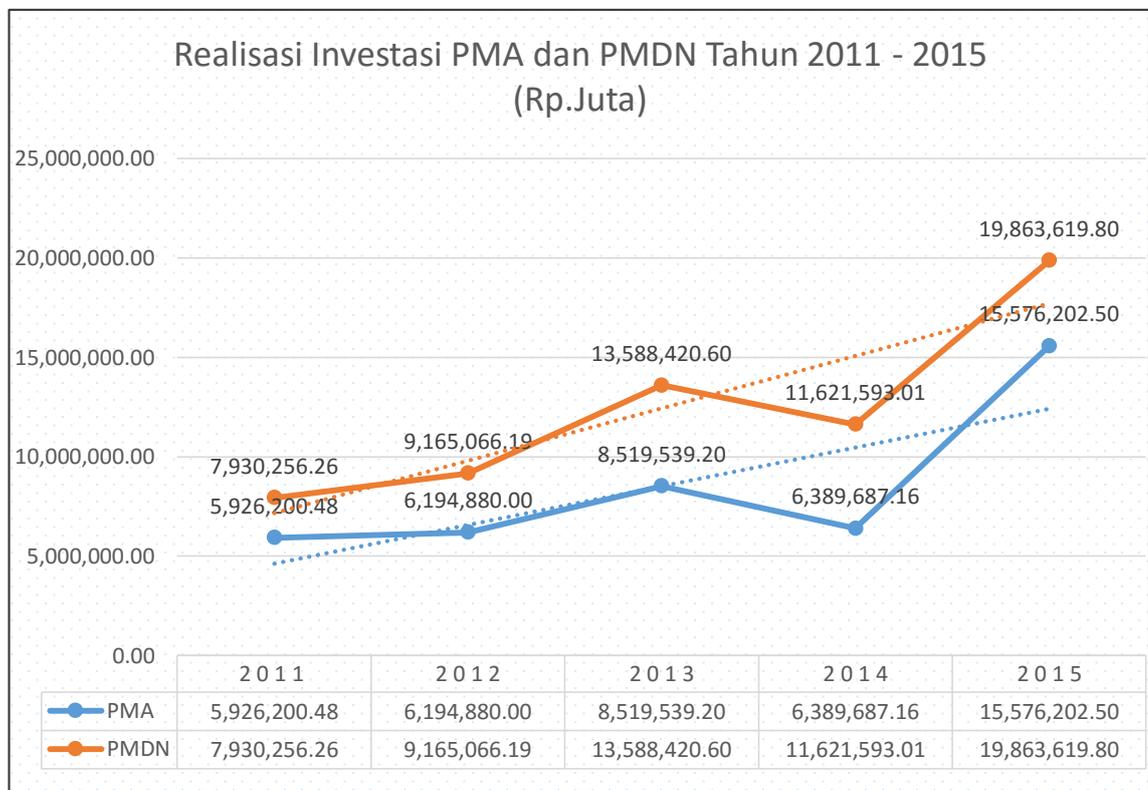
**Tabel 2.34**  
**Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 – 2015**

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US \$.000)*
2011	58	2.004.055,78	65	658.466,72
2012	55	2.970.186,19	101	645.300,00
2013	90	5.068.881,40	165	887.452,00
2014	86	5.231.905,85	201	550.835,10
2015	96	4.287.417,30	204	1.246.096,20

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu.

- US \$ 1 = Rp. 9.000.- (2011)
- US \$ 1 = Rp. 9.600.- (2012)
- US \$ 1 = Rp. 9.600.- (2013)
- US \$ 1 = Rp. 10.500.- (2014)
- US \$ 1 = Rp. 12.500.- (2015)

Perkembangan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir ini baik dilihat dari jumlah proyek maupun jumlah dana yang terealisasi. Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan nilai investasi dari Penanaman Modal Asing. Tetapi pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan baik investasi asing maupun investasi dalam negeri.



**Grafik 2.30**  
**Grafik Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2010 – 2015**  
**Provinsi Sumatera Utara (Juta Rp.)**

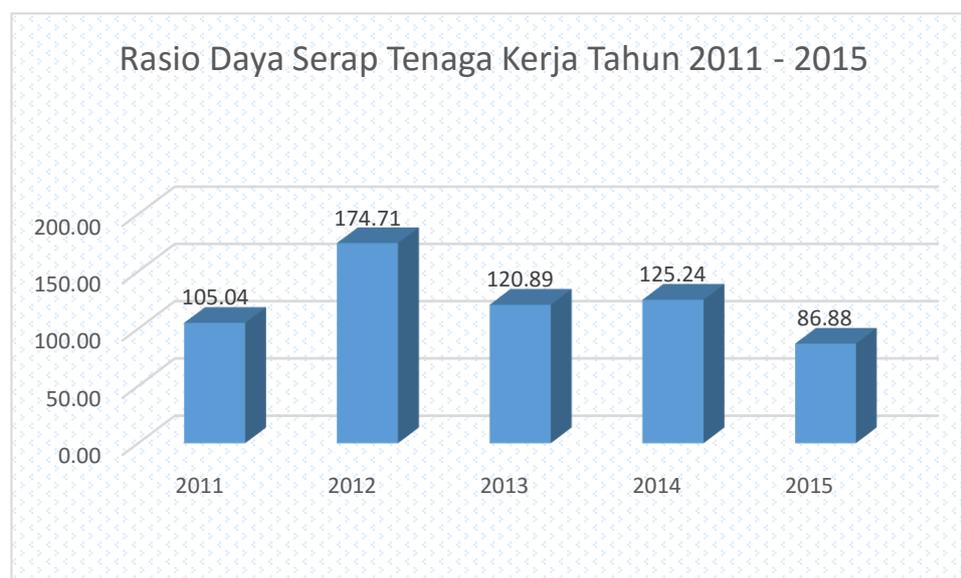
c. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja Perusahaan Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat dilihat pada **Tabel** dibawah ini.

**Tabel 2.35**  
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMA/PMDN)  
Tahun 2011 - 2015 Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Tenaga Kerja yg Bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN	12,920	27,255	30,826	26,667	26,063
2	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	123	156	255	287	300
3	Ratio Daya Serap Tenaga Kerja	105.04	174.71	120.89	125.24	86.88

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu



**Grafik 2.31**  
**Grafik Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA/PMDN selama 2011-2015**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2014. Jika dilihat dari peningkatan nilai realisasi investasi yang meningkat lebih dari 100%, dapat disimpulkan bahwa nilai investasi tersebut bukan hanya berasal dari investor baru tetapi merupakan investor yang melakukan penambahan nilai investasi, sehingga tidak melakukan penambahan tenaga kerja, selain itu dikarenakan semakin tingginya teknologi di Sumatera Utara sehingga tidak memerlukan banyak tenaga kerja hanya menggunakan mesin.

### 2.3.1.14 Kebudayaan

#### a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman budaya yang sangat menarik. Hal ini dapat dilihat dari suku/etnis yang tinggal di Sumatera Utara. Ada 8 (delapan) suku/etnis asli di Sumatera Utara, yaitu : Melayu, Batak Karo, Batak Toba, Mandailing, Batak Pakpak Dairi, Simalungun, Batak Angkola dan Nias. Selain itu terdapat juga beberapa suku/etnis pendatang antara lain adalah suku Jawa, Minangkabau, Cina dan Aceh. Untuk melestarikan keragaman budaya serta menjaga kerukunan antar suku/etnis, diselenggarakan berbagai macam festival seni budaya, antara lain yaitu :

- Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) yang dilaksanakan rutin 1 tahun sekali.
- Pesta Danau Toba. Diselenggarakan setahun sekali..
- Festival Mejuah-juah . Diselenggarakan setahun sekali.
- SUMUT Gempar. Diselenggarakan rutin setahun sekali dan telah memperoleh rekor MURI.
- Pameran Warisan Budaya Islam.
- Festival Budaya Melayu.
- Pawai Budaya Hut RI.

#### b. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya.

Sarana dan Prasarana adalah salah satu hal penting dalam pengembangan maupun pelestarian seni dan budaya. Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa gedung (sarana) untuk penyelenggaraan kegiatan Seni dan Budaya, yaitu : Tapian Daya PRSU sebagai tempat penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera, Museum Taman Budaya dan Museum Negeri Sumatera Utara. Jumlah Kunjungan ke Museum Negeri Sumatera Utara pada tahun 2015 mencapai 90.270 orang. Jumlah ini masih jauh dari target yang diharapkan yaitu sebesar 166.389 orang. Dibawah ini disajikan jumlah kunjungan ke Museum Negeri Sumatera Utara,



Grafik 2.32

Grafik Jumlah Pengunjung Museum Negeri Sumatera Utara Tahun 2011-2015

c. Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Selain memiliki kawasan wisata alam yg memukau. Sumatera Utara juga memiliki kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Benda. Situs budaya yang perlu dilestarikan antara lain yaitu :

- Candi Portibi di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Candi Bahal di Kabupaten Padang Lawas Utara
- Istana Maimun di Kota Medan.
- Masjid Raya Medan.
- Budaya Loncat batu di Kabupaten Nias.
- Salib Kasih di Kabupaten Tapanuli Utara.

### 2.3.1.15 Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, didefinisikan pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sedangkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan regulasi terkait dengan Ketahanan Pangan, yaitu :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 Nomor 14 Seri G).
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 25 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan dan Swasembada Pangan.
- c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015
- d. One day no Rice

Dalam Ketahanan pangan dikenal 3 aspek pokok yaitu :

1. Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,
2. Aspek Distribusi dan Akses Pangan, serta
3. Aspek Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan.

#### 1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan energi rata-rata penduduk Sumatera Utara mengalami peningkatan dari 3.868 k.kal/kap/hari pada tahun 2013 menjadi 3.887 k.kal/kap/hari pada tahun 2014, akan tetapi pada tahun 2015 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 menjadi 3.876 kkal/kap/hari, akan tetapi masih

lebih tinggi dari tahun 2013. Tetapi angka ketersediaan protein terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 - 2015 dari 76.18 gr/kap/hari pada tahun 2013 meningkat menjadi 76.96 gr/kap/hari pada tahun 2014 dan meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 76,98 gr/kap/hari.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber karbohidrat masyarakat Sumatera Utara tidak lagi beras melainkan bersumber dari jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Sumatera Utara juga mengalami surplus beras sebesar 482.133 ton. dimana konsumsi beras penduduk Sumatera Utara pada tahun 2014 sebesar 1.740.545 ton sedangkan ketersediaan berasnya mencapai 2.194.959 ton. Jika diasumsikan konsumsi beras penduduk Sumatera Utara sebesar 142.735 ton/bulan. maka ketersediaan cadangan pangan Sumatera Utara aman untuk 3 bulan kedepan.

Untuk Pola Pangan Harapan (PPH) Sumatera Utara meningkat dari 83.6 pada tahun 2013 menjadi 85.0 pada tahun 2014 (meningkat sebesar 1.67%). Sedangkan tingkat konsumsi beras masyarakat Sumatera Utara menurun dari 130.61 kg/kap/tahun pada tahun 2013 menjadi 128.53 kg/kap/tahun pada tahun 2014 (menurun 1.60%) dan berada dibawah 128.65 kg/kap/tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan program pemerintah untuk melakukan penurunan konsumsi beras sebesar 1.5% per tahun. Hal ini dikarenakan adanya gerakan manggadong dan one day no rice di Sumatera Utara.

**Tabel 2.36**  
**Aspek Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015**

No.	URAIAN	Target 2015	Realisasi 2015	Pencapaian Target (%)
I.	KETERSEDIAAN PANGAN			
1.	Ketersediaan energi perkapita minimal 2400 k.kal dan penyediaan protein perkapita minimal 63gr per hari	Karbohidrat : 3.876 kkal. Protein : 76.98 gram	Karbohidrat : 3.876 kkal. Protein : 76.98 gram	Karbohidrat: 100% Protein : 100%
2.	Ketersediaan Cadangan Pangan	146 Ton	150 Ton	102,74
3.	Kelembagaan Pangan	29 Lumbung	49 Lumbung	168.97
4.	Kelompok Lumbung Pangan	94 Gapoktan	91 Gapoktan	96.81
II.	DISTRIBUSI AKSES PANGAN			
1.	Sistem Distribusi Harga	100 %	100 %	100
2	Akses Pangan Masyarakat	81 Kelompok	7 Kelompok	8,64
III.	PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN			
1.	Penurunan Konsumsi Beras 1.5% dan Pola Pangan Harapan (PPH)	Konsumsi Beras 126.72 kg/kap/tahun ; PPH 85.0	Konsumsi Beras 126.32 kg/kap/tahun ; PPH 85.2	Konsumsi Beras : 99,68 % PPH : 100.23%
2.	Konsumsi pangan untuk memenuhi	Energi 2.100 kkal, Protein	Energi 1.997 kkal,	Energi : 95,09 %,

	kebutuhan energi minimal 2.200 kkal dan protein 57 gr	62,8 gr/kap/hari	Protein 59,3 gr/kap/hari	Protein : 94,42%
3.	Penanganan Keamanan Pangan Segar	75 %	100%	133,33
4	Sertifikasi Buah dan Sayuran Segar kelompok produsen di kab/kota	15 kelompok	7 kelompok	46,67
IV.	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
1.	Berkurangnya Penduduk Miskin dan Rawan Pangan	Penduduk Miskin 9.61 %.	Penduduk Miskin berkurang 10,53%	109,57
2.	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	75 desa	77 desa	102,67
V.	PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI KETAHANAN PANGAN			
1.	Efektivitas Koordinasi Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan	65%	65%	100
2.	Terlaksananya koordinasi ketahanan pangan provinsi dan kab/kota	5 kali	8 kali	160

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provsu 2015 (data diolah)

## 2. Kondisi Rawan Pangan

Kemiskinan berhubungan sangat erat dengan kerawanan pangan dalam dua dimensi yaitu dari (1) kedalamannya, dibedakan dengan kategori ringan, sedang, dan berat; serta (2) jangka waktu/periode kejadian, dengan kategori kronis untuk jangka panjang dan transien untuk jangka pendek/fluktuasi. Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori perkapita perhari dengan nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.000 kkal. Jika konsumsi perkapita kurang atau lebih kecil dari 70 persen dari AKG dikategorikan sangat rawan pangan; sekitar 70 hingga 90 persen dari AKG dikategorikan rawan pangan; dan lebih dari 90 persen dari AKG termasuk dalam kategori tahan pangan.

### 2.3.1.16 Perpustakaan dan Kearsipan

#### a. Jumlah perpustakaan

Berikut ini adalah Perpustakaan yang telah dibina Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provsu adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.37**  
**Jumlah Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara**  
**Jumlah Perpustakaan yang telah dibina (Mendapat Bantuan)**

No	Jenis Perpustakaan	Data BPS 2008-2010	2010	2011	2012	2013	Total
1	Kabupaten/Kota	-	33	33	33	33	-
2	Kecamatan	-	30	10	-	50	-
3	Desa/Kelurahan	177	192	100	132	1321	177
4	PAUD/TK	-	-	10	-	10	-
5	SD	-	-	20	B	20	-
6	SMP	-	20	14	B	34	-
7	SMU	-	20	14	B	34	-
8	SMK	-	-	20	B	20	-
9	Pondok Pesantren	-	10	10	-	30	-
10	Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta)	6	6	6	-	24	6
11	Masjid	-	10	10	-	30	-
12	Gereja	-	10	10	-	30	-
13	Masyarakat/TBM	20	35	8	-	92	20
14	RSUD	-	10	-	-	20	-
15	Puskesmas	-	-	10	-	20	-
16	Khusus/Instansi	-	30	8	B	48	-
17	Lembaga Pemasyarakatan	1	5	10	-	17	1
18	Panti Sosial	-	12	-	-	12	-

*Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2014*

b. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Berikut ini adalah grafik tingkat kunjungan Pemustaka tiap tahunnya ke Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara :

**Tabel 2.38**  
**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun**

Tahun	Jumlah
2010	589.553
2011	593.834
2012	594.443
2013	100.000



Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara

Grafik 2.33

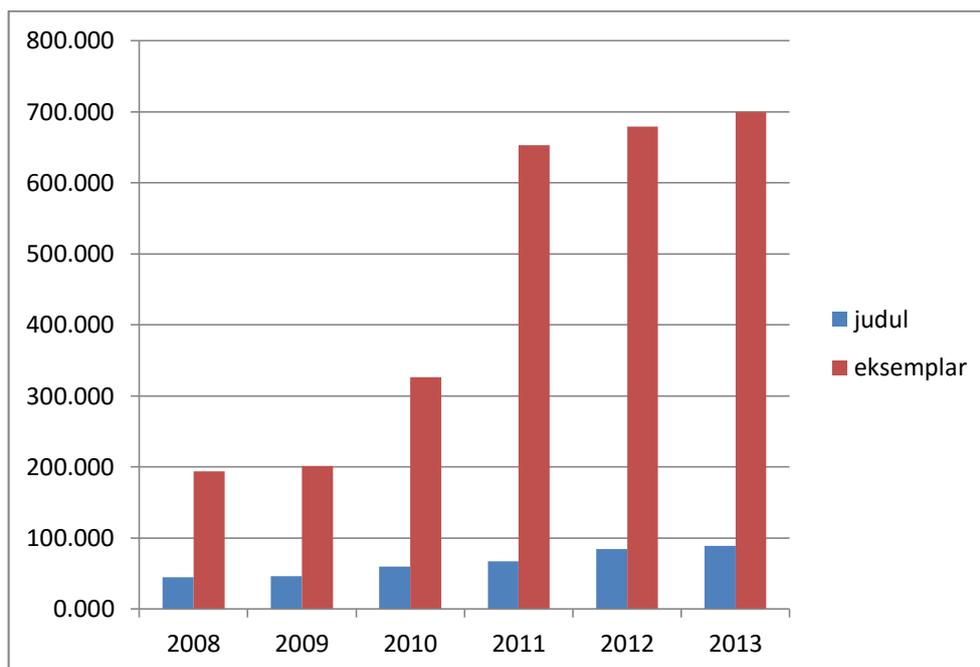
Grafik Jumlah pengunjung perpustakaan per-tahun (dalam ribuan) 2010-2014

- e. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah  
Berikut ini adalah grafik koleksi buku yang ada di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara :

Tabel. 2.39  
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan  
Provinsi Sumatera Utara

TAHUN	JUDUL	EKSEMPLAR
2009	46.433	201.067
2010	59.855	326.170
2011	67.084	652.780
2012	84.419	679.289
2013	88.694	699.204

Grafik perkembangan jumlah dan Judul Buku dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Grafik 2.33**  
**Grafik perkembangan jumlah dan judul buku 2009-2013**

d. Kearsipan

Pengelolaan Arsip adalah proses pengendalian arsip secara efisien, efektif dan sistematis. Pengelolaan Arsip yang telah dilaksanakan di Bidang Arsip Daerah pada tahun 2010 dan 2011 adalah pengelolaan arsip dinamis aktif dan statis.

Proses/ sistem pengelolaan arsip secara baku di Bidang Arsip Daerah :

1. Mengumpulkan/ menerima arsip in aktif dan statis dari SKPD dilingkungan Pemprov.
2. Melakukan pemilahan arsip.
3. Melakukan pencatatan atau pendeskripsian arsip.
4. Melakukan manuver kartu deskripsi dan fisik arsip.
5. Melakukan penomoran arsip.
6. Membungkus arsip.
7. Membuat DPAS.
8. Menyimpan arsip ke dalam boks.
9. Memberikan nomor boks arsip.
10. Menyimpan boks arsip ke dalam Roll O'Pack.
11. Memasukkan data arsip statis ke dalam jaringan.

**Tabel 2.40**  
**Jumlah Arsip Statis yang dikelola Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara**

**Arsip Statis**

No.	Masalah	Tahun							
		2010		2011		2012		2013	
		Arsip	Boks		Boks	Arsip	Boks	Arsip	Boks
1.	Umum	473	45		22	23	2	70	7
2.	Keuangan	693	135		91	42	8	870	145
3.	Kepegawaian	150	16		8	9	1	-	-

4.	Organisasi dan Hukum	309	19		11	2174	616	-	-
5.	Bina Program	247	29		15	19	4	-	-
6.	Jaringan Jalan Nasional dan Propinsi	575	159		114	175	43	-	-
7.	Laporan	606	85		99	-	-	12	2
8.	Hukum Teknis dan Hubungan Partisipasi	-	-		-	-	-	2798	248
9.	Program	-	-		1	-	-	12	2
10.	Pengawasan	119	14		5	-	-	-	-
11.	Pengawasan Pemanfaatan Jalan	-	-		-	-	-	-	-
12.	Pemerintahan	-	-		-	-	-	-	-
13.	Politik	-	-		-	-	-	-	-
14.	Keamanan dan Ketertiban	-	-		-	-	-	-	-
15.	Kesra	-	-		-	-	-	-	-
16.	Perekonomian	-	-		-	-	-	-	-
17.	Pembinaan	-	-		-	-	-	-	-
18.	Pembinaan	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Usaha Tani	-	-		-	-	-	-	-
20.	Perlindungan Tanaman	-	-		-	-	-	-	-
21.	Penelitian dan Laporan	-	-		-	-	-	-	-
22.	Kesiagaan	-	-		-	-	-	-	-
23.	Produk-Produk Hukum	-	-		-	-	-	-	-
24.	Pengendalian dan Pembinaan	-	-		-	-	-	-	-
25.	Umum dan Perlengkapan	-	-		-	-	-	-	-
26.	Pajak	-	-		-	-	-	-	-
27.	Retribusi dan Pendapatan	-	-		-	-	-	-	-
28.	Pengendalian dan Pengembangan	-	-		-	-	-	-	-
29.	Pengujian	-	-		-	-	-	-	-
Jumlah		3172	502	2793	366	2442	674	3762	404

### 2.3.1.17 Komunikasi dan Informatika

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018, disebutkan bahwa ada 6 (enam) indikator kinerja bidang komunikasi dan informatika, yaitu : (1) Jumlah jaringan

komunikasi; (2) Rasio wartel/warnet terhadap penduduk; (3) Jumlah surat kabar nasional/ lokal; (4) Jumlah penyiaran radio/TV lokal; (5) Website milik pemerintah daerah; (6) Pameran /expo.

Berdasarkan keenam indikator tersebut, maka capaian kinerja pada tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah jaringan komunikasi yang tertuang dalam RPJMD Provsu ditargetkan pada tahun 2014 sebanyak 4 jaringan., yaitu Local Area Network, Fiber Optik, Wireless dan Internet Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2014 target tersebut telah terpenuhi, yakni 4 jaringan. Artinya capaian kinerjanya sebesar 100 %. Kondisi ini jika dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami penurunan, dimana pada tahun sebelumnya jaringan komunikasi yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 5 jenis (Local Area Network, Fiber Optik, Radio Link, Wireless dan VPN-IP/intranet. Hal ini disebabkan jaringan VPN-IP/Intranet tidak difungsikan lagi untuk menginput atau mengakeses data/informasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SPIKD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun demikian, pada tahun 2014 telah terbangun DRC (Data Recovery Center) di Kantor Gubernur Lt. 6. Pada tahun 2015, diproyeksikan jumlah jaringan komunikasi yang ada sebanyak 4 jenis.
2. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk yang tertuang dalam RPJMD Provsu ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 64,64 %. Dalam realisasinya, pada tahun 2014 target tersebut telah dapat terpenuhi sebesar 64,64 %. Artinya capaian kinerjanya sebesar 100 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, capaian kinerja pada indikator rasio wartel/warnet terhadap penduduk mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 8,43 %. Adapun yang menjadi faktor pendorong peningkatan pada indikator ini adalah tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan informasi dan banyaknya pelaku bisnis yang menekuni bidang pengelolaan wartel/warnet di Sumatera Utara.
3. Jumlah Surat kabar nasional pada tahun 2014 yang terpantau dan tercatat sama dengan tahun sebelumnya (2013), yaitu 8 surat kabar. Kondisi ini, juga sama dengan jumlah Surat kabar lokal yang ada, yakni sebanyak 33 Surat kabar. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator jumlah Surat kabar nasional / lokal pada tahun 2014 sebesar 100 %. Pada tahun 2015, diproyeksikan jumlah Surat kabar nasional sebanyak 8 Surat kabar dan 33 Surat kabar lokal.
4. Jumlah penyiaran radio pada tahun 2014 sebanyak 200 radio dan televisi lokal di Sumatera Utara sebanyak 12 televisi. Jumlah tersebut relevan dengan target yang ditetapkan pada RPJMD Provsu, yakni sebesar 200 radio dan 12 televisi lokal. Dengan demikian, maka capaian kinerja untuk indikator jumlah penyiaran radio / televisi lokal sebesar 100 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, maka kondisinya sama. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2015, diproyeksikan jumlah penyiaran radio dan televisi sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 200 radio dan 12 televisi.
5. Website milik pemerintah daerah pada tahun 2014 sebanyak 15 website, terdiri dari 1 website milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 14 website SKPD di lingkungan Pemprovsu. Jumlah ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Provsu, yaitu sebanyak 30 website. Dengan demikian, maka capaian kinerjanya sebesar 50 %. Pada tahun 2015, diproyeksikan website milik pemerintah daerah sebanyak 35 website.
6. Jumlah pameran yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu pada tahun 2014 sebanyak 1 kali dalam setahun, yakni Pekan Raya Sumatera Utara. Jumlah ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD

Provsu sebanyak 4 kali. Dengan demikian, capaian kinerjanya sebanyak 25 %. Pada tahun 2015, diproyeksikan jumlah pameran yang dilaksanakan sebanyak 1 kali.

## 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

### 2.3.2.1 Pertanian

#### a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

Pemerintah telah menetapkan komoditi tanaman pangan utama yang harus mencapai swasembada adalah Komoditi Pajale (Padi, Jagung dan Kedelai). Untuk mengetahui produksi dan produktivitas komoditi utama tersebut di Sumatera Utara dapat dilihat pada **Tabel** di bawah ini :

**Tabel 2.41**  
**Produksi dan Produktivitas Padi, Jagung dan Kedele**  
**Provinsi Sumatera Utara**

No.	URAIAN	Tahun						Pencapaian Target (%) Tahun 2015
		Target 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015*	
1	Produksi Padi (ton)	3.549.371	3.727.250	3.771.545	3.631.039	3.794.985	3.866.492	96,22
2	Luas Panen Padi (ha)	-	742.968	-	717.318	-	753.996	-
3	Produktifitas Padi (kw/ha)	47,70	50,17	49,90	50,62	50,38	51,28	101,48
4	Produksi Jagung (ton pipilan kering)	1.335.970	1.183.012	1.529.636	1.159.795	1.672.076	1.478.584	75,81
5	Luas Panen Jagung (ha)	-	211.750	-	200.603	-	242.208	-
6	Produktifitas Jagung (kw/ha)	55,40	55,87	56,50	57,82	57,30	61,05	102,33
7	Produksi Kedele (ton)	3.645	3.229	14.131	5.705	15.051	6.583	40,37
8	Luas Panen Kedele (ha)	-	3.126	-	5.024	-	5.481	-
9	Produktifitas Kedele (kw/ha)	10,10	10,33	10,50	11,36	10,70	12,01	108,19

Sumber :

\* : Angka Ramalan II Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk ketiga komoditi pada tahun 2015 dari sisi produksi tidak mencapai target yang diharapkan, sedangkan untuk produktivitas telah mencapai target yang diharapkan. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2014 maka pada tahun 2015 mengalami peningkatan untuk produksi, luas panen dan

produktivitas. Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan maka perlu usaha yang lebih intensif seperti pengadaan bibit unggul, penggunaan teknologi tepat guna dan peningkatan sumber daya manusia di sektor pertanian.

#### b. Tanaman Perkebunan

Sumatera Utara merupakan salah satu pusat perkebunan di Indonesia. Komoditi hasil perkebunan yang paling penting dari Sumatera Utara saat ini adalah karet, kelapa sawit, kopi dan coklat. Luas areal tanaman perkebunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2011-2015 berdasarkan pengesahaan (Perkebunan Rakyat, PTPN, PBSN dan PBSA) dapat dilihat pada **Tabel** berikut :

**Tabel 2.42**  
**Luas Areal Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara menurut**  
**jenis komoditi dan pengusahaan Tahun 2011-2015**

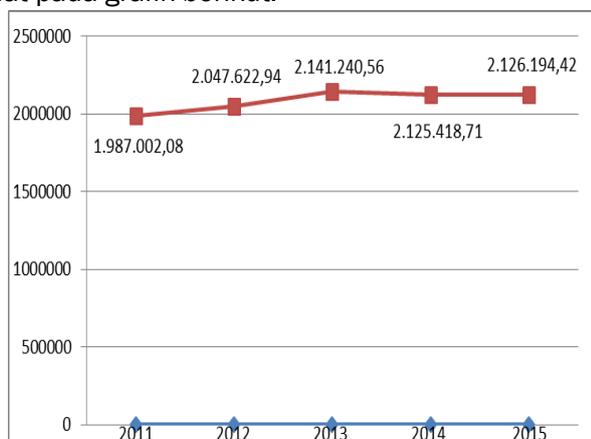
No	Jenis Komoditas	Luas Areal (Ha)				Total Luas (Ha)
		PR	PTPN	PBSN	PBSA	
1	2	3	4	5	6	7
Tahun 2011						
1	Karet	374,234.85	85,632.19	64,053.48	39,824.80	563,745.32
2	Kelapa Sawit	406,999.57	305,435.75	251,489.64	112,323.11	1,076,248.07
3	Kopi Arabika	57,475.49	-	-	-	57,475.49
	Kopi Robusta	20,403.37	-	720.65	-	21,124.02
4	Kelapa	109,052.11	-	1,525.00	1,744.16	112,321.27
5	Kakao	56,913.19	19,503.97	4,005.03	2,303.73	82,725.92
6	Komoditi Perkebunan Lainnya	59,473.25	13,527.07	361.67	-	73,361.99
Jumlah :		1,084,551.83	424,098.98	322,155.47	156,195.80	1,987,002.08
Tahun 2012						
1	Karet	390,951.68	42,403.05	97,897.03	50,425.35	581,677.11
2	Kelapa Sawit	411,843.76	255,764.34	309,955.39	141,169.77	1,118,733.26
3	Kopi Arabika	60,652.60	-	-	-	60,652.60
	Kopi Robusta	20,758.95	-	773.47	-	21,532.42
4	Kelapa	110,114.31	-	1,716.14	1,121.97	112,952.42
5	Kakao	66,220.18	7,759.80	3,062.09	2,686.46	79,728.54
6	Komoditi Perkebunan Lainnya	59,957.94	12,209.39	179.27	-	72,346.59
Jumlah :		1,120,499.42	318,136.58	413,583.39	195,403.55	2,047,622.94
Tahun 2013						
1	Karet	394,113.57	42,317.35	102,132.00	52,700.00	591,262.92
2	Kelapa Sawit	414,915.84	313,070.66	327,581.00	145,885.00	1,201,452.50
3	Kopi Arabika	61,063.35	-	-	-	61,063.35
	Kopi Robusta	20,643.00	-	796.70	-	21,439.70
4	Kelapa	110,457.93	-	1,735.00	1,122.60	113,315.53
5	Kakao	66,623.88	6,782.06	3,096.20	2,696.00	79,198.14
6	Komoditi Perkebunan	60,096.42	13,234.00	178.00	-	73,508.42

No	Jenis Komoditas	Luas Areal (Ha)				Total Luas (Ha)
		PR	P T P N	P B S N	P B S A	
1	2	3	4	5	6	7
Tahun 2011						
	Lainnya					
Jumlah :		1,127,913.99	375,404.07	435,518.90	202,403.60	2,141,240.56
Tahun 2014						
1	Karet	395,017.00	38,501.15	102,238.00	53,299.00	589,055.15
2	Kelapa Sawit	416,475.11	286,627.87	346,009.00	154,187.00	1,203,298.98
3	Kopi Arabika	61,231.44	-			61,231.44
	Kopi Robusta	20,853.81	-	810.00	-	21,663.81
4	Kelapa	110,122.13	-	1,851.00	1,140.00	113,113.13
5	Kakao	64,934.36	-	441.00	-	65,375.36
6	Komoditi Perkebunan Lainnya	60,224.86	11,455.98	-	-	71,680.84
Jumlah :		1,128,858.71	336,585.00	451,349.00	208,626.00	2,125,418.71
Tahun 2015*						
1	Karet	395,124.00	38,529.85	102,238.00	53,299.00	589,190.85
2	Kelapa Sawit	416,552.00	286,529.39	346,009.00	154,187.00	1,203,277.39
3	Kopi Arabika	61,285.00	-	-	-	61,285.00
	Kopi Robusta	20,895.00	-	810.00	-	21,705.00
4	Kelapa	110,130.00	-	1,851.00	1,140.00	113,121.00
5	Kakao	64,965.00	-	441.00	-	65,406.00
6	Komoditi Perkebunan Lainnya	60,753.00	11,456.18	-	-	75,209.18
Jumlah :		1,129,704.00	336,515.42	451,349.00	208,626.00	2,129,129.42

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. 2016

\*) angka sementara

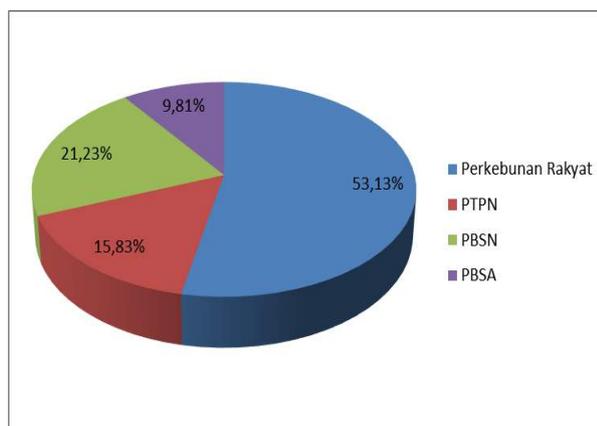
Dari tabel di atas dapat diketahui selama periode 2011-2015 luas areal perkebunan di Sumatera Utara mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1.73 persen per tahun. Untuk tahun 2015 sendiri mengalami peningkatan sebesar 0.04 persen dibanding tahun 2014. Pertumbuhan luas areal perkebunan di Sumatera Utara dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.34

Grafik Pertumbuhan Luas Areal Perkebunan di Sumatera Utara Tahun 2011-2015

Untuk tahun 2015 luas areal perkebunan masih didominasi oleh perkebunan rakyat (PR) seluas 1,129,704.00 hektar atau 53.13 persen dari total luas areal perkebunan di Sumatera Utara seluas 2,126,194.42 hektar.



**Grafik 2.35**  
**Grafik Komposisi Luas Areal Perkebunan di Sumatera Utara**  
**Tahun 2015 berdasarkan Pengusahaan.**

Sementara itu untuk data produksi komoditi perkebunan di Sumatera Utara tahun 2011 - 2015 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 2.43**  
**Produksi Komoditas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015**

No	Jenis Komoditas		Produksi (Ton)				Total Produksi (ton)
			PR	PTPN	PBSN	PBSA	
1	2	3	4	5	6	7	
Tahun 2011							
1	Karet		314,307.12	61,019.47	75,530.10	46,455.33	497,312.02
2	Kelapa Sawit	TBS	5,594,006.50	4,823,524.93	3,107,385.21	1,545,758.03	15,070,674.67
		MS	1,230,681.43	1,061,175.48	683,624.75	340,066.77	3,315,548.43
		IS	167,820.20	192,941.00	124,295.41	61,830.32	546,886.92
3	Kopi Arabika		46,028.03	-	-	-	46,028.03
	Kopi Robusta		8,019.14	-	640.40	-	8,659.54
4	Kelapa		96,044.29	-	1,515.33	1,234.01	98,793.63
5	Kakao		33,792.92	20,357.90	3,984.14	2,543.02	60,677.98
6	Komoditi Perkebunan Lainnya		49,482.81	52,980.02	539.02	-	103,001.85
Jumlah :			6,141,680.81	4,957,882.32	3,189,594.20	1,595,990.39	15,885,147.72
Tahun 2012							
1	Karet		310,266.17	26,843.35	125,866.00	57,877.00	520,852.52
2	Kelapa	TBS	5,511,644.	2,531,276.	4,911,914.	2,483,784.	15,438,619.

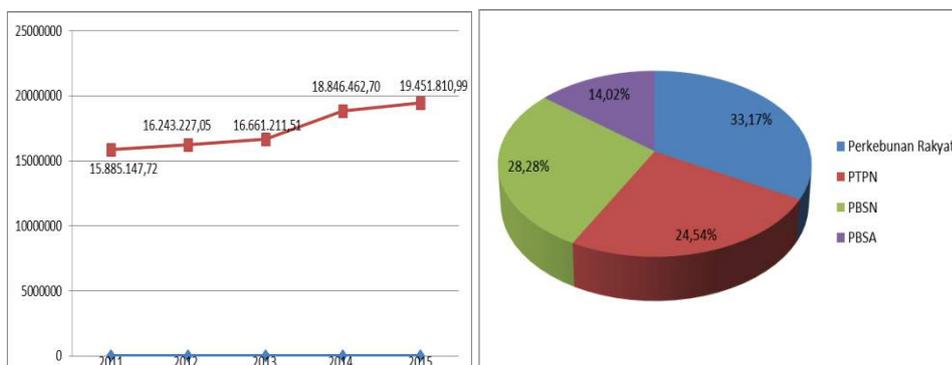
	a		29	00	42	76	47
	Sawit	MS	1,212,561.74	556,880.72	1,080,621.17	546,432.65	3,396,496.28
		IS	165,349.33	101,251.04	196,476.58	99,351.39	562,428.34
3	Kopi Arabika		48,063.49	-	-	-	48,063.49
	Kopi Robusta		8,430.03	-	662.98	-	9,093.01
4	Kelapa		90,359.79	-	1,933.02	1,201.12	93,493.93
5	Kakao		39,800.47	8,810.70	4,198.97	2,872.29	55,682.43
6	Komoditi Perkebunan Lainnya		36,720.27	40,530.85	171.08	-	77,422.20
Jumlah :			6,045,284.51	2,607,460.90	5,044,746.47	2,545,735.17	16,243,227.05
Tahun 2013							
1	Karet		321,099.05	27,240.40	121,469.00	71,428.00	541,236.45
2	Kelapa Sawit	TBS	5,612,066.73	2,540,676.00	5,140,109.83	2,540,070.00	15,832,922.56
		MS	1,234,654.68	558,948.72	1,130,824.16	558,815.40	3,483,242.96
		IS	168,362.00	101,627.04	205,604.39	101,602.80	577,196.23
3	Kopi Arabika		48,646.44	-	-	-	48,646.44
	Kopi Robusta		8,562.54	-	750.00	-	9,312.54
4	Kelapa		91,621.57	-	2,038.00	1,235.00	94,894.57
5	Kakao		41,101.64	8,034.00	4,478.20	2,937.00	56,550.84
6	Komoditi Perkebunan Lainnya		36,649.11	40,811.00	188.00	-	77,648.11
Jumlah :			6,159,747.08	2,616,761.40	5,269,033.03	2,615,670.00	16,661,211.51
Tahun 2014							
1	Karet		332,673.82	36,169.84	119,864.00	71,556.00	560,263.66
2	Kelapa Sawit	TBS	5,745,235.23	4,340,754.16	5,376,885.83	2,654,857.00	18,117,732.22
		MS	1,263,951.75	998,897.54	1,182,914.88	584,068.54	4,029,832.71
		IS	172,357.06	192,556.15	215,075.43	106,194.28	686,182.92
3	Kopi Arabika		49,176.51	-	-	-	49,176.51
	Kopi Robusta		8,887.52	-	776.00	-	9,663.52
4	Kelapa		91,662.47	-	2,146.00	1,349.00	95,157.47
5	Kakao		41,265.77	-	353.00	-	41,618.77
6	Komoditi Perkebunan Lainnya		35,843.39	37,007.16	-	-	72,850.55
Jumlah :			6,304,744.71	4,413,931.16	5,500,024.83	2,727,762.00	18,846,462.70
Tahun 2015*							
1	Karet		334,154.0	34,107.84	119,864.0	71,556.00	560,681.84

			0		0		
2	Kelapa Sawit	TBS	5,875,321.00	4,699,427.16	5,376,885.83	2,654,857.00	18,606,490.99
		MS	1,282,025.00	1,092,587.54	1,182,914.88	584,068.54	4,141,595.96
		IS	183,124.00	188,301.15	215,075.43	106,194.28	692,694.86
3	Kopi Arabika		52,124.00	-	-	-	52,124.00
	Kopi Robusta		11,127.00	-	776.00	-	11,903.00
4	Kelapa		94,856.00	-	2,146.00	1,349.00	98,351.00
5	Kakao		44,315.00	-	353.00	-	44,688.00
6	Komoditi Perkebunan Lainnya		39,337.00	38,255.16	-	-	77,592.16
Jumlah :			6,451,234.00	4,772,790.16	5,500,024.83	2,727,762.00	19,451,810.99

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2016

\*) angka sementara

Produksi komoditi perkebunan di Sumatera Utara selama periode 2011-2015 terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,29 persen per tahun. Sedangkan untuk tahun 2015 sendiri mengalami peningkatan sebesar 3.21 persen dibanding tahun 2014. Penyumbang produksi terbesar berasal dari komoditi kelapa sawit dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS).



Grafik 2.36

Produksi Tahun 2011-2015 dan Persentase Produksi Komoditi Perkebunan di Sumatera Utara Tahun 2015 berdasarkan Pengusahaan

Berikut ini beberapa komoditi utama perkebunan Sumatera Utara :

### 1. Kelapa Sawit

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Riau dalam hal perkebunan kelapa sawit. Sebagian besar luas lahan tersebut merupakan perkebunan rakyat diikuti dengan Perkebunan Besar Swasta Nasional, perkebunan PTPN dan Perkebunan Besar Swasta Asing. Begitu juga jika ditinjau dari produksi, maka produksi terbesar berasal dari perkebunan rakyat diikuti oleh Perkebunan Besar Swasta Nasional, PTPN dan Perkebunan Besar Swasta Asing. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.44

Luas Areal Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2011-2015\*

No	Tahun		Perkebunan Rakyat		PTPN		PBSN		PBSA		Total Luas (Ha)	Total Produksi (ton)
			Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2011	TBS	406,999.57	5,594,006.50	305,435.75	4,823,524.93	251,489.64	3,107,385.21	112,323.11	1,545,758.03	1,076,248.07	15,070,674.67
		MS		1,230,681.43		1,061,175.48		683,624.75		340,066.77	-	3,315,548.43
		IS		167,820.20		192,941.00		124,295.41		61,830.32	-	546,886.92
2	2012	TBS	411,843.76	5,511,644.29	255,764.34	2,531,276.00	309,955.39	4,911,914.42	141,169.77	2,483,784.76	1,118,733.26	15,438,619.47
		MS		1,212,561.74		556,880.72		1,080,621.17		546,432.65	-	3,396,496.28
		IS		165,349.33		101,251.04		196,476.58		99,351.39	-	562,428.34
3	2013	TBS	414,915.84	5,612,066.73	313,070.66	2,540,676.00	327,581.00	5,140,109.83	145,885.00	2,540,070.00	1,201,452.50	15,832,922.56
		MS		1,234,654.68		558,948.72		1,130,824.16		558,815.40	-	3,483,242.96
		IS		168,362.00		101,627.04		205,604.39		101,602.80	-	577,196.23
4	2014	TBS	416,475.11	5,745,235.23	286,627.87	4,340,754.16	346,009.00	5,376,885.83	154,187.00	2,654,857.00	1,203,298.98	18,117,732.22
		MS		1,263,951.75		998,897.54		1,182,914.88		584,068.54	-	4,029,832.71
		IS		172,357.06		192,556.15		215,075.43		106,194.28	-	686,182.92
5	2015	TBS	416,552.00	5,875,321.00	286,529.39	4,699,427.16	346,009.00	5,376,885.83	154,187.00	2,654,857.00	1,203,777.39	18,606,490.99
		MS		1,282,025.00		1,092,587.54		1,182,914.88		584,068.54	-	4,141,595.96
		IS		183,124.00		188,301.15		215,075.43		106,194.28	-	692,694.86

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2016

\*) angka sementara

Dari data tabel di atas diperoleh gambaran bahwa terjadi peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara dari tahun 2011-2015. Dibanding tahun 2011, pada tahun 2015 luas areal kelapa sawit mengalami peningkatan seluas 127,529.32 hektar atau rata-rata 31,882.3 hektar per tahun (2,87 % per tahun).

Sedangkan untuk produksi terus terjadi peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 dengan rata-rata peningkatan sebesar 883,954.08 ton TBS per tahun atau 5.53 % per tahun.

## **2. Karet**

Secara umum kondisi perkebunan karet di Provinsi Sumatera Utara cukup relatif berkembang dengan baik. Berikut ini akan disajikan data luas tanaman dan produksi komoditi karet dari tahun 2011-2015 yang diperoleh dari data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 2.45**  
**Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Karet di Provinsi Sumatera Utara**  
**Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2011-2015**

No	Tahun	Perkebunan Rakyat		PTPN		PBSN		PBSA		Total Luas (Ha)	Total Produksi (ton)
		Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2011	374,234.85	314,307.12	85,632.19	61,019.47	64,053.48	75,530.10	39,824.80	46,455.33	563,745.32	497,312.02
2	2012	390,951.68	310,266.17	42,403.05	26,843.35	97,897.03	125,866.00	50,425.35	57,877.00	581,677.11	520,852.52
3	2013	394,113.57	321,099.05	42,317.35	27,240.40	102,132.00	121,469.00	52,700.00	71,428.00	591,262.92	541,236.45
4	2014	395,017.00	332,673.82	38,501.15	36,169.84	102,238.00	119,864.00	53,299.00	71,556.00	589,055.15	560,263.66
5	2015 *	395,124.00	334,154.00	38,529.85	35,107.84	102,238.00	119,864.00	53,299.00	71,556.00	589,190.85	560,681.84

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2016

\*) angka sementara

Dari data di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan luas areal komoditi karet dari tahun 2011-2015 sebesar 25,445.53 hektar atau rata-rata 6,361.38 hektar per tahun (5,07%/tahun). Sedangkan jika ditinjau dari pengelolaan maka peningkatan luas tanam tersebut didominasi dari perkebunan rakyat, PBSN dan PBSA.

Jika dilihat dari sisi produksi, terjadi peningkatan produksi dari tahun 2011-2015 sebesar 63,369.46 ton atau rata-rata pertahun sebesar 15,842.46 ton (3.06 %/tahun)

### **3. Kakao**

Provinsi Sumatera Utara juga merupakan salah satu daerah penghasil kakao yang terbesar di Indonesia selain dari komoditi kelapa sawit, karet, kelapa serta kopi. Untuk mengetahui perkembangan luas areal dan produksi komoditi kakao di Provinsi Sumatera Utara. maka berikut ini akan disajikan data dari tahun 2011-2015 seperti tersaji dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.46**  
**Luas Areal Tanaman dan Produksi Komoditi Kakao di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pengelolaan dari Tahun 2011-2015**

No	Tahun	Perkebunan Rakyat		PTPN		PBSN		PBSA		Total Luas (Ha)	Total Produksi (ton)
		Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2011	56,913.19	33,792.92	19,503.97	20,357.90	4,005.03	3,984.14	2,303.73	2,543.02	82,725.92	60,677.98
2	2012	66,220.18	39,800.47	7,759.80	8,810.70	3,062.09	4,198.97	2,686.46	2,872.29	79,728.54	55,682.43
3	2013	66,623.88	41,101.64	6,782.06	8,034.00	3,096.20	4,478.20	2,696.00	2,937.00	79,198.14	56,550.84
4	2014	64,934.36	41,265.77	-	-	441.00	353.00	-	-	65,375.36	41,618.77
5	2015	64,965.00	44,315.00	-	-	441.00	353.00	-	-	65,406.00	44,688.00

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. 2015

\*) angka sementara

Dari data di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan luas areal tanaman dari tahun 2011 sampai 2015, tetapi mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014. Terjadi penurunan seluas 17.319,92 Ha atau rata-rata pertahun seluas 4,329.98 hektar (-5.42%/tahun).

Jika dilihat dari sisi produksi, terjadi penurunan produksi kakao dari tahun 2011-2015 sebesar 15.989,98 ton atau rata-rata pertahun 3,997.50 ton (-6.43%/tahun).

Penurunan luas dan produksi komoditas kakao dikarenakan PTPN dan PBSA pada tahun 2014 dan 2015 tidak lagi menanam kakao di lahannya, sedangkan PBSN menurunkan areal pertanamannya.

Sementara itu dari data pertanaman rakyat ternyata masih terdapat areal yang tidak produktif (Tanaman Tidak Menghasilkan) yang membutuhkan peremajaan seluas 71.689,84 Ha. sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 2.47**  
**Luas Areal Perkebunan Rakyat tahun 2013-2014**

No	Komoditas	Luas Tahun 2013			Luas Tahun 2014		
		TBM	TM	TTM	TBM	TM	TTM
1	Karet	56,305.70	297,533.22	40,274.65	57,784.52	297,737.88	39,494.60
2	Kelapa Sawit	62,271.72	348,646.12	3,998.00	58,096.03	354,932.90	3,446.18
3	Kopi Arabika	13,976.37	42,865.63	4,221.35	14,098.26	43,247.48	3,885.70
4	Robusta	1,332.53	12,736.20	6,574.27	1,576.05	12,819.58	6,458.18
5	Kelapa	9,079.15	91,667.84	9,710.94	8,685.60	92,133.89	9,302.64
6	Kakao	16,432.81	46,678.29	3,512.78	16,332.72	45,220.85	3,380.79
7	Cengkeh	564.21	1,839.75	706.03	616.75	1,905.75	645.75
8	Kemenyan	1,141.90	19,378.05	2,354.35	1,205.50	19,410.30	2,282.00
9	Kulit Manis	1,012.63	3,843.77	816.47	1,066.00	3,879.20	767.00
10	Nilam	815.93	439.47	-	832.00	485.00	-
11	Kemiri	917.78	9,215.48	780.59	981.85	9,287.55	698.60
12	Tembakau	1,795.50	1,597.50	-	1,691.00	1,447.00	-
13	Tebu	1,195.00	1,156.00	-	900.00	897.90	-
14	Pala	8.50	92.80	31.00	11.50	102.50	26.70
15	Lada	11.69	110.55	28.39	21.00	119.30	22.40
16	Kapuk	62.55	312.60	80.80	67.55	331.80	72.30
17	Gambir	361.00	1,409.60	217.20	372.00	1,426.60	204.80
18	The	-	-	-	-	-	-
19	Aren	1,171.49	3,250.37	756.72	1,252.66	3,317.50	718.75
20	Pinang	1,107.71	4,124.90	327.18	1,174.90	4,284.80	259.45
21	Vanili	31.00	137.45	28.28	35.60	152.00	20.00
22	Jarak	-	14.50	3.40	1.00	15.00	3.00
23	Kapulaga	6.00	15.70	0.70	8.00	17.50	-
24	Jambu Mete	10.00	5.50	1.40	10.00	6.00	1.00
25	Sereh Wangi	-	-	-	-	-	-
	Total	169,611.17	887,071.29	74,424.50	166,820.49	893,178.28	71,689.84

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2016

### c. Peternakan

#### 1. Ternak Besar

Populasi ternak besar di Sumatera Utara yang meliputi ternak kuda, sapi, kerbau dan sapi perah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dalam **Tabel** di bawah ini :

**Tabel 2.48**  
**Kondisi Populasi Ternak Besar Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara**  
**dari Tahun 2011-2015**

Jenis Ternak Besar	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
Kuda	3.175	3.069	2.133	2.153	2.056
Sapi	456.752	609.951	523.277	654.185	666.496
Kerbau	128.540	131.483	93.966	127.487	117.200
Sapi Perah	932	1.057	1.901	1.184	1.147
<b>Total</b>	<b>589.399</b>	<b>745.560</b>	<b>621.277</b>	<b>785.009</b>	<b>786.899</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

(\*) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, 2016

Jika dilihat secara total dari tahun 2011-2015 jumlah populasi ternak besar sangat fluktuatif. Rata-rata pertumbuhan populasi ternak besar dari tahun 2011 hingga 2015 sebesar 9 % per tahun. Pada tahun 2015 populasi ternak besar mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 sebesar 1.890 ekor. Peningkatan populasi ini terutama terjadi pada ternak Sapi diikuti oleh ternak Kerbau dan Kuda. Sedangkan pada ternak sapi perah mengalami penurunan populasi pada tahun 2015 dibanding tahun 2014 sebesar 37 ekor.

#### 2. Ternak kecil

Kondisi populasi ternak yang dikategorikan kecil di Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada **Tabel** di bawah ini :

**Tabel 2.49**  
**Kondisi Populasi Ternak Kecil Menurut Jenis Ternak Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2011-2015**

Jenis Ternak Kecil	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
Kambing	763.147	781.774	849.487	894.235	883.862
Domba	325.722	374.286	595.517	625.297	620.919
Babi	761.235	866.207	978.717	989.120	1.159.027
<b>Total</b>	<b>1.850.104</b>	<b>2.022.267</b>	<b>2.423.721</b>	<b>2.508.652</b>	<b>2.663.808</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

(\*) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, 2016

Populasi ternak kecil pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 155.156 ekor dibanding tahun 2014. Peningkatan populasi terjadi pada ternak Babi dan Domba sedangkan pada ternak Babi mengalami penurunan populasi pada tahun 2015. Rata-rata pertumbuhan total populasi ternak kecil dari tahun 2011 sampai 2015 sebesar 10 % per tahun.

### 3. Ternak Unggas

Kondisi populasi ternak yang dikategorikan unggas di Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus secara keseluruhan mengalami penurunan. Hal ini dapat kita lihat dalam **Tabel** di bawah ini :

**Tabel 2.50**  
**Kondisi Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak**  
**Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2011-2015**

Jenis Ternak Unggas	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Ayam Ras Petelur	9.060.742	12.055.592	15.704.311	16.383.627	14.962.637
Ayam Ras Pedaging	40.360.663	42.813.178	46.064.412	47.528.611	47.659.709
Ayam Buras	11.963.681	12.073.428	15.545.153	16.475.729	14.190.165
Itik	2.633.909	2.790.326	2.411.989	2.526.035	2.446.864
<b>Total</b>	<b>64.018.995</b>	<b>69.732.524</b>	<b>79.725.865</b>	<b>82.914.002</b>	<b>79.259.375</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

(\*) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, 2015

Populasi ternak unggas pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 3.654.627 ekor dibanding tahun 2014. Peningkatan populasi terbesar pada Ayam Ras Pedaging sebesar 131.098 ekor. Sedangkan rata-rata pertumbuhan populasi ternak unggas dari tahun 2011 sampai 2015 sebesar 6 % per tahun.

Produksi daging/susu/telur di Sumatera Utara Tahun 2011-2015, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.51**  
**Produksi Daging, Telur dan Susu**  
**Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2011-2015**

Jenis Ternak	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Daging (ton)</b>					
Kuda	101,45	100,02	56,79	53,77	54,03
Sapi	18.299,35	24.546,61	18.436,60	22.656,29	23.268,01
Kerbau	4.942,37	7.307,89	3.395,12	4.170,20	4.183,55
Kambing	3.268,71	3.352,55	3.469,81	3.538,23	3.692,50
Domba	1.588,62	1.706,98	1.852,71	1.886,78	1.991,31
Babi	35.787,11	38.221,38	39.211,68	40.907,11	41.377,54
Ayam Ras Petelur	5.231,85	8.501,33	11.074,32	10.463,48	10.551,31

Ayam Ras Pedaging	47.049,23	35.168,26	37.835,60	38.751,75	39.145,92
Ayam Buras	13.430,43	14.314,07	18.435,18	16.647,62	16.828,29
Itik	1.344,18	2.409,35	2.082,10	2.038,90	2.112,21
Itik Manila	0	209,61	269,20	444,65	454,92
Puyuh	0	58,28	72,09	63,79	64,16
Merpati	0	5,03	9,71	10,00	10,14
Kelinci	0	9,65	6,76	7,40	7,91
<b>Jumlah</b>	<b>131.043,30</b>	<b>135.911,00</b>	<b>136.207,69</b>	<b>141.639,97</b>	<b>143.741,80</b>
<b>Telur (ton)</b>					
Ayam Buras	9.776,72	9.866,41	12.703,50	11.471,71	11.596,20
Ayam Ras Petelur	80.590,23	108.018,10	140.710,63	132.949,22	134.065,23
Itik	13.941,70	13.376,82	11.563,08	11.323,16	11.730,27
Puyuh	0	459,37	568,19	502,77	505,72
Itik Manila	0	1.743,56	2.239,27	3.698,64	3.784,12
<b>Jumlah</b>	<b>104.308,65</b>	<b>133.464,26</b>	<b>167.784,66</b>	<b>159.945,50</b>	<b>161.681,54</b>
<b>Susu (ton)</b>	<b>684,48</b>	<b>761,04</b>	<b>1.368,72</b>	<b>783,36</b>	<b>825,84</b>

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provsu, 2016

Dari data di atas menunjukkan bahwa Produksi Daging pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2.101,83 ton dibandingkan tahun 2014. Peningkatan produksi daging lebih didominasi produksi daging Sapi dan diikuti oleh produksi daging Babi, Ayam Ras Pedaging, dan Ayam Buras. Sedangkan untuk ternak Kuda, Kerbau, kambing, Domba, itik, Itik Manila, Puyuh, Merpati, dan Kelinci setiap tahunnya mengalami naik turun (tidak stabil). Disamping itu juga, produksi telur di dominasi oleh produksi telur Itik dimana produksi telur Itik mengalami peningkatan terbesar dibandingkan ternak Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Puyuh, dan Itik Manila. Dimana pada tahun 2015 produksi telur itik mengalami peningkatan sebesar 407.11 dibandingkan tahun 2014. Produksi telur Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Puyuh dan Itik Manila setiap tahunnya mengalami kondisi naik turun. Sedangkan untuk produksi susu pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 42,48 ton atau 5,42 % dibandingkan pada tahun 2014.

#### d. Kontribusi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (ADHK 2010)

Dari data diatas dapat disimpulkan tentang produktifitas dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Sumatera Utara berdasarkan harga konstan. sebagai berikut :

**Tabel 2.52**  
**Produktivitas Bahan Pangan Utama. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHK**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Produktivitas Bahan Pangan (Kw/Ha)					
	- Padi (GKG)	47.62	48.56	50.17	50.62	51,28
	- Jagung	50.71	55.41	55.87	57.82	61,05
	- Kedele	10.01	9.90	10.33	11.36	12,01
2.	Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK 2010)	5,88	5,3	4,71	4,37	5,60
3.	Kontribusi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB 2010)	25,42	24,9	24,5	23,27	22,01

Sumber : - BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)  
 - Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

### 2.3.2.2 Kehutanan

#### a. Luas Kawasan Hutan

Data luas kawasan hutan menurut fungsinya dapat dilihat pada **Tabel** berikut :

**Tabel 2.53**  
**Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Tahun 2006- 2015 (Ha)**

Tahun	Fungsi Hutan			
	Produksi	Lindung	Hutan Konsevasi	Hutan Produksi Dikonversi
2006*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2007*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2008*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2009*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2010*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2011*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2012*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2013*)	1.035.690.00	1.297.330.00	477.070.00	52.760.00
2014**)	1.346.221.88	1.206.881.32	427.007.49	75.684.33
2015	1.346.221.88	1.206.881.32	427.007.49	75.684.33

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

\*) Data berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

\*\*\*) Data berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel di atas menunjukkan adanya perubahan luas kawasan hutan pada fungsi hutan yang berbeda sebagai akibat diterbitkannya SK Menteri Kehutanan Nomor: SK. 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara

(menggantikan SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 47/P/Hum/2011 pada tanggal 23 Desember 2013). Total luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara adalah 3.055.795.02 hektar atau 42.90% dari luas total wilayah (yang sebelumnya seluas 3.742.120 hektar). Terdiri dari Hutan Konservasi seluas 427.007.49 hektar; Hutan Lindung seluas 1.206.881.32 hektar; Hutan Produksi Terbatas seluas 641.769.79 hektar; Hutan Produksi Tetap seluas 704.452.09 hektar dan Luas Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi seluas 75.684.33 hektar.

Hasil hutan baik merupakan hasil utama maupun hasil ikutan dari tahun 20011-2015 dapat dilihat pada **Tabel** berikut :

**Tabel 2.54**  
**Produksi Hasil Hutan Sumatera Utara Menurut Jenis Produksi**  
**Tahun 2011-2015**

Jenis Produksi		Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
A. Hasil Utama							
1.	Log Rimba	M <sup>3</sup>	367.638.30	621.543.83	106.228.77	290.360.00	87.788,610
2.	Log Pinus	M <sup>3</sup>	78.586.89	93.665.92	3.405.48	149.907.27	138.791,990
3.	Kayu Gergajian	M <sup>3</sup>	233.781.35	464.866.105	360.066.032	451.953.94	167.680,771
4.	Kayu Lapis	M <sup>3</sup>	60.427.34	45.417.480	31.467.219	104.704.67	25.185,191
5.	PULP	M <sup>3</sup>	185.403.99	178.676.080	182.436.560	139.618.05	128.509,320
6.	Block Board	M <sup>3</sup>	-	-	-	8.884.54	150,000
7.	Moulding	M <sup>3</sup>	70.047.54	-	52.447.433	-	37.974,183
B. Hasil Ikutan							
1.	Rotan	Ton	65.70	45.00	-	-	
		Batang	-	7.654.00	-	500	
2.	Arang	Ton	-	-	-	-	
3.	Getah Tusam	Ton	518.79	56.27	-	798.52	

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : \*) Batang

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata produksi hasil utama kehutanan yaitu Log Rimba, Log Pinus, Kayu Gergajian, Kayu Lapis, PULP dan Block Board mengalami penurunan. Begitu juga dengan hasil ikutannya pada tahun 2015 tidak ada produksi.

#### **b. Kerusakan Kawasan Hutan**

Lahan kritis adalah bidang tanah yang tidak produktif dan kurang memiliki daya dukung bagi pertumbuhan tanaman hutan. Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya. sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air. pengendali erosi. siklus hara. pengatur iklim mikro dan retensi karbon. Berdasarkan kondisinya vegetasinya. kondisi lahan dapat diklasifikasikan sebagai : sangat kritis. kritis. agak kritis. potensial kritis dan kondisi normal (tidak kritis).

Total luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2015 adalah 6.620.036.86 hektar. dengan tingkat kekritisian lahan sebagai berikut:

- Tidak Kritis : 1.549.264.76 hektar
- Potensial Kritis : 1.749.347.63 hektar

- Agak Kritis : 1.520.973.87 hektar
- Kritis : 1.460.817.50 hektar
- Sangat Kritis : 339.633.10 hektar

Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa lahan dengan kategori potensial kritis memiliki persentase luas terbesar yakni 27% dari total luas lahan kritis atau seluas 1.749.347.63 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa lahan di Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi kritis yang besar. Sedangkan untuk kategori lahan sangat kritis memiliki persentase 5% atau seluas 339.633.10 hektar. Untuk kategori ini memerlukan penanganan rehabilitasi lahan yang sangat prioritas.

### c. Rehabilitasi hutan dan lahan

Rehabilitasi hutan adalah usaha yang dilakukan baik fisik maupun vegetative guna memulihkan nilai dan fungsi hutan serta lingkungannya. akibat mengalami kerusakan dari beberapa macam gangguan. Rehabilitasi lahan adalah upaya memulihkan kondisi dengan penanaman pohon dan konservasi tanah.

Total luas lahan yang telah direhabilitasi pada tahun 2015 adalah 7.216,69 hektar yang terdiri dari rehabilitasi di dalam kawasan hutan seluas 6.883,07 hektar dan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan seluas 333,62 hektar. Kegiatan rehabilitasi di dalam kawasan hutan yang dilaksanakan pada tahun 2015 di Provinsi Sumatera Utara meliputi kegiatan reboisasi adalah seluas 6.883,07 hektar yang terdiri dari : Rehabilitasi Hutan Lahan pada Provinsi/Kabupaten/Kota seluas 22,95 hektar, Penanaman HTI seluas 6.817,40 hektar dan Penanaman Swadaya oleh Kelompok Tani binaan Dinas Kehutanan.

Kegiatan rehabilitasi di luar kawasan hutan yang dilaksanakan pada tahun 2015 di Provinsi Sumatera Utara meliputi kegiatan penghijauan adalah seluas 333,62 hektar yang terdiri dari : Penanaman oleh Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon oleh Organisasi Wanita (SIKIB, PKK, DWP, APPB, DP, KOWANI dan BHAYANGKARA) seluas 0,81 hektar, Penghijauan lingkungan seluas 303,11 hektar, Pengadaan bibit simbolis seluas 7,20 hektar dan pengadaan bibit MPTs seluas 22,50 hektar serta pembuatan 2 Unit Pintu Paluh.

### d. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Konstan selama tahun 2010 - 2012 terjadi penurunan kontribusi, walaupun nilai rupiahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan masih perlunya perhatian terhadap intensitas pengusaha hutan, tanpa melupakan aspek pelestariannya.

**Tabel 2.55**  
**Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK**  
**Tahun 2010- 2014 Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	Kontribusi ADHB		Kontribusi ADHK	
	(Miliar Rp.)	%	(Miliar Rp.)	%
2010	2.736	0,99	1.442	1,21
2011	2.987	0,95	1.451	1,15
2012	3.196	0,91	1.504	1,12
2013	NA	NA	NA	NA
2014	NA	NA	NA	NA
2015	NA	NA	NA	NA

Sumber : Statistic Indonesia , PDRB Menurut Lapangan Usaha 2009-2013

### 2.3.2.3 Energi dan Sumberdaya Mineral

#### 1. Energi Listrik

Sistem ketenagalistrikan SUMBAGUT terdiri dari Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Sistem SUMBAGUT dipasok dari beberapa pembangkit listrik yang pada umumnya berada di Sumatera Utara. Sumber energi primer yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik sistem SUMBAGUT bervariasi dari minyak bumi, gas, batubara, air dan panas bumi.

Tabel 2.56  
Unit Pembangkit di Subsistem Sumatera Utara Tahun 2015

No	Pembangkit	Energi Primer	DMN (MW)
1	PLTU Belawan	Minyak	157
2	PLTGU Belawan	Gas	637
3	PLTG Lot 3 Belawan	Minyak	90
4	PLTMG Sewa PJB Belawan	Gas	10
5	PLTD Sewa Belawan MFO	Minyak	120
6	PLTG Glugur	Minyak	26
7	PLTG Paya Pasir	Minyak	34
8	PLTD Titi Kuning	Minyak	16
9	PLTD Sewa	Minyak	308
10	PLTU Pangkalan Susu	Batubara	400
11	PLTMH Total	Air	32
12	PLTA Sipansihaporas	Air	50
13	PLTA Renun	Air	80
14	PLTU Labuhan Angin	Batubara	120.00
15	PLTA Asahan I (IPP)	Air	180.00
16	PLTP Sibayak	Panas Bumi	10.00
17	Excess Power	Minyak	62.00
18	INALUM	Air	90.00
	<b>TOTAL</b>		<b>2422</b>

(Sumber : UPB PT. PLN Sumatera Utara)

**Tabel 2.57**  
**Pembangkit Terpasang di Subsistem SUMBAGUT Tahun 2015**

No	Lokasi Pembangkit	Kapasitas Terpasang (MW)				
		Energi Fosil		Energi Terbarukan		
		Diesel	Batubara	Air	Panas Bumi	Biomassa
<b>Sektor Belawan</b>						
1	PLTU, PLTGU, PLTD sewa	1284				
<b>Sektor Medan</b>						
2	Glugur	36				
3	Paya Pasir	119				
4	Titi Kuning	25				
5	PLTD Sewa	335				
<b>Sektor Pandan</b>						
6	Sipansihaporas			50		
7	Renun			80		
8	PLTMH tersebar			5		
<b>Sektor Labuhan Angin</b>						
9	Labuhan Angin #1, #2		230			
<b>Sektor Pangkalan Susu</b>						
10	Pangkalan Susu #1, #2		440			
<b>Independent Power Producer (IPP)</b>						
11	Asahan I (#1, #2)			180		
12	PLTM Parlilitan			7,5		
13	PLTM Silau			7,5		
14	PLTM Huta Raja			5		
15	PLTM Karai			8,3		
16	Sibayak #1				10	
17	PLTU Growth Sumatera					11
18	PLTU Growth Asia					20
19	PLTU Rambutan					2
<b>Jumlah</b>		<b>1799</b>	<b>670</b>	<b>343,3</b>	<b>10</b>	<b>33</b>
		<b>2469</b>		<b>386,3</b>		
<b>Total</b>		<b>2855,3</b>				

Sumber : UPB PT. PLN Sumatera Utara

Kapasitas terpasang pembangkit listrik di Provinsi Sumatera Utara yang memasok daya ke sistem SUMBAGUT adalah sebesar 2.855.3 MW. Selain menggunakan bahan bakar terbarukan berupa diesel dan batubara. beberapa pembangkit listrik memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga air. panas bumi dan biomassa. Kapasitas pembangkit berbasis energi fosil dan energi terbarukan masing-masing 2469 MW dan 386.3 MW. Komposisi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yaitu sebesar 13.5 % dari total kapasitas terpasang di Provinsi Sumatera Utara.

Selain Pembangkit Listrik Terpasang yang Memasok Energi Listrik ke Sistem Sumbagut, sumber daya listrik terpasang lain di Sumatera Utara yang dikelola oleh PLN Wilayah Sumut sebesar 7.500 KW yang berasal dari pembangkit listrik PLTM dan 132.000 KW yang berasal dari PLTA. tersebar di 8 lokasi. Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

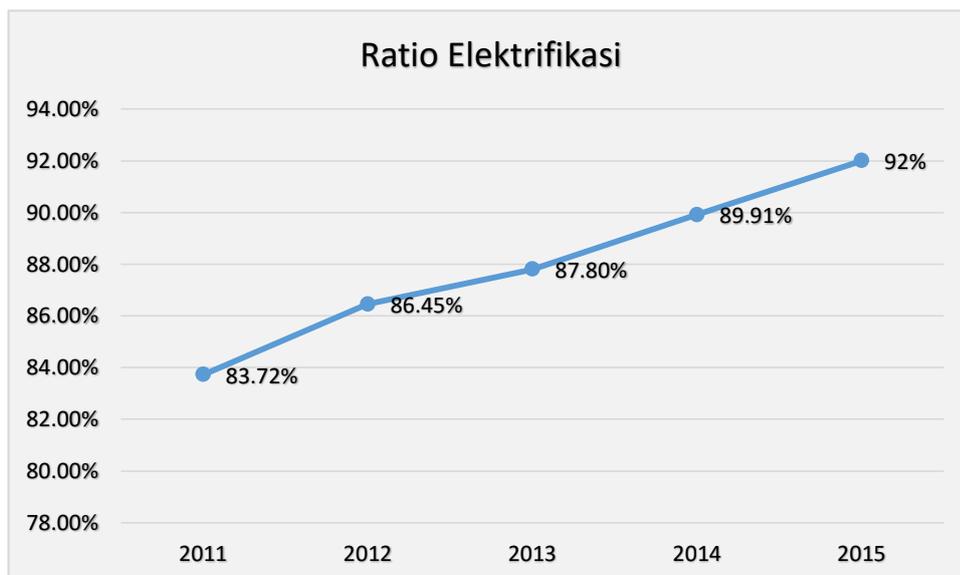
**Tabel 2.58**  
**Inventarisasi pembangkit listrik tenaga air**  
**Yang dikelola PLN PerseroWilayah SumutStatus Tahun 2015**

No.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA / DUSUN	KLASIFIKASI PEMBANGKIT	DAYA TERPASANG (KW)
1.	Simalungun	Tanah Jawa	Tonduhan	PLTM	2 x 200 = 400
2.	Pakpak Bharat	- Kerajaan	Kombih I	PLTM	2 x 750 = 1500
3.	Madina	sda Penyabungan	Kombih II	PLTM	2 x 750 = 1500
4.	Humbahas	- Dolok Sanggul	Batang Gadis	PLTM	2 x 450 = 900
5.	Tap. Utara	- Dolok Sanggul	Silang	PLTM	1 x 750 = 750
6.	Tap. Utara	- Adian Koting	Sibudong	PLTM	1 x 750 = 750
7.	Samosir	sda Pangururan	Raisan I	PLTM	1 x 750 = 750
8.	Dairi	Sumbul	Raisan II	PLTM	1 x 750 = 750
9.	Tap. Tengah	Sibolga	Boho	PLTA Renun	1 x 200 = 200
10.			Silalahi II	PLTA Renun	2 x 41.000 = 82.000
11.			Sibuluan II	PLTA Sipansihaporas	1 x 50.000 = 50.000
			<b>TOTAL</b>	<b>PLTM = 9</b> <b>PLTA = 2</b>	<b>7.500</b> <b>132.000</b>

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provsu

Penyediaan energi listrik di sisi pembangkit sangat terbantu oleh kebijakan PT. PLN (Persero) melakukan sewa pembangkit diesel (455 MW) yang tersebar di sektor Medan dan Belawan. Pada tahun 2015, daya mampu pasok pembangkit listrik cenderung membaik yaitu sebesar 1850 MW. Kondisi ini dikarenakan semakin stabilnya PLTU Pangkalan Susu (440 MW) dan PLTU Nagan Raya Aceh (220 MW).

Beban puncak sistem Sumatera Bagian Utara pada tahun 2014 dan 2015 sudah mencapai masing-masing 1750 MW dan 1800 MW. Pada tahun 2014, kondisi ini tidak dibarengi dengan daya mampu pasok yang hanya sekitar 1500 MW, sehingga terjadi defisit listrik sekitar 250 MW. Pada tahun 2015, daya mampu pasok sudah mencapai 1850 MW sehingga sistem mempunyai cadangan sekitar 50 MW. Kondisi kelistrikan Sumatera Bagian Utara masih jauh dari kondisi ideal yaitu seharusnya memiliki cadangan listrik ideal 30 % dari beban puncak. Apabila beban puncak sistem Sumatera Bagian Utara sekitar 1800 MW maka seharusnya cadangan daya listrik sudah mencapai sekitar 540 MW.



Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provsu

**Grafik 2.38**  
**Grafik Kondisi Ratio Elektrifikasi Tahun 2011 - 2015**

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa ratio elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup baik dari target tahun 2015 sebesar 91,08% tetapi dapat terealisasi sebesar 92%. Ratio elektrifikasi ini dihitung bukan hanya dari pembangkit listrik yang bersumber dari PT. PLN tetapi juga bersumber dari pembangkit yang dibangun oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara.

## 2. Sumber Daya Mineral

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2015 dibandingkan pada tahun 2014 (year on year) meningkat sebesar 5,10 persen. Namun Pertumbuhan tersebut hanya 6.40% disumbang dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

**Tabel 2.59**  
**Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Tahun 2011-2015 (y o y)**

Tahun	Laju Pertumbuhan Pertambangan dan Penggalian (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2011	10.72	6.66
2012	11.9	6.45
2013	26	6.08
2014	5.33	5.23
2015	6.40	5.10

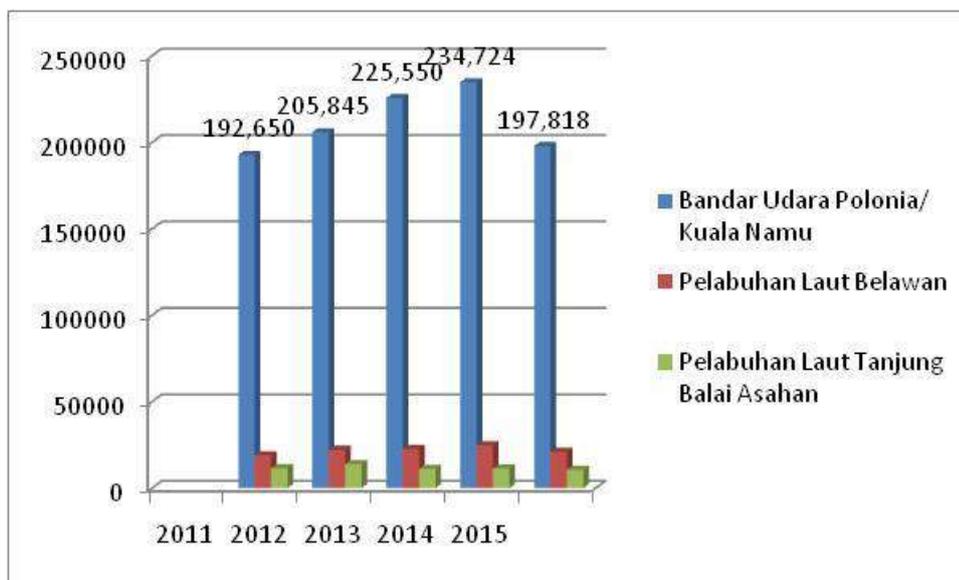
### 2.3.2.4 Pariwisata

Sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPRNAS) Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang menjadi perhatian pemerintah untuk dikembangkan pariwisatanya. Salah satunya adalah Kawasan Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Salah satu faktor pendukung yang berperan penting dalam pengembangan pariwisata adalah aksesibilitas menuju ke daerah wisata yang dirasa masih sangat kurang. Selain itu dukungan masyarakat pariwisata di Sumatera sangat diperlukan untuk peningkatan sektor pariwisata di Sumatera Utara. Berikut ditampilkan jumlah kunjungan wisman ke Sumatera Utara dalam jangka waktu 5 tahun terakhir,

**Tabel 2.60**  
**Wisatawan Mancanegara yang datang Ke Sumatera Utara menurut Pintu Masuk (tahun 2011-2015)**

Tahun	Bandar Udara Polonia/ Kuala Namu	Pelabuhan Laut Belawan	Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan	Jumlah Total
2011	192,650	18,975	11,501	223,126
2012	205,845	22,132	13,856	241,833
2013	225,550	22,631	11,118	259,299
2014	234,724	24,769	11,344	270,837
2015	197,818	20,916	10,554	229,288

Sumber : BPS Prov.Sumatera Utara



**Grafik 2.39**  
**Grafik Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara (tahun 2011-2015)**

Secara kumulatif, selama Januari-November 2015 jumlah wisman yang berkunjung ke Sumatera Utara mencapai 205.193 kunjungan, yang berarti menurun 13,72 persen dibanding jumlah wisman pada periode yang sama tahun 2014. Persentase penurunan tertinggi terjadi di pintu masuk Pelabuhan Laut Belawan yaitu sebesar 14,42 persen, melalui pintu masuk Bandar Udara Kuala Namu Internasional turun 14,06 persen, dan melalui pintu masuk Pelabuhan Laut Tanjungbalai Asahan turun sebesar 4,74 persen.

**Tabel 2.61**  
**Jumlah Hotel Menurut Kelas di Sumatera Utara dari Tahun 2011 – 2015**

No.	Kelas	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Melati	712	712	693	717	N/A
2	Bintang 1	24	24	23	20	N/A
3	Bintang 2	20	23	26	31	N/A
4	Bintang 3	14	18	25	32	N/A
5	Bintang 4	12	11	16	16	N/A
6	Bintang 5	6	7	6	7	N/A
Jumlah		788	795	789	823	N/A

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Pada November 2015, TPK tertinggi terjadi pada hotel bintang 5 yaitu mencapai 60,75 persen, sedangkan TPK hotel terendah terjadi pada hotel bintang 1 yang hanya mencapai 39,88 persen. Jika dibandingkan TPK bulan Oktober 2015 kenaikan terbesar terjadi pada hotel bintang 2 yaitu sebesar 8,70 poin dan hotel bintang 3 naik 4,05 poin. Sedangkan untuk hotel bintang 5 turun sebesar 7,49 poin, hotel bintang 4 turun 2,19 poin dan hotel bintang 1 mengalami penurunan sebesar 1,54 poin.

Rata-rata lama menginap tamu asing bulan November 2015 yang mencapai 1,63 hari, mengalami penurunan 0,32 poin dari rata-rata lama menginap tamu asing bulan November 2014 yang mencapai 1,9 hari. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,06 poin atau naik dari 1,56 hari pada bulan November 2014 naik menjadi 1,62 hari pada bulan November 2015. Secara gabungan, rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia pada bulan November 2015 yang mencapai 1,62 hari, mengalami penurunan sekitar 0,01 poin jika dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia periode yang sama tahun sebelumnya

**Tabel 2.62**  
**Rata-rata Lama Inap Tamu Hotel**  
**(tahun 2011-2015)**

Tahun	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5	Rata-rata Bintang
2011	1.54	1.37	1.86	2.08	1.62	1.69
2012	1.38	1.35	1.47	1.92	1.62	1.55
2013	1.57	1.34	1.39	1.94	1.7	1.59
2014	1.2	1.37	1.8	1.79	1.69	1.57
2015 *)	1.3	1.69	1.62	1.85	1.45	1.58

### 2.3.2.5 Kelautan dan Perikanan

#### a. Perikanan tangkap

Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, Provinsi Sumatera Utara terus berupaya meningkatkan produksi perikanan tangkap untuk dapat dikonsumsi di dalam negeri serta di ekspor ke luar negeri. Tabel berikut ini menyajikan data mengenai perkembangan produksi perikanan tangkap Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2011-2015.

**Tabel 2.63**  
**Kondisi Produksi Perikanan Tangkap**  
**Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2011-2015**

Rincian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Penangkapan di Laut	379.770	391.352	508.360,6	515.325,00	485.165,20
Penangkapan di Perairan Umum	28.979	32.892	46.950,4	50.471,27	112.561,70
<b>JUMLAH</b>	<b>408.748</b>	<b>424.244</b>	<b>555.311</b>	<b>565.796,27</b>	<b>597.337,90</b>

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu, 2016. (Data diolah)

Dari tabel di atas diketahui produksi perikanan tangkap pada tahun 2015 meningkat sebesar 5,57 % dibanding produksi perikanan pada tahun 2014. Dengan rata-rata pertumbuhan produksi perikanan tangkap dari tahun 2011 sampai tahun 2015 sebesar 10,54 %.

#### b. Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 seperti tergambar dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 2.64**  
**Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Tahun 2011-2015**

Rincian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Perikanan Budidaya	126.386,40	143.447	193.750	204.744,20	198.737,1

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu. 2015. (Data diolah)

Dari tabel di atas diketahui bahwa produksi perikanan budidaya pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 2,93 % dibanding produksi tahun 2014. Sedangkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budidaya sebesar 12,83 %.

Sementara itu menurut data volume dan nilai ekspor serta konsumsi ikan/kapita penduduk Sumatera Utara juga mengalami peningkatan.

**Tabel 2.65**  
**Produksi Ekspor, Konsumsi Ikan/Kapita Tahun 2011-2015**

TAHUN	EKSPOR		KONSUMSI IKAN/KAPITA (KG)
	Volume (ton)	Nilai (US \$)	
2011	51.508.65	213.663.776.33	34.66
2012	52.719.29	225.434.288.08	31.92
2013	56.185.92	250.900.694.10	38.95
2014	57.314.05	299.591.121.35	40.10
2015	56.013.02	250.805.264,17	41.30

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu, 2015. (Data diolah)

Volume ekspor perikanan pada tahun 2015 menurun sebesar 1.301,03 ton atau 2,27 % dibanding tahun 2014. Begitu juga untuk konsumsi ikan/kapita tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 sebesar 1.20 kg/kapita atau meningkat sebesar 2.99 %. Naiknya konsumsi ikan/kapita pada masyarakat menjadi indikator kenaikan gizi masyarakat terutama untuk sumber protein.

**Tabel 2.66**  
**Potensi Perikanan Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	Ekspor Ikan (ton / thn)	Produksi ikan (ton / thn)
2011	51.505.65	535.134.60
2012	52.719.29	567.691.10
2013	56.185.92	758.972.69
2014	57.314.05	773.228.8
2015	56.013.02	796.075,0

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provsu, 2015. (Data diolah)

### 2.3.2.6. Perdagangan

- a. Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB

Kontribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB adalah perbandingan antara nilai kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap jumlah PDRB dalam bentuk persentase. Nilai ini menggambarkan seberapa besar peran kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB pada tahun tertentu. Tabel berikut menjelaskan kontribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB untuk tahun 2011-2015 di Propinsi Sumatera Utara.

**Tabel 2.67**  
**Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap ADHK 2010 dan ADHB Tahun 2011 s/d 2015**  
**Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	PDRB (ADHK 2010)	ADHK 2010		PDRB (ADHB)	ADHB	
		(JutaRp.)	%		(JutaRp.)	%
2011	353,147.59	60,589.05	17.16	377,037.08	64,308.77	17.1
2012	375,924.40	65,384.60	17.39	417,120.44	70,891.92	17.0
2013	398,727.14	69,025.20	17.31	469,464.02	78,324.82	16.7
2014	419,573.31	73,817.64	17.59	521,954.96	89,597.00	17.2
2015*	440,955.85	77,037.55	17.47	571,722.01	99,646.14	17.4

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

b. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan adalah Nilai Ekspor suatu daerah selama satu tahun dikurangi dengan jumlah Nilai Impor selama satu tahun. Untuk menggambarkan nilai ekspor bersih perdagangan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2011 s.d 2015 dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.68**  
**Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2011-2015**  
**Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	EKSPOR		IMPOR		Neraca (000 US\$)
	BeratBersih	Nilai FOB	BeratBersih	Nilai CIF	
	(Ton)	(000 US\$)	(Ton)	(000 US\$)	
2011	8.161.003	11.883.268	6.718.063	4.953.462	6.929.806
2012	8.695.942	10.393.936	6.813.898	5.164.751	5.229.185
2013	9.275.859	9.597.907	6.922.414	5.108.737	4.489.170
2014	9.087.526	9.361.110	7.391.305	5.046.514	4.314.598
2015	9.008.220	7.752.786	6.854.082	3.988.411	3.764.377

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

**2.3.2.7. Perindustrian**

Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dari tahun 2011-2015 sangat fluktuatif, bahkan cenderung mengalami penurunan di dua tahun terakhir. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan hanya mencapai 3.52 persen, meningkat dibanding tahun 2014 yang hanya 2,97 persen.

**Tabel 2.69**  
**Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan Berdasarkan ADHK 2010 dan ADHB**  
**Provinsi Sumatera Utara 2011-2015**

Tahun	Kontribusi						Laju Pertumbuhan ADHK
	ADHK 2010			ADHB			
	PDRB (ADHK 2010)	Sektor Industri Pengolahan (Rp. Milyar)	%	PDRB	Sektor Industri Pengolahan (Rp. Milyar)	%	
2011	353,147.59	72,815.22	20.62	377,037.08	79,947.92	21.2	3.22
2012	375,924.40	76,922.41	20.46	417,120.44	86,171.93	20.7	5.6
2013	398,727.14	80,648.61	20.23	469,464.02	93,241.47	19.8	4.84
2014	419,573.31	83,042.09	19.79	521,954.96	104,224.00	19.97	2.97
2015	440,955.85	85,968.40	19.49	571,722.01	30,066.92	20.21	3.52

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah dilihat capaian indikator kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia :

### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus Kemampuan Daerah dapat dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga per-kapita. Nilai tukar petani dan pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan).

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT perkapita)

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Perbulan selama periode tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.70**  
**Angka Konsumsi RT perkapita/bulan Tahun 2009 – 2013**

NO	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Total Pengeluaran RT	432.389	499.694	564.565	599.060	656.133
	a. Pangan	236.917	267.180	316.343	344.467	363.363
	b. Non Pangan	195.472	232.514	248.222	254.593	292.770
2	Jumlah RT	3.027.500	3.037.716	3.083.199	3.131.600	3.168.566
3	Rasio (Pengeluaran RT/ Jumlah RT)	14,28	16,44	18,31	19,13	20,71

Sumber : BPS Sumatera Utara (data diolah)

b. Nilai Tukar Petani

Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Secara konseptual NTP adalah pengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Meskipun NTP belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari kesejahteraan petani, namun NTP sampai saat ini masih merupakan salah satu indikator untuk mengidentifikasi kesejahteraan petani.

Berikut ini disajikan tabel yang memperlihatkan kondisi Nilai tukar Petani Sumatera Utara tahun 2011-2015 :

**Tabel 2.71**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011 s.d 2015**  
**Provinsi Sumatera Utara**

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	138.20	141.49	147.08	112,71	122,73
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	133.64	139.12	147.83	112,62	121,98
3.	NTP	103,42	101,71	99,49	100,08	100,62

Keterangan : \*Desember 2015

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Selama 5 (lima) tahun terakhir atau selama periode 2011-2015 NTP Sumatera Utara tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan pada angka 99-103. Nilai Tukar Petani pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0.44. dan jika dibandingkan dengan kondisi November 2015 juga mengalami kenaikan sebesar 1,09 dari 99,54. Kenaikan Nilai Tukar Petani pada Desember 2015 disebabkan kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian.

c. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

**Tabel 2.72**  
**Persentase Konsumsi RT Non-Pangan**  
**Tahun 2010-2014 Provinsi Sumatera Utara**

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Total Pengeluaran RT Non Pangan	232.51 4	248.22 2	254.59 3	292.77 0	300.33 5
2.	Total Pengeluaran RT	499.69 4	564.56 5	599.06 0	656.13 3	699.26 7
3.	Rasio	46.53	43.97	42.50	44,62	42,95

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Data diolah)

#### 2.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

Capaian Indikator Iklim Berinvestasi dilihat dari lama pengurusan ijin dan kondisi keamanan daerah (angka kriminalitas dan aksi demonstrasi) dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Lama Proses Perijinan

Dalam hal proses perizinan di Provinsi Sumatera Utara telah diterbitkan Peraturan Gubernur no. 55 Tahun 2010. tentang pedoman. tata cara permohonan dan jenis perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal.

Dalam pergub tersebut telah diatur tentang penerbitan perizinan dan non perizinan lama proses nya 10 hari. terkecuali perizinan yang terkait dengan penataan ruang. lingkungan hidup. keamanan. keselamatan dan kesehatan masyarakat atau yang diatur khusus dengan perundang-undangan.

b. Angka kriminalitas

**Tabel 2.73**  
**Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara 2009-2013**

No	Jenis Kriminal	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Kasus Narkoba	2.802	2.718	2.728	2.432	2.713
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	105	130	129	133	118
3	Jumlah Kasus Perkosaan	214	207	113	124	305
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	6.210	6.836	6.971	6.898	7.445
5	Jumlah Kasus Pencurian	9.040	10.355	11.639	10.783	10.797
6	Jumlah Kasus Penipuan	1.707	2.317	2.808	2.316	1.877
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	22	13	31	17	12
8	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	35.336	41.806	47.156	43.234	43.652
9	Jumlah Penduduk	13.201.715	13.339.353	13.103.596	13.215.401	13.326.307
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0.26%	0.31%	0.35%	0.32%	0.33%

Sumber : SUDA 2014

c. Jumlah Demonstrasi

**Tabel 2.74**  
**Jumlah Demo Provinsi Sumatera Utara, 2009 – 2012**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012
1	Bidang Politik	243	193	84	64
2	Ekonomi	82	47	55	211
3	Sosial Budaya	66	279	70	309
4	Kasus Pemogokan Kerja	82	72	60	47
5	Jumlah Unjuk Rasa	473	591	269	631

Sumber : POLDA SUMUT, 2013

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa ada tren peningkatan gangguan keamanan dari tahun 2009 – 2013 dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi dan gangguan kenyamanan berupa aksi demonstrasi yang berakibat negatif terhadap ini daerah ini.

Hal ini perlu diantisipasi dan dukungan dari semua pihak, baik aparat keamanan, maupun masyarakat untuk menjaga agar kondisi keamanan tetap kondusif, sehingga menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya.

### 2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Jika dilihat dari rasio ketergantungan terlihat bahwa terjadi penurunan angka rasio ketergantungan usia tidak produktif, yang menunjukkan semakin baiknya struktur angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel ini memperlihatkan data rasio ketergantungan penduduk di Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 2.75**  
**Jumlah penduduk dan Rasio Ketergantungan**  
**Provinsi Sumatera Utara**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	4.139.648	3.461.930	4.344.275	4.381.084	4.311.313
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	517.226	568.777	509.599	513.793	514.899
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	4.656.874	4.030.707	4.853.874	4.894.877	
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	6.076121	6.379.748	6.105.409	5.950.598	8.500.095
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,76	0,63	0,79	0,82	

Sumber : BPS, 2013

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel rangkuman berikut ini :

**Tabel 2.76**  
**Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah**  
**terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Provinsi Sumatera Utara**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	PDRB ADHB (Rp. Trilyun)	377,04	417,12	469,46	521,95	571,72	554,03	
1.2.	PDRB ADHK (Rp. Trilyun)	353,15	375,93	398,78	419,57	440,95	171,11	
1.3.	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,66	6,45	6,08	5,23	5,90	6,48	
1.4.	Laju inflasi provinsi (%)	3,67	3,86	10,18	8,17	3,24	4,25	
1.5.	PDRB per kapita ADHB (Rp.Juta/Jiwa)	30,31	31,11	34,54	23,99	26,40	40,96	
1.6.	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,42	101,71	99,49	100,08	100,62	102,99	<
1.7.	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,051	0,049	0,045				
1.8.	Persentase penduduk miskin (%)	10,83	10,41	10,39	9,85	10,79	9,31	>
<b>Fokus Kesejahteraan Masyarakat</b>								
1.	<b>Pendidikan</b>							
1.1.	Angka melek huruf (%)	97,32%	97,46%	97,65	97,51	-		-
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,85	8,91	-		-		-
1.3.	Angka partisipasi kasar							-
1.3.1.	PAUD (%)	31,27	35,50	33,87	33,87	-		-
1.3.2.	SD/MI (%)	114,20	104,56	104,56	106,26	-		-
1.3.3.	SMP/MTs (%)	89,83	89,02	89,02	88,55	-		-
1.3.4.	SMA/SMK/MA (%)	72,69	79,69	79,69	80,58	-		-
1.4.	Angka Partisipasi Murni							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
1.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	95,33	91,46	91,46	93,26	-		-
1.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	74,76	67,96	67,96	70,51	-		-
1.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	55,72	57,83	57,83	60,02	-		-
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>							
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi, dilihat dari Angka Kematian Bayi /1000 kelahiran hidup	23,0	23,0	23	22	-		=
2.2.	Angka Kematian Ibu dilihat dari Kematian Ibu Melahirkan/100.000 kelahiran hidup	268,0	250,0	250	285	-		>
2.3.	Angka usia harapan hidup (Tahun)	69,8	72,0	-	69,65	-		>
2.4.	Persentase balita gizi buruk (%)	21,4	20,0	-	22,50	-		=
<b>3.</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>							
3.1.	Rasio penduduk yang bekerja (%)	91,99	93,63	93,80	93,40	-		>
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib</b>								
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>							
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini	31,27	35,50	33,87	33,87	-		-
1.2.	Pendidikan dasar							
1.2.1	APK SD + MI + Paket A	114,20	104,56	104,56	106,26	-		=
1.2.2	APM SD + MI	95,33	91,46	91,46	93,26	-		=
1.2.3	APK SMP + MTs + Paket B	89,83	89,02	89,02	88,55	-		=
1.2.4	APM SMP + MTs	74,76	67,96	67,96	70,51	-		=
1.2.5	APK SMA + MA + Paket C	72,69	79,69	79,69	80,58	-		=
1.2.6	APM SMA	55,72	57,83	57,83	60,02	-		=
1.2.1	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	97,32	97,46	-	97,51	-		>
1.2.2	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,85	8,91	-		-		=
1.3.	Fasilitas Pendidikan:					-		
1.3.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (Unit)				-	-		-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
1.3.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (Unit)				-	-		-
1.4.	Angka Putus Sekolah				-	-		-
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	1.03	0.93		-	-		-
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	4.60	4.14		--	-		--
1.5.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/ /MA (%)	6.21	5.59		-	-		-
1.5.4	Angka Putus Sekolah (APS) SMK (%)	2.15	1.94			-		
1.5.	AngkaKelulusan:				-	-		-
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	205.289	506.881	278,219	286,681	-		-
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	171.304	172.973	242,182	282,212	-		-
1.6.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	76.115	73.393	120,090	117,254	-		-
1.6.4	Angka Kelulusan (AL) SMK	251.134	74.286	93,900	116,884	-		-
1.6.5	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 (orang)	31,27	35,50	33,87	33,87	-		-
1.6.6	S2 (orang)	667	732		-	-		
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>							
2.1.	Angka Kematian Bayi /1000 KLH	23.0	22,0	222	22	-		>
2.2.	Angka Kematian Ibu/100.000/KLH	305	295	285	275	-		<
2.3.	Angka usia harapan hidup (Tahun)	69,6	70,4	71,2	71,30	-		<
2.4.	Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang	21,80	21,20	20,6	20	-		>
2.5.	Rasio posyandu per satuan balita	1:55,71	1:24.68 1		-	-		
2.6.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1:25.33 2	1:24.68 1		-	-		-
2.7.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1:69.91 8	1:67.61 6		-	-		-
2.8.	Rasio dokter per satuan penduduk	1:14.67	1:17,64		-	-		-
2.9.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:25,61	1:29,69		-	-		-
2.10.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100%.		-	-		-
2.11.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	64,20%	86,73%		-	-		-

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
2.12.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	NA	65,78%		-	-		-
2.13.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%		-	-		-
2.14.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100%	100%		-	-		-
2.15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%		-	-		-
2.16.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%		-	-		-
2.17.	Cakupan kunjungan bayi	69,82%	76,82%		-	-		-
2.18.	Cakupan puskesmas	1:25.33 2	1:24.68 1		-	-		-
2.19.	Cakupan pembantu puskesmas	1:6.918	1:7.137		-	-		-
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	<b>40,86</b>	<b>44,11</b>	<b>41,74</b>	<b>43,47</b>	<b>39,04</b>		
3.2.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi sedang (%)	<b>37,99</b>	<b>31,32</b>	<b>24,85</b>	<b>26,13</b>	<b>35,38</b>		
3.3.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak ringan (%)	<b>9,53</b>	<b>13,42</b>	<b>17,00</b>	<b>13,52</b>	<b>8,50</b>		
3.4.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak berat (%)	<b>11,64</b>	<b>11,15</b>	<b>16,41</b>	<b>16,88</b>	<b>17,08</b>		
3.5.	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	<b>40,86</b>	<b>44,11</b>	<b>41,74</b>	<b>43,47</b>	<b>39,04</b>		
3.6.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1: 381	1: 381		-			
3.7.	Panjang jalan dilalui Roda 4 (km)	2.752,0 4	2.752,0 4	3048,50	<b>3048,50</b>	-		
3.8.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) (km)	32.115, 92	33.078, 18	33.078,1 8	<b>33.383, 66</b>	-		
3.9.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )	29,08	38,70	<b>38,25</b>	<b>36,88</b>			

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
3.10.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	39.149	52.199	53.069	52.199	53.330	62.639	<
<b>4.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>							
4.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	=
4.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	-	-	-	-	-	-	=
4.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	1	-	-	-	-	-	=
4.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	1	1	-	-	-	-	=
<b>5.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>							
5.1.	Persentase Penduduk berakses airminum (%)	85	-	-	-	-	-	
5.2.	Penegakan hukum lingkungan (kasus)	-	-	-	-	-	-	
<b>6.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	-	-	-				
6.1.	Rasio KDRT (kasus)	18	17	17	20	-		
6.2.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	57%	57%	60,85 %	56,10 %	-		
<b>7.</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>							
7.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	2,07	3.8	3.8	3.0	-		
7.2.	Jumlah Akseptor KB	405,961	406.638	424.583	2.210.958	-		
7.3.	Cakupan peserta KB aktif	1.429.414	1.367.255	1.463.520	1.423.051	-		
7.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	1.048.191	1.059.065	198.538	1.111.883	-		
<b>8.</b>	<b>Sosial</b>							
8.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (UPT Layanan Sosial)	19	19	19	19	-		
8.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (jenis)	23	23	26	26	-		
8.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (program)	6	6	6	6	-		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
<b>9.</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>							
9.1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	77,10	72,09	69,41		-		.....
9.2.	Pencari kerja yang ditempatkan (org)	52.974	.....			-		.....
9.3.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,43	6,37	6,20	6,00	-		<
<b>10.</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>							
10.1.	Persentase koperasi aktif (%)	58,57	58,60	59,8	56,8	-		.....
10.2.	Jumlah UKM non BPR (Unit)	.....	.....					.....
10.3.	Jumlah BPR/LKM (unit)	95	95					.....
10.4.	Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	.....	2.151.729					.....
<b>11.</b>	<b>Penanaman Modal</b>							
11.1.	<b>Penanaman Modal</b>							
11.2.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	127	123	156	255	221	126	>
11.3.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta)	7.930.256,26	9.165.066,19	13.588.420,60	11.621.593,01	19.863.619,80	12.000.000,00	>
11.4.	Daya serap tenaga kerja (%)	105,04	174,71	120,89	125,24	86,88	113	<
<b>12.</b>	<b>Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta) (%)</b>	3.008.907,99 61,14%	1.234.809,93 15,57%	4.423.354,41 48,26%	(1.966.827,59) -14,47%	8.242.026,79 70,92%	45%	>
12.1.	<b>Ketahanan Pangan</b>							
12.2.	Regulasi ketahanan pangan (Pergub)	-	1	-				
12.2.	Ketersediaan pangan utama							
12.2.	Padi (ton) GKG	3.607.403	3.715.514	3.727.250	3.631.039	3.866.492	3.935.668	<
12.2.	Jagung (ton)	1.294.645	1.347.124	1.183.012	1.159.795	1.478.584	1.697.315	<
12.2.	Kedele (ton)	11.426	5.419	3.229	5.705	6.583	15.578	<
<b>13.</b>	<b>Daging Sapi (ton)</b>	131.043,30	135.911,00	136.207,69	141.639,97	143.741,80	153.239,65	<
23.1.	<b>Statistik</b>							
	Buku Provinsi Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	>
<b>14.</b>	<b>Kearsipan</b>							
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	Ada	Ada	Ada				
<b>15.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi	4	4	4	5	2	2	=
25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	NA	NA	NA	NA	NA	NA	=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
25.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	5/20	5/34	5/34	8/33	8/33	8/33	=
25.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	6/2	15/2	15/2	200/12	200/12	200/12	=
25.5.	Web site milik pemerintah daerah	23	15	15	15	15	35	<
25.6.	Pameran/expo	Tiap tahun	Tiap tahun	Tiap tahun	Tiap tahun	Tiap tahun	4	<
<b>16.</b>	<b>Perpustakaan</b>							
26.1.	Jumlah perpustakaan	31 Kab/ Kota	33 Kab/ Kota	33 Kab/ Kota	33 Kab/ Kota			
26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	589.553	593.834	594.443	99.771			
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	326,170	652.780	679.289	699.204			
<b>Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>								
<b>1.</b>	<b>Pertanian</b>							
1.1.	Produktivitas Padi (kw/ha)	47,62	48,56	50,17	50,64	51,28	50,5	>
1.2.	Produktivitas Jagung (kw/ha)	50,71	55,41	55,87	57,82	61,05	58,2	>
1.3.	Produktivitas Kedele (kw/ha)	10,01	9,90	10,33	11,36	12,01	10,9	>
1.4.	Kontribusi Kategori pertanian, kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%) ADHB 2010	25,42	24,9	24,5	23,27	22,01		
1.5.	Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB	-	-	-	-			
1.6.	Kontribusi sektor perkebunan PDRB	-	-	-	-			
1.7.	Kontribusi sektor peternakan	-	-	-	-			
1.8.	Kontribusi sektor perikanan	2,58	2,53	2,50	-	-		
1.9.	Kontribusi sektor kehutanan	1,21	1,15	1,12	-	-		
<b>2.</b>	<b>Kehutanan</b>							
2.1.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,21	1,15	1,12	-	-		
<b>3.</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>							
3.1.	Kontribusi Kategori pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB ADHB	1,07	1,2	1,4	1,33	1,31	1,36	<
<b>4.</b>	<b>Pariwisata</b>							
4.1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
<b>5.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
5.2.	Produksi perikanan	535.134,60	567.691,00	758.965,69	770.540,47	796.075,00		
5.3.	Konsumsi ikan	34,66	31,92	38,95	40,10	41,30		
<b>6.</b>	<b>Perdagangan</b>							
6.1.	Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB ADHB	17,1	17,0	16,7	17,1	17,20	20,12	<
6.2.	Volume Ekspor (Juta ton)	8,16	8,69	9,275	9,09	9,01		
6.3.	Nilai Ekspor (Milyar US\$)	11,88	10,39	9,597	9,36	7,75		
6.4.	Volume Impor (Juta ton)	6,71	6,81	6,92	7,39	6,85		
6.5.	Nilai Impor (Milyar US\$)	4,95	5,16	5,10	5,05	3,99		
6.6.	Nilai Bersih Perdagangan (Milyar US\$)	6,92	5,29	4,48	4,31	3,76		
<b>7.</b>	<b>Perindustrian</b>							
7.1.	Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHK 2010)	21,2	20,7	19,8	19,9	20,61	22,76	<
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>		<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>						
<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>		<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>						
1.	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>							
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.)	499.694	564.565	599.060	656.131			
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Rp.)	232.514	248.222	254.593	292.770			
1.3.	Produktivitas total daerah							
<b>2.</b>	<b>Pertanian</b>							
2.1.	Nilai tukar petani	103,42	101,71	99,49	100,08	100,62	102,99	
<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>		<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Standar (RPJMD Tahun 2015)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Angka kriminalitas yang tertangani				-	-		
1.2.	Jumlah demo	6.285	.....		-	-		
1.3.	Lama proses perijinan	581	269	631	-	-		
1.4.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha		.....		-	-		
1.5.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa				-	-		
<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>								
1.	<b>Ketenagakerjaan</b>							
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3				-	-		
1.2.	Rasio ketergantungan	0,63	0,79	0,82	-	-		

## 2.5. Ekonomi dan Keuangan Daerah

Secara umum gambaran hasil Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah secara umum dapat dilihat pada **Tabel** berikut :

**Tabel 2.77**  
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi  
Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah / Berkurang	Proyeksi	
			2014	2015		2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PDRB (Harga Berlaku)	Triliun Rp	523,77	571,72	47,95	648,78	739,38
2	PDRB (Harga Konstan)	Triliun Rp	419,65	440,96	21,31	465,85	492,64
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Berlaku Tahun Tertentu	%	11,18	9,53	-1,65	13,48	13,96
4	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan Tahun Dasar 2010	%	5,23	5,10	-0,13	5,65	5,75
5	Tingkat Inflasi	%	8,17	3,24	-4,93	4 ± 1	4 ± 1
6	Struktur PDRB						

	Pendekatan Produksi Atau Lapangan Usaha :						
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	23.27	22.01	-1.262	21.35	20.79
	Pertambangan dan Pengecilan	%	1.32	1.35	0.031	1.46	1.57
	Industri Pengolahan	%	19.97	20.21	0.245	20.17	20.28
	Pengadaan Listrik, Gas	%	0.11	0.10	-0.014	0.09	0.08
	Pengadaan Air	%	0.10	0.10	0.004	0.10	0.10
	Konstruksi	%	13.31	13.61	0.301	14.09	14.53
	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	17.17	17.43	0.263	17.20	16.65
	Transportasi dan Pergudangan	%	4.97	4.99	0.019	5.15	5.39
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	2.35	2.41	0.054	2.46	2.45
	Informasi dan Komunikasi	%	1.97	1.95	-0.025	1.80	1.74
	Jasa Keuangan	%	3.27	3.35	0.081	3.43	3.52
	Real Estate	%	4.37	4.50	0.132	4.61	4.72
	Jasa Perusahaan		0.93	0.96	0.031	0.99	1.03
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	3.61	3.71	0.106	3.73	3.76
	Jasa Pendidikan	%	1.90	1.87	-0.029	1.85	1.83
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	0.88	0.93	0.050	0.98	1.04
	Jasa lainnya	%	0.52	0.53	0.015	0.54	0.54
7	Produktivitas Sektoral yang merupakan Rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap Sektor terhadap jumlah Tenaga Kerja di sektor yang bersangkutan						
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Juta			-	-	-
	Pertambangan dan Pengecilan	Juta					
	Industri Pengolahan	Juta					
	Pengadaan Listrik, Gas	Juta					
	Pengadaan Air	Juta					
	Konstruksi	Juta					
	Perdagangan Besar dan	Juta					

	Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor						
	Transportasi dan Pergudangan	Juta					
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Juta			-	-	-
	Informasi dan Komunikasi	Juta			-	-	-
	Jasa Keuangan	Juta					
	Real Estate	Juta					
	Jasa Perusahaan	Juta			-	-	-
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Juta			-	-	-
	Jasa Pendidikan	Juta			-	-	-
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Juta			-	-	-
	Jasa lainnya	Juta			-	-	-
					-	-	-
8	Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)		1,65		-	-	-
9	Jumlah Penduduk Miskin	Juta Jiwa			-	-	-
10	Tingkat Pengangguran	%	6,08		-	-	-
11	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan :						
	- Pendapatan Perkapita	Rp Juta	29,59		-	-	-
	- Kemampuan Investasi	Rp Triliun	87,11		-	-	-
	- Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index)		0,354		-	-	-
	- Besaran IPM (indeks Pembangunan Manusia)	-	75,57		-	-	-
12	Berbagai Macam Besaran Rasio dan Perbandingan-perbandingan				-	-	-
	- Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,12		-	-	-
	- Biaya Pendidikan, Kesehatan, Penelitian dan sebagainya terhadap PDRB	%	0,15		-	-	-
	- Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB)	%	1,81		-	-	-

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD Tahun 2014-2015.**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun lalu (2014 - 2015), didasarkan pada pencapaian target yang telah ditetapkan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 - 2018 yang merupakan penjabaran tahun ke-tiga dari masa bhakti Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat Kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasi atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun 2017. Selain itu untuk mereview RPJMD dan RKPD, dengan memperhatikan dokumen RKPD tahun 2015. Perkembangan capaian pelaksanaan kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Utara selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2014-2015) adalah sebagai berikut :

### **2.2.1. Evaluasi Kinerja Tahun 2015**

Keberhasilan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah salah satunya dapat dilihat dari capaian Indikator makro pembangunan, baik indikator makro pembangunan sosial, maupun indikator makro pembangunan ekonomi. Salah satu indikator makro pembangunan sosial yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu : meningkatnya derajat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tercapainya kehidupan yang layak.

Selanjutnya, salah satu indikator makro pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan, khususnya kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yaitu : PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi (atas dasar harga Konstan), Pendapatan per Kapita dan Tingkat Inflasi.

**Tabel 2.78**  
**Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2014**  
**Provinsi Sumatera Utara**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
<b>I. Wajib</b>																	
1.	Pendidikan	<b>1.1 Indeks Pendidikan</b>			60												
		1. APK PAUD			112,59											55,67	
		2. APK SD + MI + Paket A	111,4	112,59	92,66		111,4					100				<b>108,11</b>	<
		3. APM SD + MI	92,66	92,66	105,01		92,66					100				<b>96,40</b>	>
		4. APK SMP + MTs + Paket B	101,19	105,01	97,52		101,19					100				96,35	<
		5. APM SMP + MTs	93,29	97,52	89,99		93,29					100				85,90	<
		6. APK SMA + MA + SMK	82,46	89,99	74,57		82,46					100				92,28	<
		7. APM SMA	68,5	74,57	1,54		68,5					100				80	<
		8. Buta Aksara	1,79	1,67	10,07		1,54					86,03				<b>99,77</b>	>
		9. Rata - Rata Lama Sekolah (tahun)	9,66	10,07			9,66					100				12	<
2.	Kesehatan	<b>2.1 Indeks</b>			22												

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		<b>. Kesehatan</b>															
		1. Angka Kematian Bayi (/1000 KLH)	24	23	275		22,0					91,7				19	>
		2. Angka Kematian Ibu (AKI) (100.000 KLH)	295	285	72		250,0					118,0				235	<
		3. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	70,4	71,2	20		72,00					98,9				72	=
		4. Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang (%)	21,20	20,6			20,9					101,4				20	>
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>																
	<b>a. Sumber Daya Air</b>	<b>3.1 . Irigasi (Ha)</b>															
		1. Pemeliharaan (rutin tiap tahun)	80.659	88.725	73.326	72.934	73.326	73.318	80.000	73.318	75.201	90,94	82,64	98,04	103.10	90	<
		2. Perbaikan/ Peningkatan	7.480	8.228	9.051	21.712	6.040	5.599	9.051	10.225	12.062	80,75	68,05	100	55.56	61.86	<
		<b>3,2 Rawa (Ha)</b>															
		1. Pemeliharaan	67.905	74.696	82.166	55.832	61.732	55.232	80.413	55.232	52.832	67,9	74,69	82,16	103.	<b>74,91</b>	<

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		(rutin tiap tahun)													10		
		2. Perbaikan/Peningkatan	4.620	5.590	5.590	41.046	2.604	1.135	5.560	5.560	7.000	56,36	22,33	100	55,56	59,30	<
		<b>3,3 Sungai (m)</b>															
		1. Perkuatan tebing	11.550	12.705	13.976	4.426	12.261	5.814	11.976	4.060	3.090	106,15	45,76	85,68	69,81	41,60	<
		2. Normalisasi/pelurusan	10.495	11.495	12.645	19.469	16.345	42.070	10.000	15.000	36.300	156,41	36,59	79,87	186,45	332,70	>
		3. Pembangunan / Perbaikan tanggul	16.775	18.453	20.298	19.469	17.615	14.430	20.296	14.800	36.300	115,5	78,20	100	186,45	71,09	<
		<b>3,4 Penyediaan Air Baku/Embung (unit)</b>	4	4	4	20	9	7	4	7	1	225,0	175	100	5	175	>
	<b>b. . Bina Marga</b>	<b>4.1 Kondisi Jalan dan Jembatan Bertambah Baik, Pelayanan Lalu lintas menjadi Lebih Baik (km)</b>															
		1. Pembangunan Jalan (Km)	121,00	133,10	146,41	241,54	320,70	208,93	100,55	147,30	203,37	172,67	75,54	100,47	84,20	63,41	>
		2. Penggantian Jembatan (m)	374,00	411,40	452,54	402,74	475,90	599,10	379,00	308,00	612,70	160,19	91,46	68,06	152,13	128,75	>

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9/4)	14=(10/5)	15=(11/6)	16=(12/7)	17=(12/8)	18
		<b>4.2 Berkurangnya Jalan - jalan berlobang</b>	37,90	41,68	45,85	45,00	54,00	7,45	16,80	15,70	20,70	19,70	40,31	34,24	46,00	38,33	<
		<b>1. Pemeliharaan Berkala Jalan (Km)</b>	2.552	2.807,20	3.082,92	3.017,47	3.005,00	2.280,93	2.203,41	2.856,33	2.145,70	89,40	78,49	92,65	71,11	71,40	<
		<b>2. Pemeliharaan Rutin Jalan (Km)</b>	15.015	16.516,50	18.168,15	9.054,28	7.988,04	10.101,93	10.237,16	9.433,10	9.504,28	67,30	61,98	51,92	100,00	113,35	<
		<b>3. Pemeliharaan Rutin Jembatan (m)</b>	121,00	133,10	146,41	241,54	320,70	208,93	100,55	147,30	203,37	172,67	75,54	100,47	84,20	63,41	>
	<b>c. Perhubungan</b>	<b>5.1 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>															
		<b>1. Tersedianya alat keselamatan pelayaran (buah)</b>	-	-	1.680	1.350	500	-	1.472	-	-	-	-	-	-	-	<
		<b>5.2 Meningkatkan Keselamatan</b>															
		<b>1. Tersedianya Rambu Lalu Lintas (buah)</b>	350	500	1.670	1.000	800	190	216	375	1.100	54,29	43,20	22,46	110,00	137,50	<

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9/4)	14=(10/5)	15=(11/6)	16=(12/7)	17=(12/8)	18
		2. Tersedianya Delineator (buah)	1.000	1.900	2.075	4.000	800	545	700	490	3.000	54,45	36,84	23,61	23,33	375,00	<
		3. Tersedianya Guardrail (buah)	1.500	1.000	4.275	4.000	800	745	-	1.550	1.800	49,67	-	56,88	45,00	225,00	<
		4. Tersedianya APILL/ Warning Light (lokasi)	3	5	13	4	5	-	2	1	3	-	40,00	7,69	75,00	60,00	<
		5. Tersedianya Paku Jalan (buah)	-	-	2.085	4.000	96.375	-	1.080	1.005	-	-	-	48,20	-	-	<
		6. Tersedianya Marka Jalan (m)	1.500	2.000	9.487	335.000	915.563	2.080	1.247	1.990	124.500	138,80	62,35	20,98	37,16	13,60	<
		7. Tersedianya LPJU (buah)	-	-	-	45	25	4	-	-	-	-	-	-	-	-	<
		8. Tersedianya Cermin Tikungan (buah)	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
		9. Tersedianya Rambu Perairan (buah)	50	100	100	50	200	-	-	-	20	-	-	-	40,00	10,00	<
		10. Tersedianya	2	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16= (12/7)	17= (12/8)	18
		ZOSS (lokasi)															
	d. Energi Listrik	4.1 Rasio Elektifikasi Desa	-		90		80,85	83,63						90,26	90,26		
		4.1 Rasio elektrifikasi rumah tangga	-		80		78,00	86,45						89,91	89,91		
<b>I.</b>	<b>Pilihan</b>																
1.	Pertanian	1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya															
		a. Padi															
		1. Kebutuhan Konsumsi/Kapita/Tahun (Kg)	132,79	132,12	131,46	-	-	134,00	132,60	130,61	-	100,91	97,22	99,35	-	-	-
		2. Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	1.782,837	1.795,953	1.808,895	-	-	1.755,881,86	1.752,362	1.740,549	-	98,49	97,57	96,22	-	-	-
		3. Ketersediaan Beras untuk dikonsumsi (Ton)	2.111,039	2.159,846	2.209,782	-	-	2.042,665,05	2.158,612	2.338,4762	-	96,76	99,94	105,82	-	-	-
		4. Surplus/Penyakit	328,20	363,89	400,88	-	-		406,25	597,92	-	87,38	111,6	149,1	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9/4)	14=(10/5)	15=(11/6)	16=(12/7)	17=(12/8)	18
		ngga per Tahun (Ton) (4-3)	2	3	7			286.78 3,00	0	7			4	5			
		5. Produksi GKG	3.727.4 13	3.813.5 91	3.901.7 61	3.771.5 45	4.087.42 0	3.607.0 36,00	3.715.5 13	3.727.2 49	3.626.9 68	96,77	97,43	95,53	96,1 7	88,73	<
		6. Luas Panen (Ha)	841.98 0	854.60 9	867.42 8	-	-	757.42 8,00	765.09 9	742.96 8	-	89,96	97,43	85,65	-	-	-
		7. Produktivitas (Kw/Ha)	44,27	44,62	44,98	49,9	51,3	47,62	48,56	50,17	50,64	106,4 8	89,53	111,5 3	101, 48	98,71	<
		8. Luas Tanam (Ha)	859.16 3	872.05 0	<b>885.13</b> <b>1</b>	-	-	757.42 8,00	769.17 4	739.04 0	-	88,16	88,21	83,49	-	-	-
		<b>b. Jagung</b>															
		1. Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	61.492	61.615	61,739	-	-		61.615	60.820			100,0 0	98,51	-	-	-
		2. Kebutuhan (Konsumsi + Industri) per Tahun (Ton)	825.60 9	837,53 4	849.50 4	-	-		873.50 3	904.23 6**	-		104,2 9	106,4 4	-	-	-
		3. Surplus/Penyanga ngga per Tahun (Ton)	194.54 0	217,52 9	241.66 9	-	-		473.62 1	278.77 5	-		217,7 3	108,4 1	-	-	-
		4. Produksi Jagung (Ton)	1.020.1 49	1,055,0 63	1.091.1 73	1.529.6 36	1.831.82 0	1.294.6 45	1.347.1 24	1.183.0 11	1.159.6 98	126,9 1	127,6 8	73,38	75,8 1	63,31	<

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9/4)	14=(10/5)	15=(11/6)	16=(12/7)	17=(12/8)	18
		5. Luas Panen (Ha)	274.632	281,498	288.536	-	-	255.291	243.098	211.750	-	92,96	86,36	147,72	-	-	-
		6. Produktivitas (Kw/Ha)	37,15	37,48	37,82	56,5	59,9	50,71	55,41	55,87	57,82	136,50	147,84	74,15	102,33	96,53	<
		7. Luas Tanam (Ha)	280.237	287,243	294.424	-	-	262.079	253.234	218.319	-	93,52	88,16	108,41	-	-	-
		<b>c. Kedele</b>															
		1. Kebutuhan Konsumsi/Kapita/ Tahun (Kg)	4,447	4,452	4,456	-	-		4,452	4,830				108,39	-	-	-
		2. Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	59.710	60,512	61.316	-	-		4.730	64.532				105,25	-	-	-
		3. Impor/Surplus per Tahun (Ton *)	(19,379)	(14,374)	(9.366)	-	-		689	(61.313)				654,63	-	-	-
		4. Produksi Kedele (Ton)	40.337	46,138	51.950	14.131	16.687	11.426	5.419	3.229	5.705	28,33	11,75	6,22	40,37	34,19	<
		5. Luas Panen (Ha)	34.300	39,200	44.100	-	-	11.413	5.475	3.126	-	33,27	13,97	7,09	-	-	-
		6. Produktivitas (Kw/Ha)	11,76	11,77	11,78	10,5	11,3	10,01	9,90	10,33	11,36	85,12	84,11	87,69	108,19	100,53	>

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9/4)	14=(10/5)	15=(11/6)	16=(12/7)	17=(12/8)	18
		7. Luas Tanam (Ha)	35.000	40,000	45.000	-	-	14.915	5.450	4.175	-	42,61	13,63	9,28	-	-	-
		<b>1.2</b> Produksi tanaman perkebunan (ton) *)															
		1. Perkebunan Rakyat	5.621.653,58	5.766.437,79	5.914.635,24	6.405.697,46	7.090.026,31	5.851.971	6.088.712,25	6.372.946,65	6.456.154,54	104,09	105,59	107,75	100,79	91,06	<
		2. PTPN	5.006.924,07	5.135.602,02	5.267.586,99	-	-	5.372.409	5.222.013,90	2.369.684,25	-	107,30	101,68	44,99	-	-	-
		3. PBSN	4.150.919,94	4.257.598,59	4.367.018,87	-	-	3.484.123	3.259.386,82	5.800.592,56	-	83,94	76,55	132,83	-	-	-
		4. PBSA	1.686.821,24	1.730.172,55	1.774.637,99	-	-	1.838.419	1.688.057,64	2.618.354,65	-	108,99	97,57	147,54	-	-	-
		Jumlah	16.466.618,84	16.889.810,94	17.323.879,09	-	-	16.546.923	16.258.170,61	17.161.578,11	-	100,49	96,26	99,06	-	-	-
		<b>1.3</b> Produksi perikanan															
		1. Produksi		545.72		623.46	760.485,	535.13	567.69	749.06	770.54	98,06	104,0	128,8	123,	101,32	>

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		Perikanan (ton)	545.72 0,36	0,36	581.19 2,19	5,3	09	4,4	1	1	0,47		3	8	59		
		2. Ekspor hasil perikanan (ton)	64.151,19	70.566,31	77.622,94	55.929,9	67.983,18	51.508,65	52.719,29	56.185,92	57.314,05	80,29	74,71	72,38	102,47	84,31	<
		3. Konsumsi ikan (kg/Kapita/tahun)	32,61	34,73	36,98	38,1	46,33	34,66	31,92	38,95	40,10	106,29	91,91	105,33	105,25	86,55	<
		<b>1.4 Produktivitas peternakan</b>															
		1. Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	0,99	1,04	1,10	-	-	-	1,86	2,41	-		178,85	219,09	-	-	-
		2. Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	13.262	14,172	15.142	-	-	-	24.580,65	32.116,4	-		173,45	212,10	-	-	-
		3. Produksi Daging yang diharapkan (Ton)	13.838	15,174	16.640	-	-	16.066	24.546,61	32.170,78	-	116,10	161,77	193,33	-	-	-
		4. Jumlah Pematangan Sapi (Ekor)	74.373	81,558	89.434	-	-	86.347	131.880	172.842	-	116,10	161,70	204,44	-	-	-
		5. Produktivitas (Kg/Ekor)	186	186	186	-	-	186	186,13	186,13	-	100,03	100,07	100,07	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9/4)	14=(10/5)	15=(11/6)	16=(12/7)	17=(12/8)	18
		6. Pemotongan Sapi Lokal (Ekor)	68.896	77,451	86.697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7. Populasi (Ekor)	491.038	521,975	554.859	-	-	480.941	611.008	626.892	-	97,94	117,06	112,98	-	-	-
		1. NTP Peternak	-	-	-	107,32	109,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Daging (Ton)	-	-	-	141.687,22	164.792,09	-	-	-	145.449,71	-	-	-	102,66	88,26	<
		3. Telur (Ton)	-	-	-	139.363,38	162.959,87	-	-	-	159.945,50	-	-	-	114,77	98,15	<
		4. Susu (Ton)	-	-	-	835,17	1.131,67	-	-	-	783,36	-	-	-	93,80	69,22	<
<b>2.</b>	<b>Koperasi dan UMKM</b>																
		1. Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKM dengan laju pertumbuhan rata - rata 10 - 15% per tahun (KUKM)	1.100	1.000	800		800	875							86,36		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja per unit koperasi dan UMKM dengan laju pertumbuhan rata - rata 10% per tahun (Orang)	55.000	50.000	50.000		50.000	45.000					103,64				
		3. Meningkatnya daya saing dan nilai ekspor produk koperasi dan pertumbuhan nilai tambahnya (KUKM)	30	30	30		30	28					100,00				
		4. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi (Koperasi)	1.200	1.200	1.100		1.100	1.000					91,67				
		5. Pemberdayaa	250.00	250.00	250.00		250.000						88,00				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		n usaha Mikro dan Menengah (UMKM)	0	0	0			240,00									
		6. Terbinanya Koperasi dan UKM pada daerah Agropolitan dan Agromarinepolitan (KUKM)	10	10	10		10	10				120,00					
		7. Terbinanya Koperasi pada Desa TP. PKK Provinsi (Koperasi)	5	5				5				120,00					
		8. Peningkatan peran gender dalam Pengembangan KUKM (Orang)	200	200	200		200	190				110,00					
		9. Pembentukan Koperasi Primer (Unit)	200	200	200		200	185				90,00					
		10. Terbinanya UMKM dalam	300	300	300		300	287				90,00					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD (%)				Target capaian kinerja Akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi				Pencapaian Target (%)				Pencapaian s/d Thn 2018 thd RPJMD Tahun 2013-2018 (%)	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (9/4)	14= (10/5)	15= (11/6)	16 (12/7)	17= (12/8)	18
		Sentra (UMKM)															

## 2.2.2 Review Capaian Kinerja terhadap RPJMD

Review capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2014, target yang ingin dicapai pada tahun 2015 dan proyeksi untuk tahun 2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.79**  
**Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
<b>Komitmen Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</b>							
1.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk					Keberadaan rumah ibadah yang tidak merata di daerah	Kemudahan syarat pendirian rumah ibadah
2.	Pelayanan publik yang baik melalui Good Governance dan Clean Government					Masih adanya persepsi lambannya pelayanan aparat pemerintah dan kurangnya daya saing daerah	Penguatan Lembaga perijinan terpadu
		Terbangunnya sistem e-Planning, e-Budgeting, e-Office	-	-	-	Masih adanya isu KKN dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah	Pembentukan LPSE diseluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam mendukung pemberlakuan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
		-	-	-	-	Masih tingginya inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Perda tentang sistem perencanaan dan penganggaran secara terpadu</li> <li>- Pembangunan sistem yang terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran</li> </ul>
							<b>Komitmen Mewujudkan Rakyat tidak lapar</b>
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						
	- Padi (Kw/Ha)	50,17	50,64			Luas tanam belum tercapai	Pencetakan sawah baru
						Produktifitas masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target produksi	Penanaman bibit unggul adaptif
						Irigasi belum optimal	Pembangunan dan perbaikan Irigasi
	- Jagung (Kw/Ha)	55,87	57,82	-	-	Konsumsi masih rendah	Diversifikasi pangan non beras dengan meningkatkan konsumsi jagung
						Luas tanam belum	Tumpang sari dengan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						tercapai	kedele dan lahan kebun TBM
	- Kedele (Kw/Ha)	10,33	11,36	-	-	Luas tanam belum tercapai	Tumpang sari dengan jagung
						Produktifitas masih rendah	Penanaman bibit unggul dan teknologi pertanian
						Bibit unggul masih terbatas	Revitalisasi BBI untuk pengadaan benih
	- Daging (ton)	186,13 (Daging Sapi)	145.449.709 (Total Produksi Daging)	-	-	Ketergantungan impor masih tinggi	Pengadaan bibit ternak sapi untuk menambah populasi
						Populasi masih kurang	Pembangunan Cluster industri pengolahan ternak
						Pengembangan ternak masih terbatas	Integrasi ternak dengan kebun dan hutan (agroforestry)
2.	Kontribusi Kategori pertanian, kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%) ADHK 2010	26,05	24,85	-	-	Anomali iklim makro	Manajemen sistem usaha tani dan maksimalisasi peran BMG
							Komitmen Mewujudkan Rakyat Tidak Bodoh
1.	APK PAUD (%)	NA	-	-	-	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sumatera Utara pada tahun 2010	Pembinaan terhadap Lembaga PAUD di Kabupaten/Kota

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						53,50 persen masih dibawah rata-rata APK PAUD Indonesia yang sebesar 53,70	
2.	APK SD + MI	112,59	-	-	-	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD) di Sumatera Utara sebesar 94,24 masih dibawah rata-rata APK Nasional yang sebesar 95,23	Pemberian bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu
3.	APM SD + MI	92,66	-	-	-		
4.	APK SMP + MTs	105,01	-	-	-	APK SMP/MTs Nasional = 98,11% Hal ini berarti bahwa APK SMP/MTs Sumut lebih tinggi daripada APK SMP/MTs secara Nasional	Pemberian bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu
5.	APM SMP + MTs	97,52	-	-	-		
6.	APK SMA + MA + SMK (%)	89,99	-	-	-	APK SMA/MA/SMK Nasional = 69,6%, yang berarti APK SMA/MA/SMK Sumut lebih tinggi daripada APK SMA/MA/SMK secara Nasional	Pemberian bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan revitalisasi SMK
7.	APM SMA	74,57	-	-	-		
8.	APK Perguruan Tinggi	NA	-	-	-	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di Sumatera Utara pada tahun 2010 sebesar 18,19 persen masih dibawah rata-rata APK Perguruan Tinggi (PT) Nasional sebesar 18,36	Pemberian bea siswa bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang D-I dan D-III

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
9.	Angka Melek Huruf (%)	98,46	-	-	-	Masih terdapat buta aksara usia produktif diatas 15 tahun	Pembelajaran di luar ruang kelas dan peningkatan kesempatan belajar
10.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,07	-	-	-	Target Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun sudah tercapai tetapi perlu ditingkatkan untuk Wajib Pendidikan Dasar 12 Tahun	Perluasan kesempatan belajar formal melalui kemudahan sarana dan prasarana serta tenaga kependidikan
							Komitmen Mewujudkan Rakyat tidak Sakit
1.	Angka kelangsungan hidup bayi (Angka Kematian Bayi)	22	-	-	-	Target sudah tercapai namun AKB masih cukup tinggi di beberapa Kabupaten	Meningkatkan kesehatan ibu pra kehamilan
2.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	265	-	-	-	Beberapa Kabupaten sudah memenuhi target namun masih ada yang AKI tinggi	Meningkatkan layanan kesehatan bagi ibu yang melahirkan
3.	Usia harapan hidup	72,0	-	-	-	Beberapa Kabupaten sudah memenuhi target namun masih ada disparitas	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada kabupaten yang belum memenuhi target
4.	Prevalensi balita gizi buruk dan kurang	20	-	-	-	Target rata-rata sudah tercapai namun masih ada beberapa Kabupaten yang prevalensi balita gizi buruk Sangat Tinggi (didas 30%)	Peningkatan kesehatan bagi ibu pra kehamilan dan selama masa pertumbuhan balita

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
6.	Rasio posyandu per satuan balita	-	-	-	-	Keberadaan Posyandu sudah kurang berperan aktif sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar masyarakat	Revitalisasi posyandu melalui rehabilitasi posyandu dan pemberian insentif bagi tenaga pelayanan kesehatan
7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	-	-	-	-	Kurangnya fungsi pelayanan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	Revitalisasi Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	-	-	-	-	Keterbatasan daya tampung pasien di Rumah Sakit	Pemberian kemudahan bagi pihak swasta dalam mendirikan Rumah Sakit dan pemberian stimulan bantuan melalui Hibah dan Bansos
9.	Rasio dokter per satuan penduduk	-	-	-	-	Kurang meratanya keberadaan tenaga pelayanan kesehatan di daerah disebabkan ketertarikan melayani di daerah perkotaan	Pemberian insentif dan beasiswa bagi tenaga pelayanan kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dan tertinggal.
10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	-	-	-	-		
11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	-	-	-	-	Kurangnya kompetensi SDM Bidan	Pembinaan bidan melalui seminar, workshop, lokakarya dan pelatihan keterampilan
12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	-	-	-	-		
13.	Cakupan Desa/kelurahan	-	-	-	-	Masih terdapatnya kondisi	Pemberian imunisasi,

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
	<i>Universal Child Immunization (UCI)</i>						
14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	-	100%	-	-	balita gizi kurang dan gizi buruk serta pemberian imunisasi yang tidak lengkap	makanan pengganti ASI dan makanan tambahan secara gratis bagi balita melalui Puskesmas, Pustu, Pusling dan Posyandu
15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	-	100%	-	-	Masyarakat kurang memahami gejala penyakit yang diderita dengan cepat sehingga penanganan selalu terlambat	Sosialisasi gejala penyakit penderita TBC BTA dan BDB dan tindak lanjut penanganan dengan pengobatan dasar
16.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	-	100%	-	-		
17.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	-	100%	-	-	Masyarakat miskin yang menerima pelayanan kesehatan rujukan belum tertangani seluruhnya melalui Jamkesmas	Pengalokasian dana Jamkesda bagi masyarakat miskin di luar peserta Jamkesmas, Askes, Asabri dan Jamsostek
18.	Cakupan kunjungan bayi	-	95%	-	-	Kunjungan rutin bayi melakukan imunisasi masih kurang	Pemberian imunisasi dasar secara gratis melalui pelayanan Posyandu dan Puskesmas
19.	Cakupan puskesmas	-	1 : 23.000	-	-	Menurunnya fungsi Pelayanan Dasar Puskesmas, Pembantu Puskesmas	Revitalisasi Puskesmas dan Pembantu Puskesmas
20.	Cakupan pembantu puskesmas	-	1 : 6.700	-	-		

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (%)		70,64	-	-	Rendahnya kemampuan SDM angkatan kerja sehingga kurang memenuhi permintaan kesempatan kerja	Peningkatan kualitas angkatan kerja melalui berbagai pelaksanaan berbagai pelatihan kerja dan pemagangan serta menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan
2.	Pencari kerja yang ditempatkan			-	-	Penempatan angkatan kerja masih belum memenuhi permintaan kesempatan kerja	Pelatihan dan pemagangan para pencari kerja oleh perusahaan pencari pekerja
3.	Persentase koperasi aktif (%)	56,8		-	-	Produktifitas koperasi yang masih rendah serta sumber daya manusia belum mampu untuk aplikasi sistem informasi teknologi khususnya pasar	Pelatihan dan pembinaan Koperasi serta pemberian aksesibilitas permodalan yang murah antara lain dengan skim kredit berbunga murah seperti dengan pendirian Badan layanan Umum Daerah (BLUD) dengan konsep Gramming Bank
4.	Usaha Mikro dan Kecil						
5.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	378	120		123	Penerbitan izin usaha yang masih terpusat di Pusat, selain itu juga daya saing infrastruktur yang rendah	Perlu ada desentralisasi penerbitan izin investasi di daerah serta perbaikan fasilitas infrastruktur khususnya

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
							jalan dan energi
6.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.Juta)	13.588.420,60	10.000.000	11.000.000		Promosi investasi yang masih rendah, serta permasalahan lokasi investasi yang belum jelas (status lahan yang bermasalah)	Promosi investasi harus terus ditingkatkan baik skala internasional maupun nasional, serta komitmen Pemerintah dan DPR untuk segera menerbitkan UU tentang Pertanahan yang baru
7.	Daya serap tenaga kerja (%)	126,18	108	110		Masih rendahnya serapan tenaga kerja	Menyelaraskan kurikulum pelatihan dan pemagangan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja
8.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	4.424.974,41	35 %	40%		Proses perizinan yang masih birokratif, serta status lokasi usaha yang masih belum pasti (sengketa lahan)	Harus terdapat SOP untuk pengurusan izin investasi dan biaya yang jelas untuk pengurusan izin investasi serta ada payung hukum tentang ruang (RTRW Provsu) harus egera selesai diperdakan
9	Nilai Tukar Petani (NTP)	99.49	100.08	-	-	NTP sudah memenuhi target, namun masih ada disparitas ntar kabupaten	Perlu peningkatan SDM petani dengan penyuluhan pertanian dan bantuan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
							permodalan
10	Angka Kemiskinan	10,30	10,2	-	-	Perlu kerja keras untuk menanggulangi Angka Kemiskinan sesuai Target MDG's 2015 sebesar 7,5%	Perlu terobosan untuk perluasan kesempatan kerja dan berusaha
11	Angka Pengangguran	6,5	6,0	-	-	Masih perlu upaya serius untuk mengatasi Angka Pengangguran Terbuka sesuai Target MDG's 2015 sebesar 7%	Perlu terobosan untuk perluasan kesempatan kerja dengan meningkatkan investasi dan peluang usaha produktif
12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,54	76,35	-	-	Target IPM tahun 2009 sudah tercapai, namun disparitas antar Kabupaten masih sangat jauh	Perlu peningkatan pada aspek terkait kesehatan (angka harapan hidup) pendidikan (angka melek huruf dan lama sekolah), dan ekonomi (pengeluaran riil/ perkapita)
							Pengembangan Infrastruktur Wilayah
1.	Tingkat Kemantapan Jalan(%)	68,22	74,42	84,44	89,08	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi topografi yang sangat bervariasi dimana daerah dataran rendah rawan bencana banjir, sedangkan di daerah pegunungan rawan longsor.</li> <li>Di kawasan pegunungan</li> </ul>	Peningkatan alokasi anggaran APBD dan APBN  Peningkatan SDM dan Kelembagaan  Regulasi pembatasan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						<p>dan hutan lindung lebar standar 7 m tidak terpenuhi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tonase kendaraan yang melebihi kapasitas jalan.</b></li> <li>• <b>Pendanaan</b> yang terbatas.</li> <li>• Pelaksanaan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan.</li> <li>• Peralatan kerja yang tidak memadai.</li> <li>• SDM yang terbatas.</li> <li>• <b>Masih terdapat ± 400 Km kondisi jalan permukaan tanah.</b></li> </ul>	berat kendaraan  Peningkatan Peralatan
2.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) (%)	<b>36,88</b>	<b>39,45</b>	<b>48,50</b>	<b>60,00</b>	Kemampuan keuangan yang terbatas sehingga kapasitas jalan dan geometri jalan tidak sesuai dengan standar teknis minimal	Peningkatan bantuan APN untuk penanganan jalan di Kab/Kota
3.	Jaringan irigasi						
	Pemeliharaan Rutin	80.000 Ha	88,773 Ha	86,999 Ha	72.934	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya kondisi irigasi teknis dan semi teknis akibat kerusakan alat ukur dan bangunan irigasi.</li> <li>2. Kondisi jaringan irigasi secara keseluruhan</li> </ol>	Meningkatkan fungsi jaringan irigasi pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/rehabilitasi jaringan irigasi

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						<p>masih banyak yang belum dilengkapi bangunan-bangunan irigasi yang berfungsi sebagai pengatur pembagian air, pengendali kelebihan air dan pengamanan terhadap kerusakan.</p> <p>3. Daerah irigasi di dataran tinggi yang jaringan irigasinya terletak pada lereng-lereng perbukitan rentan terhadap longsor.</p> <p>4. Terbatasnya dana pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rawa.</p> <p>5. Penurunan fungsi jaringan irigasi dan belum lengkapnya dan/telah rusaknya bangunan pengatur sehingga pengalokasian air tidak optimal menaikkan intensitas tanam, saat ini intensitas tanam 115 %.</p> <p>6. Terjadinya alih fungsi lahan pada Daerah</p>	

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						<p>Irigasi menjadi non pertanian.</p> <p>7. Sulitnya pelaksanaan pembebasan tanah untuk kebutuhan infrastruktur SDA.</p> <p>8. Kelembagaan/org asnisasi pemakai air irigasi yang masih lemah dan belum berkembang untuk menunjang sistem pengelolaan irigasi yang berkelanjutan.</p> <p>9. Masih lemahnya pemahaman tentang berbagai kebijakan dan regulasi dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.</p> <p>10. Belum terlaksananya pengelolaan aset irigasi dengan baik yang sangat penting untuk Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)</p> <p>11. Belum aktifnya Komisi Irigasi Provinsi</p>	

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
						Sumatera Utara serta belum terbentuknya Komisi Irigasi kabupaten pada sebagian besar kabupaten di Provinsi Sumatera Utara	
	Perbaikan/Peningkatan	10.225 m	12.062 m	21.711 m	21.712 m		
	Jaringan Rawa						
	Pemeliharaan Rutin	80.413 Ha	55.232 Ha	55.232 Ha	55.832 Ha	1. Terbatasnya dana pengembangan dan pengelolaan Rawa. 2. Terjadinya alih fungsi lahan pada Daerah Rawa menjadi non pertanian setelah dibangun jaringan pengairan 3. Tidak adanya lembaga masyarakat Pengelolaan Jaringan Rawa	Meningkatkan fungsi jaringan Rawa pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/normalisasi/rehabilitasi jaringan Rawa
	Perbaikan/Peningkatan	5.590 m	7000 m	4857 m	4856 m		
	Penanganan Tebing Sungai /Pantai	4.060 m	4.090 m	4.426 m	4.428 m	Terbatasnya dana pengembangan dan pengelolaan Sungai.	Penanganan banjir akibat sudah berkurangnya hutan di daerah hulu sungai
	Normalisasi /Pelurusan Sungai	15.000 m	36.300 m	19.469 m	19.469 m		
	Perbaikan dan pembangunan tanggul banjir	14.800 m	36.300 m	19.469 m	19.469 m		

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN
	Penyediaan Air baku/Embung	4	30	40	10	Terbatasnya dan penyediaan air baku	Penyediaan sarana air baku sebagai kebutuhan dasar masyarakat seiring dengan peningkatan penduduk dan terjadinya krisis air
5.	Rasio elektrifikasi desa	90.25 %	90.26 %	90.42 %	90.60 %	Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi belum mampu terlayani  Potensi energi di Sumut yang belum sepenuhnya dieksploitasi	Pembangunan Pembangkit Listrik Mini Hydro dan PLTS (energi terbarukan)
6.	Rasio elektrifikasi rumah tangga	88.52 %	89.91 %	88.65 %	88.79 %		
7.	Cakupan pelayanan air minum (%)						
8.	Status Mutu Sumber Air Minum	Layak Minum	Layak Minum				

### 2.2.3. Penelaahan terhadap RPJMN dan RKPD Provinsi

Identifikasi permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.80**  
**Identifikasi Kebijakan Nasional**  
**Pemerintah Provinsi Sumatera Utara**

No.	Kebijakan Nasional		
	RPJMN*)	RKPD Provinsi	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra produksi pertanian dan perkebunan;	Peningkatan ketersediaan bahan pangan, dengan kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi bahan pangan dengan sasaran pokok terwujudnya swasembada beras di Sumatera Utara	Revitalisasi UPT dan BBI untuk meningkatkan ketersediaan benih/bibit tanaman pangan, perkebunan dan perikanan dan Gema Pangan
2.	Pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut;	Pengelolaan terpadu perikanan darat dan perikanan laut	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung (kapal, pelabuhan perikanan dan pasar lelang)
3.	Pengembangan industri unggulan;	- Pengembangan industri hilir CPO di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei - Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung berbasis aluminium	
4.	Pengembangan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra industri migas dan lumbung energi nasional;	Pembangunan PLTA Asahan III, dan PLTA Asahan IV	Pembangunan PLTP Sarulla Pengembangan Bio Mass
5.	Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya;	Pengembangan tujuan wisata Danau Toba, dan Kepulauan Nias,	Pengembangan wisata MICE di Kota Medan Pengembangan Geo Park di Danau Toba

6.	Pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan Jaringan Listrik Desa</li> <li>- Pembangunan SHS/PLTS 50 Wp - 100 Wp di Desa Terpencil</li> <li>- Pembangunan PLTS terpusat 15 KW</li> <li>- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)</li> <li>- Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya</li> <li>- Pemasangan Sambungan Listrik Baru Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu</li> </ul>	
7.	Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Jalan Toll se-Sumatera</li> <li>• Pembangunan Jaringan Rel Kereta Api se-Sumatera</li> <li>• Interkoneksi listrik se-Sumatera</li> <li>• Global hub Kuala Tanjung</li> <li>• Bandara Kuala Namu sebagai hub penerbangan nasional/internasional</li> </ul>	
8.	Pengembangan Sumatera sebagai <i>pool</i> angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing regional ASEAN;	Pemberdayaan BLK Dukungan terhadap penciptaan 1 juta pengusaha pemula (12.000)	
9.	Peningkatan program penanggulangan kemiskinan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni</li> <li>• Beasiswa siswa miskin</li> <li>• Jamkesda</li> <li>• Bantuan Sosial</li> </ul>	
10.	Reformasi birokrasi dan tata kelola;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan e-Government melalui system e-Planning, e-Budgeting, e-Office, e-Procurement dan e-Performance</li> <li>• Pencapaian WTP pada Laporan Keuangan Provinsi</li> </ul>	
11.	Pengembangan kawasan perbatasan	Pengembangan daerah terdepan, terluar,	

	sebagai beranda depan wilayah nasional	perbatasan (pulau Berhala)	
12.	Pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.	Pengembangan Taman Nasional Gn. Leuser dan TN Batang Gadis Penataan kawasan industri berbasis lingkungan	
13.	Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Sumatera. diarahkan untuk : - Mengendalikan pengembangan kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya; - Menjaga kelestarian pengembangan ekosistem Kawasan Danau Toba	- Pengembangan PKN Kawasan Mebidang-ro - Pembentukan kelembagaan Mebidang-ro - Pengembangan Kerjasama Pembangunan di KSN Mebidangro - Pengembangan KSN Danau Toba berbasis lingkungan	
	- Mendukung pengembangan Sumatera Utara sebagai salah satu sentra produksi pertanian dan perkebunan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet	• Pengembangan Cluster Industri CPO • Pengembangan Kawasan Peternakan • Pengembangan produk unggulan daerah (PUD) • Penyusunan Masterplan Kawasan Pertanian	
14.	Penanggulangan Pasca Bencana Kepulauan Nias	Pengembangan <i>Regional Management</i> dan kerjasama sektor produksi unggulan di Kepulauan Nias	
15		- Pengembangan <i>Regional Management Lake Toba</i> di kawasan Danau Toba - Pengembangan infrastruktur wilayah permukiman di daerah-daerah tertinggal. seperti Pakpak Bharat. Tapanuli Tengah.	

		Nias. Nias Selatan. Nias Barat. dan Nias Utara	
--	--	--	--

Keterangan :

\*) Kebijakan Nasional terhadap Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam RPJMN-2010-2014

#### **2.2.4. Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD**

Pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD tahun 2014. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2015 berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Rangkuman hasil inventarisasi terhadap pokok-pokok pikiran/hasil reses DPRD tersebut dapat dilihat pada tabel lampiran yang tidak terpisahkan.

#### **2.3. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah**

Identifikasi permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dapat disimpulkan berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.81**  
**Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas**  
**Provinsi Sumatera Utara**

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>			
1.1.	Angka melek huruf	>	1. Realisasi peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan (guru, siswa, prasarana, sistem) yang menjabarkan UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Kualitas SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang masih terbatas. 3. Kapasitas lembaga pendidikan kejuruan/pelatihan keterampilan yang relatif rendah	1. Penguatan dan pengawasan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi dan berbasis lokal 2. Penerapan pendidikan berbasis karakter bagi pendidik dan peserta didik 3. Keberadaan sarana dan prasarana yang layak dan memadai serta terjangkau sesuai kebutuhan di tiap jenjang pendidikan 4. Alokasi dana pendidikan yang terus meningkat untuk membiayai program dan kegiatan prioritas bidang pendidikan
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	>		
1.3.	Pendidikan dasar 9 tahun	>		
1.4.	Angka partisipasi sekolah	>		
1.5.	Angka partisipasi kasar	>		
1.6.	Angka partisipasi murni	>		
1.7.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	=		
1.8.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	=		
1.9.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	>		
1.10.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	<		
1.11.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	<		
1.12.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<		
1.13.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	<		
1.14.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	<		
1.15.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	<		
1.16.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	<		
1.17.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	<		
1.18.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	<		
1.19.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.20.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	<		
1.21.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	<		
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>		<p>1. Derajat Kesehatan masih rendah yang ditunjukkan dengan masih tingginya Angka Kematian Bayi, Angka Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang dan Angka Kematian Ibu melahirkan.</p> <p>2. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat</p>	<p>1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di seluruh bidang pelayanan</p> <p>2. Universal coverage pelayanan kesehatan gratis melalui Jamkesda dan Jampersal</p> <p>3. Kesejahteraan tenaga pelayan kesehatan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan terluar</p>
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	>		
2.2.	Angka usia harapan hidup	<		
2.3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	>		
2.4.	Persentase balita gizi buruk	<		
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>			
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	<	1. Kerusakan sarana dan prasarana transportasi, kapasitas bandara dan pelabuhan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan alokasi anggaran</li> <li>- Peningkatan SDM dan kelembagaan</li> <li>- Peningkatan peralatan</li> </ul>

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. saluran irigasi/rawa, jaringan pengairan lainnya, air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai	- Meningkatkan fungsi jaringan irigasi pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/ rehabilitasi jaringan irigasi
			3. Ketersediaan pasokan energi terbarukan dan penggalan sumber energi baru	- Meningkatkan fungsi jaringan Rawa pada kewenangan Provinsi melalui perbaikan/ normalisasi /rehabilitasi jaringan Rawa
			4. Pemantapan dan efektifitas jalan raya (jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota).	- Penanganan banjir akibat sudah berkurangnya hutan di daerah hulu sungai
3.2.	Rasio jaringan irigasi	<		- Penyediaan sarana air baku sebagai kebutuhan dasar masyarakat seiring dengan peningkatan penduduk dan terjadinya krisis air
3.3.	jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum			
3.4.	persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	<		
3.5.	Panjang jalan dilalui Roda 4	<	5. Realisasi pembangunan jalan lingkaran luar ( <i>Outer Ring Road</i> ) Danau Toba.	
3.6.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	<		
3.7.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )	<	6. Realisasi pembangunan jalan Tanjung Morawa-Saribudolok-Tongging (Rawasaring).	
3.8.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)	<	7. Realisasi pembangunan kawasan Mebidang-Ro	
<b>4.</b>	<b>Perumahan/Permukiman</b>			
4.1.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	=		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>5.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>			
5.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	=		
5.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	=		
5.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	=		
5.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	=		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Perhubungan</b>			
6.1.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	<	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Status Pelabuhan Laut Pengumpulan Regional belum sepenuhnya diserahkan oleh Kemenhub (Kepmenhub No.KM.313/2013)</li> <li>2. Kelengkapan dokumen pendukung (Kepmenhun No.1 /2006)</li> <li>3. Pengembangan Terminal Angkutan Jalan yang belum sesuai dengan arahan RTRW (batal dilaksanakan )</li> <li>4. Pembangunan fasilitas terminal VIP Bandara Kualanamu</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen Pemerintah Pusat</li> <li>- Kelengkapan dokumen perencanaan (FS/DED) oleh Pemda</li> <li>- Keseuaian usulan pembangunan dengan Dokumen RTRW</li> <li>- Pembebasan lahan</li> </ul>
<b>7.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak</b>			
7.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	< 5,44	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya peran aktif perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta</li> <li>2. Menimnya Perlindungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berjalanya fungsi kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) di lembaga pemerintahan</li> </ol>
7.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	< 17 %		
7.3.	Rasio KDRT	< 20		
7.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	=		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	56,10 %	hak perempuan dan anak di seluruh sektor	dan swasta 2. Kerjasama yang terintegrasi aparat penegak hukum dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak
7.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	= 356		
<b>12</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>		1. Laju pertumbuhan penduduk terus meningkat tanpa terkendali 2. Minimnya minat pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta aktif KB	1. Slogan “Dua Anak Lebih Baik” menjadi keinginan setiap pasangan rumah tangga 2. Dasar pemahaman yang kuat akan pentingnya ber-KB
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	= 3,0		
12.2.	Rasio akseptor KB	= 51,7 %		
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	= 64,36 %		
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	= 34,14 %		
<b>13</b>	<b>Sosial</b>		1. Keberadaan prasarana dan sarana panti pemerintah dan swasta yang memprihatinkan 2. Bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial yang minim	1. Rehabilitasi rutin dan berkala panti pemerintah dan swasta 2. Penyandang masalah kesejahteraan sosial memperoleh pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal
13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	= 20		
13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan social	= 26		
13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	= 26		
<b>14</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>			
14.1.	Rasio penduduk yang bekerja	=	1. Rendahnya serapan	1. Berjalannya fungsi BLK
14.2.	rasio ketergantungan	=		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.3.	Kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3)	<	angkatan kerja	dalam menghasilkan tenaga kerja siap pakai berkualitas
14.4.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	>	2. Rendahnya kualitas tenaga kerja	2. Kerjasama yang sinergi dan terintegrasi antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Lembaga Penyedia Tenaga Kerja
<b>15</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>			
15.1.	Persentase koperasi aktif	<	Produktifitas koperasi yang masih rendah serta sumber daya manusia belum mampu untuk aplikasi sistem informasi teknologi khususnya pasar	Pelatihan dan pembinaan Koperasi serta pemberian aksesibilitas permodalan yang murah antara lain dengan skim kredit bunga murah seperti dengan pendirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan konsep Gramming Bank
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	<		
15.3.	Jumlah BPR/LKM	<		
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil	<		
<b>16</b>	<b>Penanaman Modal</b>			
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	<	- Penerbitan izin usaha yang masih terpusat di Pusat, selain itu juga daya saing infrastruktur yang rendah - Promosi	- Perlu ada desentralisasi penerbitan izin investasi di daerah serta perbaikan fasilitas infrastruktur khususnya jalan dan energi
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	>		
16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	<		
16.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.5.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	<	investasi yang masih rendah, serta permasalahan lokasi investasi yang belum jelas (status lahan yang bermasalah)	- Promosi investasi harus terus ditingkatkan baik skala internasional maupun nasional, serta komitmen Pemerintah dan DPR untuk segera menerbitkan UU tentang Pertanahan yang baru
16.6.	Angka kriminalitas			
16.7.	Jumlah demo	<		
16.8.	Lama proses perijinan	<		
16.9.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	<		
<b>17.</b>	<b>Kebudayaan</b>			
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	<	Pagelaran/pertunjukan seni budaya masih terbatas	Fasilitas pendukung gedung pertunjukan belum memadai
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	<		
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	<		
<b>18.</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>			
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	<	1. Minimnya Data dan informasi organisasi pemuda dan olahraga 2. Minimnya prestasi	1. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kondisi dan keberadaan
18.2.	Jumlah organisasi olahraga	<		
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	<		
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga	<		
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	<		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.6.	Lapangan olahraga	<	olahraga disebabkan prasarana dan sarana olahraga yang tidak mendukung	organisasi pemuda dan olahraga serta prasarana dan sarana olahraga 2. Ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang memadai guna memacu prestasi olahraga
<b>19</b>	<b>Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri</b>			
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	<	1. Minimnya jumlah aparat keamanan swadaya masyarakat dan prasarana pendukung	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan lingkungan tempat tinggal
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	<		
<b>20</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>			
20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	<	2. Minimnya jumlah aparat keamanan swadaya masyarakat dan prasarana pendukung	2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan lingkungan tempat tinggal
20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	<		
20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	<		
20.4.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	<		
<b>22</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>			
22.1.	Regulasi ketahanan pangan	=	1. Masih berlanjutnya alih fungsi lahan sawah	1. Optimalisasi pemanfaatan irigasi yang ada serta perbaikan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>2. Menurunnya kualitas kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan</p> <p>3. Terbatasnya penyediaan air bagi budidaya beberapa komoditas pangan pokok dan strategis</p> <p>4. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi (terutama pupuk bersubsidi dan benih bersertifikat) yang belum tepat</p> <p>5. Terbatasnya fasilitas permodalan di pedesaan dan meningkatnya suku bunga Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang berdampak kepada terbatasnya penerapan teknologi</p>	<p>dan pembangunan jaringan irigasi baru dan penghentian alih fungsi lahan melalui penetapan aturan-aturan yang dilandasi hukum</p> <p>2. Pengembangan konservasi dan rehabilitasi lahan agar potensi lahan yang ada dapat dipertahankan terutama di wilayah usaha berbasis pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan dengan menerapkan teknologi konservasi dan rehabilitasi</p> <p>3. Peningkatan dan penanganan teknologi pasca panen untuk memperoleh efisiensi dan kualitas produksi pertanian</p> <p>4. Penyediaan sarana produksi dan permodalan</p>

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			6. Belum optimalnya penannnganan panen dan pasca panen yang berpotensi mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup besar	secara tepat sehingga bermanfaat untuk petani bagi meningkatkan produktivitas hasil
			7. Cukup tingginya jumlah penduduk miskin yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan. Hal ini diakibatkaqn oleh rendahnya keterampilan, akses permodalan dan lapangan kerja	5. Penguatan kelembagaan dan system penyuluhan bagi para petani sehingga terjadi penerapan paket teknologi untuk meningkatkan produktivitas hasil 6. Mengurangi rasio ketergantungan terhadap impor dan pemasukan bahan pangan dari provinsi lain guna kebutuhan masyarakat 7. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat yang menghadapi masalah pangan
22.1.	Ketersediaan pangan utama	=		
<b>24</b>	<b>Statistik</b>			
24.1.	Buku "Provinsi Dalam Angka"	=		
24.2.	Buku "PDRB kabupaten"	<		
<b>25</b>	<b>Kearsipan</b>			
25.1.	Pengelolaan arsip secara baku	=	1. Minimnya keberadaan arsip daerah	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	=	2. Minimnya kemampuan SDM arsiparis	pentingnya arsip daerah 2. Tata kelola arsip yang tertib dan teratur
<b>26</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>		1. Prasarana dan sarana media informasi baik cetak maupun elektronik belum menjangkau seluruh lokasi di daerah	1. Informasi tersampaikan ke seluruh daerah melalui media cetak dan media elektronik
26.1.	Jumlah jaringan komunikasi	=		
26.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	=		
26.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	=		
26.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	=		
26.5.	Web site milik pemerintah daerah	=		
26.6.	Pameran/expo	=		
<b>27.</b>	<b>Perpustakaan</b>		1. Jumlah perpustakaan dan koleksi buku yang ada belum memenuhi kebutuhan masyarakat	1. Tersedianya perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai dengan kerjasama TP PKK melalui desa binaan
27.1.	Jumlah perpustakaan	<		
27.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	<		
27.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	<		
<b>B.</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>			
<b>1.</b>	<b>Pertanian</b>			
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		1. Peningkatan produktivitas tidak dibarengi dengan peningkatan luas panen (untuk padi dan kedele) 2. Terjadinya	1. Revitalisasi pertanian mendukung peningkatan produksi dalam menjaga stabilitas pangan dan mensukseskan swasembada
	1.1.1. Padi (Ton)	>		
	1.1.2. Jagung (Ton)	>		
	1.1.3. Kedele (Ton)	<		
1.2.	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	>		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	>	konversi lahan pertanian produktif 3. Anomali iklim yang mempengaruhi pola tanam 4. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi (terutama pupuk bersubsidi dan benih bersertifikat) yang belum tepat	pangan 2. Peningkatan mekanisasi pertanian 3. Pengadaan bibit/benih unggul 4. Peningkatan sarana dan prasarana (Pembangunan jalan produksi, irigasi)
1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	>		
1.5.	Nilai tukar petani	>		
<b>2.</b>	<b>Kehutanan</b>			
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis			
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan			
2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	<		
<b>3.</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>			
3.1.	Pertambangan tanpa ijin	<	Penerapan prinsip eco environmental telah menjadi rujukan untuk perijinan tambang	Pembuatan Perda Larangan bagi para PETI untuk beroperasi serta adanya zonasi bagi operasional Legal yang diperbolehkan dan dimasukkan dalam RTRWP/RTRWK
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	<		
<b>4.</b>	<b>Pariwisata</b>			
4.1.	Kunjungan wisata	<	1. Infrastruktur	Pembangunan/per

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	>	belum memadai menuju destinasi 2. Destinasi wisata masih monoton	baikan jalan menuju objek wisata ditingkatkan
<b>5.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>			
5.1.	Produksi perikanan (ton)	<	1. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum	1. Pengembangan produksi perikanan budidaya untuk
5.2.	Konsumsi ikan/kapita/thn	<		
5.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	Tidak ada data		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	Tidak ada data	<p>sependukungnya dikelola secara efisien dengan penerapan teknologi maju dengan budaya bisnis.</p> <p>2. Tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang belum merata di seluruh Sumatera Utara, khususnya perikanan tangkap.</p> <p>3. Terjadinya cara-cara pemanfaatan sumberdaya perikanan yang tidak bertanggungjawab.</p> <p>4. Terjadinya pencemaran perairan umum dan perairan pantai akibat limbah industri dan rumah tangga.</p> <p>5. dukungan prasarana terhadap pengembangan perikanan tangkap dan budidaya ikan dibandingkan dengan potensi perikanan yang tersedia</p> <p>6. Jumlah induk unggul untuk kegiatan pembenihan</p>	<p>konsumsi dalam negeri dan ekspor di kawasan budidaya air tawar,air payau/tambak dan air laut</p> <p>2. Pengadaan kapal dan alat penangkap ikan</p> <p>3. Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana budidaya melalui pengadaan calon induk unggul dan pengadaan mesin pellet</p> <p>4. Identifikasi potensi dan pemetaan pulau di Sumatera Utara</p> <p>5. Pengembangan kluster industri pengolahan hasil perikanan</p>
<b>Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017</b>				II-160

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>6.</b>	<b>Perdagangan</b>			
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	>		
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	>		
<b>7.</b>	<b>Perindustrian</b>			
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	<	1. Krisis energi listrik yang menghambat produksi industri rumah tangga 2. Bahan baku masih diimpor dari luar	1. Peningkatan pembangunan infrastruktur dibidang energi listrik
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	<		
7.3.	Pertumbuhan Industri.	<		